



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG



2025



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
INSPEKTORAT
Komplek Perkantoran Tigaraksa Telp. (021) 5994513, (Fax) 5994514
TIGARAKSA - TANGERANG

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2025

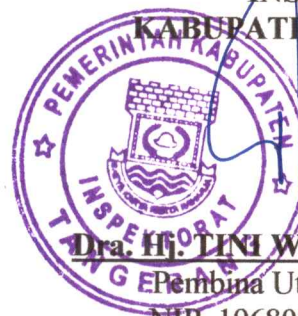
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tangerang untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini,

Tigaraksa, 26 Maret 2026

INSPEKTUR
KABUPATEN TANGERANG



Dra. Hj. LINI WARTINI, M.Si, CGRE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680721 198803 2 004

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, laporan kinerja Pemerintah Daerah ini dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan ini memuat berbagai capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang telah diambil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan bagi perbaikan dan pengembangan kebijakan di masa yang akan datang, guna memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat berbagai kendala dan tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah, instansi terkait, serta masyarakat yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program yang tertuang dalam laporan ini. Semoga laporan ini tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi referensi berharga dalam perbaikan kinerja serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi dasar dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Tigaraksa, Maret 2026

BUPATI TANGERANG

H. MOCH. MAESYAL RASYID

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP semata-mata dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. Maka dari itu, LKIP adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja lembaga. Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 juga bertujuan sebagai:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Semua Program yang dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) selama 3 tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis perangkat daerah. Tahun 2025 merupakan tahun Kedua pelaksanaan RPD Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Laporan ini mengukur keberhasilan dari 14 Sasaran Strategis, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Tangerang Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1.	Indeks Pendidikan	Indeks	0,70	0,66	94,77
2	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	2.	Indeks Kesehatan	Indeks	0,860	0,856	99,52
3	Meningkatkan Daya Saing Pemuda	3.	Indeks pembangunan Pemuda	Indeks	53	57,50*	108,49

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
1	2	3		4	5	6	7
4	Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	4.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	64	69,37*	108,39
5	Meningkatkan Pengendalian Penduduk	5.	Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka	1,15	1,20	95,83
6	Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif, Aman, dan Tertib	6.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	1	1	100,00
7	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	7.	Laju Pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Angka	3,48	11,61	333,62
		8.	Persentase Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	%	5,12	43,20	843,74
		9.	Persentase Daya saing produk unggulan lokal	%	26,52	26,52	100,00
		10.	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	3,57	4,83	135,29
8	Meningkatkan Kemandirian Desa	11.	Indeks desa membangun	%	0,7853	0,7853	100,0
9	Meningkatnya Ketahanan Pangan	12.	Indeks ketahanan pangan	%	78,00	79,39	101,78

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
1	2	3		4	5	6	7
10	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	13.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Angka	67,85	66,26	97,66
11	Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	14.	Persentase PPKS yang berdaya	%	1,69	1,69	100,00
12	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	15.	Nilai Sakip	Nilai	78	77,87	99,83
		16.	Nilai indeks kemandirian fiskal	Nilai	0,525	0,605	115,24
		17.	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP*	100
		18.	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	75	83,65	111,53
		19.	Maturitas SPIP terintegrasi	Angka	3	2,60	86,67
		20.	Indeks SPBE	Indeks	3,19	3,91*	122,57
		21.	Indeks Pelayanan publik	Indeks	4,3	4,22	98,14
13	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	22.	Presentase infrastruktur dalam kondisi baik	%	95	97,00*	102,11
		23.	Presentase Realisasi pola pemanfaatan ruang sesuai RTRW	%	55	57,72	104,95

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
1	2	3		4	5	6	7
		24.	Rasio luas kawasan permukiman, perumahan dan pemakaman yang layak	Rasio	0,9442	0,9473	100,33
		25.	Rasio konektivitas kabupaten	Rasio	0,83	0,60	72,29
14	Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh Terhadap Bencana	26.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	56,89	60,18	105,78
		27.	Indeks resiko bencana (IRBI)	Indeks	115	125,22	91,84

DAFTAR ISI

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x

BAB I PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG	2
II. MAKSUD DAN TUJUAN	4
III. DASAR HUKUM	5
IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANGERANG	6
V. ASPEK STRATEGIS	26
VI. ISU STRATEGIS	28
VII. SISTEMATIKA PENULISAN	33

BAB II PERENCANAAN KINERJA

I. RENCANA STRATEGIS	35
II. PERJANJIAN KINERJA	41

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

I. CAPAIAN KINERJA	52
II. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS	62
III. REALISASI KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN SASTRA	207
IV. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	215

BAB IV PENUTUP	218
-----------------------------	------------

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Tangerang	7
Gambar 1.2 Kondisi Geologi Kabupaten Tangerang	8
Gambar 1.3 Peta Jenis Tanah Hujan Kabupaten Tangerang	10
Gambar 1.4 Peta Curah Hujan Kabupaten Tangerang Bagian Selatan	11
Gambar 1.5 Peta DAS Kabupaten Tangerang	12
Gambar 1.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025	16
Gambar 1.7 Piramida Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025 (dalam jiwa)	18
Gambar 1.8 Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang Tahun 2025	21
Gambar 1.9 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2025	23
Gambar 1.10 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2025	24
Gambar 1.11 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2025	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah, dan Sub Wilayah Administratif di Kabupaten Tangerang Tahun 2025	6
Tabel 1.2 Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Tangerang	9
Tabel 1.3 Curah Hujan Perbulan Kabupaten Tangerang Tahun 2025	10
Tabel 1.4 Luas dan Sebaran DAS Kabupaten Tangerang Bagian Selatan	12
Tabel 1.5 Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Tangerang	13
Tabel 1.6 Data Iklim Kabupaten Tangerang, Tahun 2025	14
Tabel 1.7 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang Tahun 2025	15
Tabel 1.8 Rasio Kelamin dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2025	16
Tabel 1.9 Jumlah Pegawai di Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025	19
Tabel 1.10 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen), Tahun 2019-2025	22
Tabel 1.11 Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025	26
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang	37
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025	41
Tabel 2.3 Program Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025	44
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025	53
Tabel 3.2 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	60
Tabel 3.3 Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2025	208
Tabel 3.4 Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025	216

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah, dan Sub Wilayah Administratif di Kabupaten Tangerang Tahun 2025	6
Tabel 1.2 Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Tangerang	9
Tabel 1.3 Curah Hujan Perbulan Kabupaten Tangerang Tahun 2025	10
Tabel 1.4 Luas dan Sebaran DAS Kabupaten Tangerang Bagian Selatan	12
Tabel 1.5 Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Tangerang	13
Tabel 1.6 Data Iklim Kabupaten Tangerang, Tahun 2025	14
Tabel 1.7 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang Tahun 2025	15
Tabel 1.8 Rasio Kelamin dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2025	16
Tabel 1.9 Jumlah Pegawai di Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025	19
Tabel 1.10 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen), Tahun 2019-2025	22
Tabel 1.11 Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025	26
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang	37
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025	41
Tabel 2.3 Program Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025	44
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025	53
Tabel 3.2 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	60
Tabel 3.3 Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2025	207
Tabel 3.4 Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025	215



BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pelaporan kinerja adalah salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menjadi bagian proses penting pertanggungjawaban dalam kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel dan efektif. Pelaporan Kinerja menjadi tahap keempat dalam siklus SAKIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta revaluasi dan evaluasi kinerja. Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja.

Peraturan Presiden ini ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis tentang mekanisme dan substansi penyusunan pelaporan kinerja yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD/RPD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai salah satu proses mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. LKIP Kabupaten Tangerang menyajikan berbagai

keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2025 dan perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja dengan realisasinya, LKIP disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 terdiri dari 34 indikator. Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang yang tertuang di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 terdiri dari 14 Sasaran Strategis dan 27 Indikator Kinerja Sasaran. Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Maksud penyusunan LKjIP adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang sesuai dengan yang target kinerja sudah diperjanjikan.

TUJUAN

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

III.DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indoneisa Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indoneia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
8. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 75 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026;
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025.
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Gambaran umum daerah Kabupaten Tangerang disajikan berdasarkan kondisi geografis, demografis, perangkat daerah serta kondisi ekonomi, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

a. Kondisi Geografis Daerah

Luas wilayah Kabupaten Tangerang adalah sebesar 103.244 Ha atau 1.027,76 km² 10,9% dari luas Provinsi Banten. Secara administratif, Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah otonom yang menjadi bagian dari Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan dengan 28 kelurahan dan 246 desa dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tigaraksa. Kecamatan yang memiliki area dengan luasan terbesar adalah Kecamatan Rajeg dengan luas wilayah sebesar 5.370 Ha atau 5,60% dari luas wilayah Kabupaten Tangerang. Sedangkan Kecamatan yang memiliki wilayah dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Sepatan dengan luas wilayah 1.732 Ha atau 1,80% dari total wilayah Kabupaten Tangerang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 1.1.

Sementara itu, jarak antara Kabupaten Tangerang dengan Pusat Pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 km, keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta – Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.

Tabel 1. 1
Luas Wilayah, dan Sub Wilayah Administratif di Kabupaten Tangerang Tahun 2025

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)
1	Balaraja	Talagasari	3.148,38
2	Cikupa	Budimulya	4.314,81
3	Cisauk	Sampora	2.966,97
4	Cisoka	Cisoka	3.358,47
5	Curug	Cukanggalih	3.010,98
6	Gunung Kaler	Gunung Kaler	3.295,62
7	Jambe	Tiparaya	3.009,18
8	Jayanti	Cikande	2.872,53
9	Kelapa Dua	Curug Sangereng	2.508,49
10	Kemiri	Kemiri	3.441,20
11	Kosambi	Selembaran Jaya	3.642,77

wilayah Kabupaten Tangerang adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa (dengan panjang garis pantai ± 54 km), sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Provinsi DKI Jakarta, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat) dan Kabupaten Lebak, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang merupakan dataran rendah, yang memiliki topografi relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0 - 3% menurun ke utara sedangkan daerah pesisir pantainya sepanjang kurang lebih 54 km. Ketinggian wilayah antara 0 - 85 m di atas permukaan laut. Secara garis besar terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Dataran rendah di bagian utara dengan ketinggian berkisar antara 0 – 25 meter di atas permukaan laut, yang meliputi Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Kronjo, Pakuhaji, Sepatan, dan Sepatan Timur.
2. Dataran tinggi di bagian tengah ke arah selatan dengan ketinggian antara 25 – 85 meter di atas permukaan laut terletak di bagian tengah ke arah selatan. Kemiringan tanah rata-rata 0 - 8 % menurun ke utara.

Struktur batuan yang terbentuk di Kabupaten Tangerang adalah:

1. Alluvium, terdiri dari lempung, kerikil, kerakal.
2. Tuf Banten (Banten Tuff), terdiri dari batu apung dan batu pasir tuffan.

Gambar 1. 2
Kondisi Geologi Kabupaten Tangerang



Kabupaten Tangerang bagian utara merupakan daerah yang sedikit bergelombang lemah. Daerah ini termasuk dalam kategori bentuk lahan bentukan asal pengendapan (alluvial). Jenis tanah Kabupaten Tangerang secara keseluruhan terdiri dari aluvial kelabu, aluvial kelabu tua, asosiasi aluvial kelabu tua dan glei humus rendah, asosiasi glei humus, dan planosol, regosol coklat, asosiasi latosol merah dan latosol merah kecoklatan, padsolic kuning, asosiasi padsolic kuning, asosiasi padsolic kuning, dan hidromorf kelabu. Dengan jenis tanah demikian memungkinkan untuk pengembangan pertanian dan budi daya. Proses terjadinya tanah aluvial ini berlangsung karena adanya endapan sungai dan danau di daerah dataran dan daerah cekungan. Di wilayah dataran rendah dijumpai pula jenis tanah glei regosol dan sedikit padsolic yaitu asosiasinya.

Jika dilihat dari teksturnya, tekstur tanah adalah komposisi fraksi pasir, debu, dan tanah liat pada agregat (massa) tanah, sehingga dapat dikelompokkan ke dalam kelas tekstur tanah yaitu: halus, sedang, dan kasar. Luas wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan pengelompokan tersebut terdiri dari:

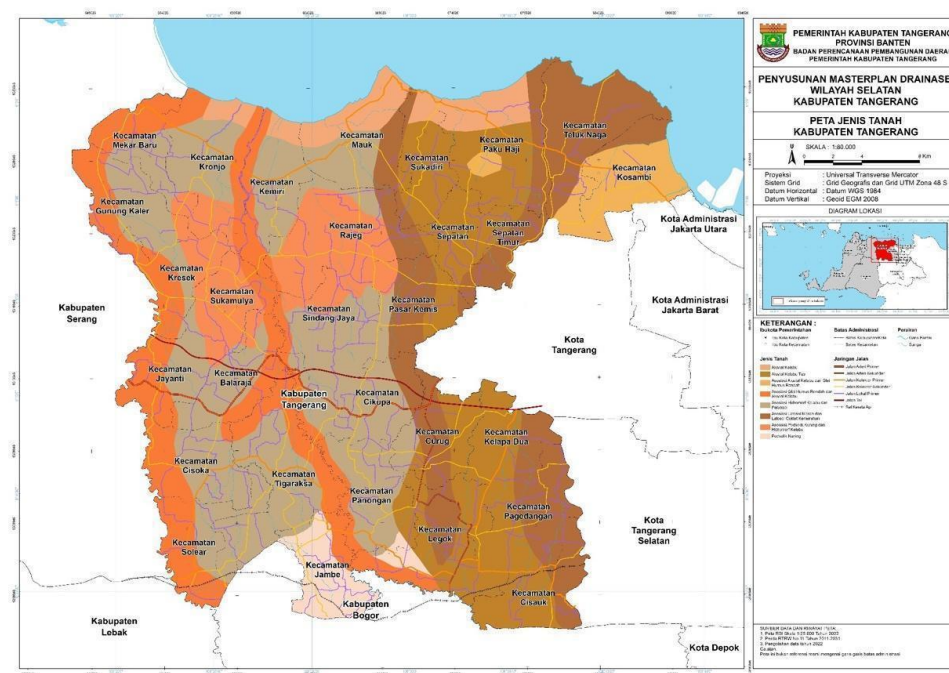
Tanah memiliki banyak jenis karena perbedaan proses pembentukan dan unsur yang terdapat di dalamnya juga berbeda. Berdasarkan data dan informasi RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031, jenis tanah di Kabupaten Tangerang rata-rata di dominasi oleh jenis tanah Asosiasi Hidromorf Kelabu dan Paluosol dengan luas sebesar 30.363,83 ha. Adapun Luas dan Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 1. 2
Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Tangerang

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Aluvial Kelabu	4.411,22
2	Aluvial Kelabu Tua	17.871,50
3	Asosiasi Aluvial Kelabu dan Gleि Humus Rendah	3.880,58
4	Asosiasi Gleि Humus Rendah dan Aluvial Kelabu	16.043,44
5	Asosiasi Hidromorf Kelabu dan Paluosol	30.363,83
6	Asosiasi Latosol Merah dan Latosol Coklat Kemerahan	18.221,99
7	Asosiasi Podsolik Kuning dan Hidromorf Kelabu	9.576,04
8	Podsolik Kuning	2.875,57
Total Luas		103.244,18

Sumber: RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031

Gambar 1. 3
Peta Jenis Tanah Hujan Kabupaten Tangerang



Menurut BMKG (2025), Curah Hujan (mm) adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir. Unsur hujan 1 (satu) milimeter artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air hujan setinggi satu milimeter atau tertampung air hujan sebanyak satu liter.

Berdasarkan data dan informasi dari BMKG Stasiun Klimatologi Pondok Betung, rata-rata jumlah curah hujan per-bulan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 sebesar 222,06 mm dengan rata-rata jumlah hari sebesar 25 hari, sedangkan jumlah curah hujan tahunan Kabupaten Tangerang bagian selatan sebesar 2.500 - 3.000 mm dan 3.000 - 3.500 mm. untuk lebih jelasnya mengenai curah hujan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 3
Curah Hujan Perbulan Kabupaten Tangerang Tahun 2025

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan
Januari	322,60	21
Februari	161	19
Maret	149,50	23
April	483,60	27
Mei	102,60	14
Juni	123,40	15

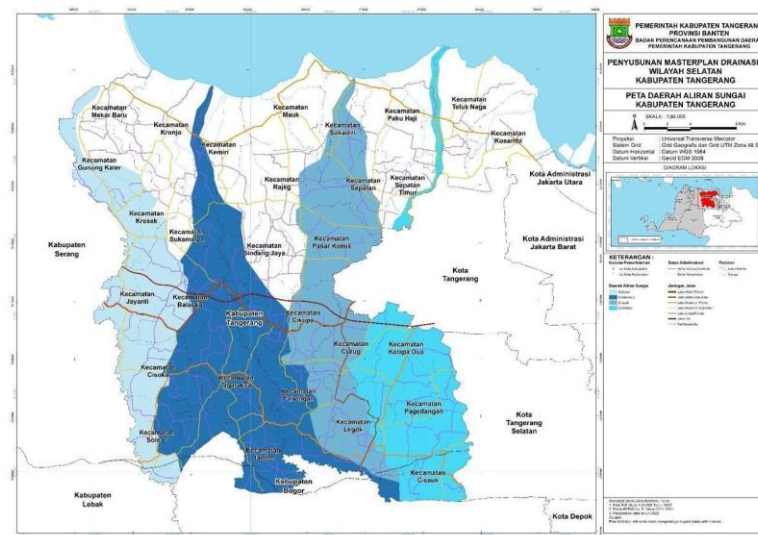
secara alamiah. Kabupaten Tangerang terdapat 4 Daerah Aliran Sungai, dengan total luas seluas 64.016,14 ha.

Tabel 1. 4
Luas dan Sebaran DAS Kabupaten Tangerang Bagian Selatan

No	DAS	Luas (Ha)
1	Cidurian	12.683,78
2	Cimanceuri	22.978,16
3	Cirarab	15.568,15
4	Cisadane	12.786,05
Total Luas		64.016,14

Sumber: RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031

Gambar 1. 5
Peta DAS Kabupaten Tangerang



Air tanah secara umum memiliki potensi yang cukup tinggi, meskipun di beberapa Kecamatan (Kecamatan Mauk, Sukadiri, Kemiri, Kronjo, Pakuhaji, Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi) terindikasi intrusi air laut dan terjadinya eksploitasi air tanah yang cukup tinggi untuk kebutuhan industri karena terbatasnya sumber air permukaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, pasal (1) menyebutkan bahwa Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km². Sedang pada pasal 1 ayat (6), disebutkan: Daerah Pengaliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut

secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Sungai adalah aliran air di permukaan besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). Sungai terpanjang di Kabupaten Tangerang yaitu Sungai Cimateuri dengan panjang sungai 69,09 km. Adapun Nama dan panjang Sungai Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 1. 5
Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Tangerang

No	Nama Sungai	Panjang	
		Meter	Kilometer
1	Ci Apus	4.398,68	4,40
2	Ci Asin	8.352,70	8,35
3	Ci Barebeg	11.082,47	11,08
4	Ci Biuk (Cilaku)	19.022,32	19,02
5	Ci Bolang	2.740,00	2,74
6	Ci Bugel	5.383,19	5,38
7	Ci Calengka	5.665,02	5,67
8	Ci Cayur	17.593,12	17,59
9	Ci Conteng	3.239,67	3,24
10	Ci Garukgak	11.149,60	11,15
11	Ci Jantra	7.152,19	7,15
12	Ci Kakalen	8.318,01	8,32
13	Ci Kolar	9.484,69	9,48
14	Ci Leuleus	6.261,43	6,26
15	Ci Longo	4.499,33	4,50
16	Ci Longok	14.940,32	14,94
17	Ci Lowong	5.872,08	5,87
18	Ci Manaeuh	9.061,90	9,06
19	Ci Manceuri	17.526,77	17,53
20	Ci Matuk	8.063,33	8,06
21	Ci Mauk	9.365,46	9,37
22	Ci Odeng	2.215,72	2,22
23	Ci Pasilian	14.989,00	14,99
24	Ci Payauen	25.979,68	25,98
25	Ci Rajeun	9.746,30	9,75
26	Ci Rangon	9.995,44	10,00
27	Ci Rarab	9.338,65	9,34

No	Nama Sungai	Panjang	
		Meter	Kilometer
28	Ci Rumpak	3.141,77	3,14
29	Ci Sabi	16.288,51	16,29
30	Ci Sauk	9.405,77	9,41
31	Ci Slatip	4.573,85	4,57
32	Ci Soge	16.879,87	16,88
33	Ci Tuis	4.739,52	4,74
34	Kali Kramat	9.395,94	9,40
35	Kali Apung	5.985,33	5,99
36	Kali Asin	7.666,24	7,67
37	Kali Ketapang	5.218,47	5,22
38	Kali Perancis	10.597,04	10,60
39	S. Cidurian	3.746,69	3,75
40	S. Cimanceuri	69.091,40	69,09
41	S. Cirarab	49.657,11	49,66
42	S. Cisadane	40.794,53	40,79
43	Sungai Tahang	10.834,21	10,83
44	Terusan Apung	21.346,44	21,35
Total Panjang		50.799,75	550,80

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan suhu yang relatif panas dengan kelembaban yang tinggi. Temperatur udara berdasarkan penelitian di Stasiun Geofisika Klas I Tangerang rata-rata berkisar antara 19,70 – 37,30 0C, suhu maksimum tertinggi pada bulan Oktober yaitu 37,30 0C dan suhu minimum terendah pada bulan Juli yaitu 19,70 0C. Rata-rata kelembaban udara dan intensitas matahari sekitar 82% dan 27,36%. Keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November sedangkan rata-rata curah hujan dalam setahun adalah 222,05 mm. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 1.6.

Tabel 1. 6
Data Iklim Kabupaten Tangerang, Tahun 2025

Uraian Data	Nilai	Satuan
Data Geografis		
a. Luas Wilayah	1.027,76	km ²
b. Ketinggian	85	Mdpl
c. Wilayah Terluas (Rajeg)	53,7	Ha
d. Wilayah Terkecil (Sepatan)	17,32	Ha

Uraian Data	Nilai	Satuan
Iklim		
a. Rata-rata Temperatur Udara	27,36°	°C
b. Rata-rata Kelembaban Udara	82	%
c. Rata-rata intensitas matahari	3,85	Jam
d. Rata-rata Curah Hujan	222	Mm/tahun

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2025

b. Kondisi Demografis

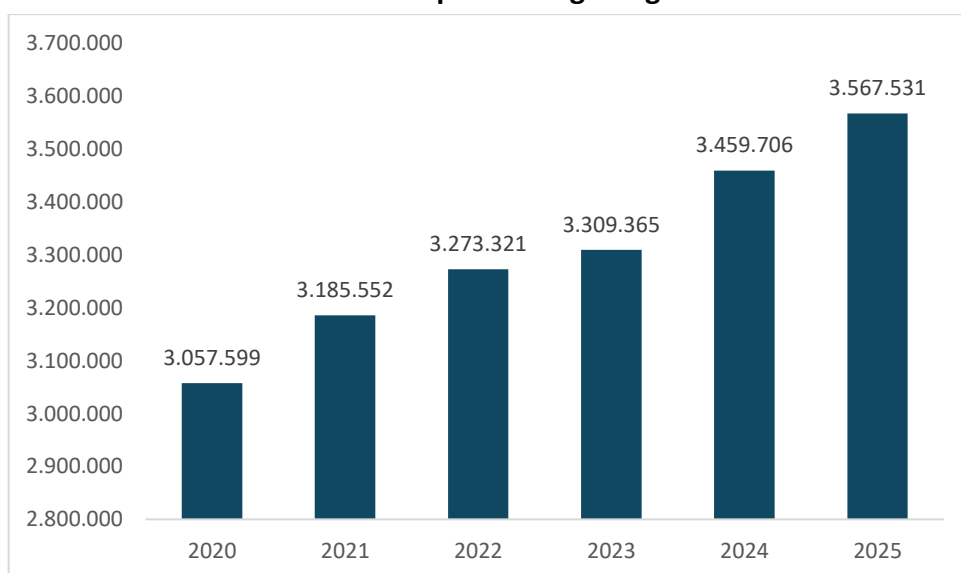
Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang , penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 berjumlah 3,567,531 jiwa, yang terdiri dari 1.814.357 jiwa penduduk laki-laki dan 1.753.174 jiwa penduduk Perempuan. Kepadatan penduduknya sebesar 3,198,86 per km². Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan, Jumlah kepemilikan KTP Elektronik di Kabupaten Tangerang sekitar 2.526.611 jiwa.

Tabel 1. 7
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang Tahun 2025

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	125.744	116.363	242.107
5 – 9	169.545	156.931	326.476
10 – 14	166.777	155.120	321.897
15 – 19	144.176	137.099	281.275
20 – 24	143.657	138.176	281.833
25 – 29	149.260	145.940	295.200
30 – 34	155.032	150.031	305.063
35 – 39	149.144	141.931	291.075
40 – 44	142.031	140.457	282.488
45 – 49	127.612	134.985	262.597
50 – 54	109.606	111.425	221.031
55 – 59	89.418	83.517	172.935
60 – 64	58.431	55.855	114.286
65 – 69	40.287	39.167	79.454
70 – 74	22.567	20.312	42.879
75+	21.070	25.865	46.935
Jumlah	1.814.357	1.753.174	3.567.531

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Gambar 1. 6
Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Tabel 1. 8
Rasio Kelamin dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	% Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin
1	Cisoka	55.000	52.519	107,519	3,01	3,126,43	104,9
2	Solear	58.811	55.612	114,423	3,21	2,992,66	105,8
3	Tigaraksa	89.227	86.815	176,042	4,93	2,956,91	102,9
4	Jambe	31.025	29.843	60,868	1,71	1,969,80	104,2
5	Cikupa	110.824	106.813	217,637	6,10	4,546,97	104
6	Panongan	71.738	69.367	141,105	3,96	3,596,37	103,6
7	Curug	95.155	93.517	188,672	5,29	5,728,25	102
8	Kelapa Dua	87.942	88.914	176,856	4,96	6,390,51	99,1
9	Legok	68.437	65.665	134,102	3,76	3,335,09	104,4
10	Pagedangan	62.749	61.261	124,010	3,48	2,191,49	102,6
11	Cisauk	51.233	50.059	101,292	2,84	3,043,14	102,8
12	Pasar Kemis	135.390	131.949	267,339	7,49	8,308,34	102,6
13	Sindang Jaya	53.014	51.240	104,254	2,92	2,308,88	103,4
14	Balaraja	67.500	65.128	132,628	3,72	3,843,46	103,7
15	Jayanti	38.124	36.774	74,898	2,10	2,842,82	103,9
16	Sukamulya	39.948	38.994	78,942	2,21	2,921,01	102,2
17	Kresiek	39.039	37.620	76,659	2,15	2,393,99	103,5
18	Gunung Kaler	30.976	30.158	61,134	1,71	1,713,82	102,6
19	Kronjo	35.467	34.984	70,451	1,97	141,03	101,3
20	Mekar Baru	24.560	23.864	48,424	1,36	1,712,34	103

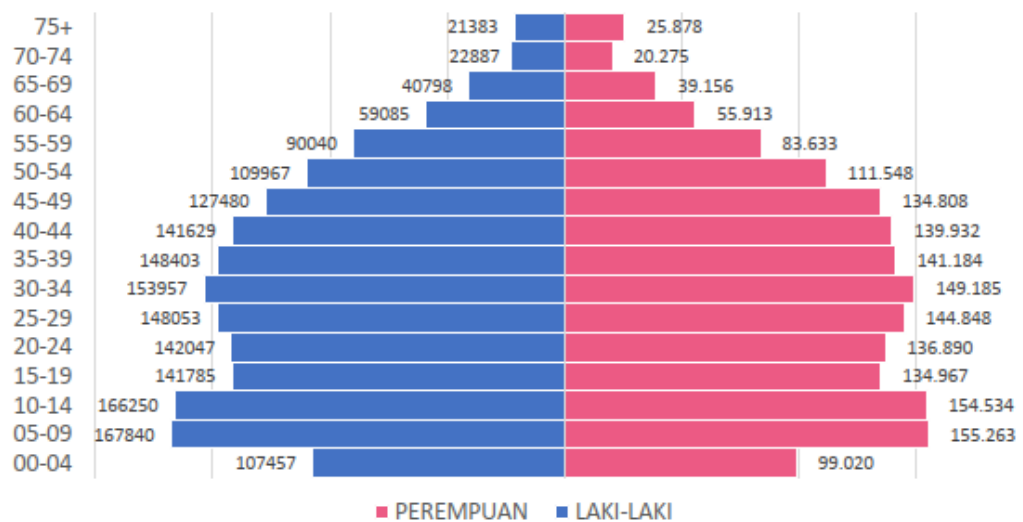
No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	% Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin
21	Mauk	49.561	47.322	96,883	2,72	2,033,21	104,8
22	Kemiri	28.213	27.155	55,368	1,55	1,524,00	104,2
23	Sukadiri	36.421	34.935	71,356	2,00	266,77	104,6
24	Rajeg	108.706	103.666	212,372	5,95	3,531,07	104,9
25	Sepatan	62.146	59.233	121,379	3,40	5,841,31	105,1
26	Sepatan Timur	59.427	55.681	115,108	3,23	5,390,78	106,6
27	Pakuhaji	70.560	66.681	137,241	3,85	2,334,29	106
28	Teluknaga	92.399	88.657	181,056	5,08	3,204,78	104,2
29	Kosambi	60.765	58.748	119,513	3,35	3,095,05	103,4
Jumlah/Total		1,814,357	1.753.174	3.567.531	100	3,198.86	103,6

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Sex Ratio penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah 103,48, sedangkan tahun 2024 adalah 103,59. Sex ratio 103.48 yang berarti terdapat 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk Perempuan. Sex Ratio terbesar terdapat di Kecamatan Sepatan Timur yakni sebesar 106,73 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Kecamatan Kelapa Dua yakni sebesar 98,91.

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak pada kisaran umur 5-9 tahun yaitu sebesar 326.476 jiwa naik dari tahun 2024 yang sebanyak 320.725 jiwa, usia 5-9 tahun merupakan usia anak balita dengan Pendidikan PAUD/TK serta usia anak kelas 3 Sekolah Dasar. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berdasarkan kelompok umur terdapat pada kisaran umur 75 tahun keatas yaitu sebanyak 46.935 jiwa naik dari tahun 2024 yang sebesar 37.154 jiwa, usia lanjut usia ini didominasi oleh jenis kelamin Perempuan sebanyak 25.865 jiwa naik dari tahun 2024 yang sebanyak 20.308 jiwa. Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.7.

Gambar 1. 7
Piramida Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025
(dalam jiwa)



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025 Semester I

Piramida penduduk Kabupaten Tangerang menurut data tahun 2025 berbentuk piramida ekspansif. Piramida ekspansif memiliki bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Piramida ini dikenal juga dengan istilah piramida segitiga, kerucut, limas, atau piramida penduduk muda. Kondisi ini menunjukkan penduduk di Kabupaten Tangerang berada dalam keadaan tumbuh. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar daripada kelompok usia lain. Berarti, angka kelahiran tinggi, dan tingkat kematian bayi rendah. Selain itu, kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk di usia produktif, yaitu golongan usia remaja hingga dewasa mendominasi komposisi penduduk di Kabupaten Tangerang. Komposisi seperti ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai kelebihan, kondisi ini dapat menjadi keuntungan bagi Kabupaten Tangerang karena memiliki SDM usia produktif yang melimpah sebagai bonus demografi.

c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menggerakkan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar dapat mewujudkan pelayanan prima.

Tabel 1. 9
Jumlah Pegawai di Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	JF Guru	JF Tertentu	Nakes	Pelaksana	Struktural	Jumlah
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		26		59	10	95
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				39	13	52
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		86		82	6	174
4	Badan Pendapatan Daerah		10		129	25	164
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		6		62	16	84
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		24		39	7	70
7	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air		9		96	48	153
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		25		53	8	86
9	Dinas Kesehatan		11	1513	164	58	1746
10	Dinas Komunikasi dan Informatika		34		25	8	67
11	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		13		21	7	41
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		15		51	32	98
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		5		29	7	41
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		13		28	8	49
15	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata		5		27	6	38
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		44		17	3	64
17	Dinas Pendidikan	8785	102		239	15	9141
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10		31	9	50
19	Dinas Perhubungan		12		137	18	167
20	Dinas Perikanan		5		29	9	43
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		24		20	8	52
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip		34		33	6	73
23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		49		30	15	94
24	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman		5		56	13	74
25	Dinas Sosial		14		22	7	43
26	Dinas Tata Ruang dan Bangunan		21		61	13	95
27	Dinas Tenaga Kerja		28		22	9	59
28	Inspektorat		64		38	9	111
29	Kecamatan Balaraja		1		9	14	24
30	Kecamatan Cikupa		1		9	19	29
31	Kecamatan Cisauk		1		13	14	28

No.	Perangkat Daerah	JF Guru	JF Tertentu	Nakes	Pelaksana	Struktural	Jumlah
32	Kecamatan Cisoka		1		10	8	19
33	Kecamatan Curug		1		12	24	37
34	Kecamatan Gunung Kaler		1		9	8	18
35	Kecamatan Jambe		1		12	8	21
36	Kecamatan Jayanti				8	9	17
37	Kecamatan Kelapa Dua		1		13	34	48
38	Kecamatan Kemiri		1		10	7	18
39	Kecamatan Kosambi				14	24	38
40	Kecamatan Kresek		1		8	8	17
41	Kecamatan Kronjo				12	9	21
42	Kecamatan Legok		1		16	14	31
43	Kecamatan Mauk		1		11	14	26
44	Kecamatan Mekar Baru		1		14	8	23
45	Kecamatan Pagedangan		1		20	13	34
46	Kecamatan Pakuhaji		1		10	14	25
47	Kecamatan Panongan		2		15	13	30
48	Kecamatan Pasar Kemis				17	29	46
49	Kecamatan Rajeg				17	14	31
50	Kecamatan Sepatan		1		13	12	26
51	Kecamatan Sepatan Timur		1		8	8	17
52	Kecamatan Sindang Jaya		1		10	8	19
53	Kecamatan Solear				13	9	22
54	Kecamatan Sukadiri		1		15	9	25
55	Kecamatan Sukamulya		2		11	8	21
56	Kecamatan Teluk Naga		1		17	8	26
57	Kecamatan Tigaraksa		1		16	19	36
58	Satuan Polisi Pamong Praja		14		93	15	122
59	Sekretariat Daerah		76		99	26	201
60	Sekretariat DPRD		6		39	11	56
Jumlah/Total		8.785	836	2.743	2.388	870	15.622

Sumber : LKPI Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025

d. Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah membentuk kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1611), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0222), susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang terdiri dari:

Gambar 1. 8
Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang Tahun 2025



e. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Penyajian PDRB ADHK mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan.

Laju ekonomi Kabupaten Tangerang tahun 2025 mengalami pertumbuhan yang tinggi dibandingkan tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang meningkat menjadi 5,67% di tahun 2025 sedangkan tahun 2024 sekitar 5,00%, atau mengalami kenaikan sebesar 0,67% Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi maupun sisi permintaan akhir. Pada tahun 2025, industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB Kabupaten Tangerang yaitu sebesar 33,69 persen, diikuti oleh sektor konstruksi dan perdagangan besar, eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, masing-masing sebesar 16,50 persen dan

11,23 persen. Beberapa sektor PDRB mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 yaitu :

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (11,61%),
2. Real estate (8,19%),
3. Jasa Lainnya (6,72%),
4. Transportasi dan Pergudangan (7,51%),
5. Jasa Pendidikan (8,35%),
6. Industri Pengolahan (5,37%),
7. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (2,22%).

Tabel 1. 10
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen), Tahun 2019-2025

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.25	2.84	-0.84	2.26	1.74	-0.28	11.61
B	Pertambangan dan Penggalian	2,30	(5,90)	(9,45)	-12.35	0.25	4.8	4.02
C	Industri Pengolahan	3,20	(8,74)	4,26	5.44	7.01	4.61	5.37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	(4,23)	(12,35)	11,69	5.59	-0.45	- 13.42	0.95
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,71	8,60	5,81	1.35	5.69	1.93	2.22
F	Konstruksi	9,44	(3,29)	11,96	8.25	1.74	5.98	5.92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,22	(3,70)	1,82	3.27	4.83	5.94	5
H	Transportasi dan Pergudangan	9,55	(5,32)	9,90	7.89	5.84	6.04	7.51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,86	(5,63)	4,45	8.33	8.93	9.15	6.45
J	Informasi dan Komunikasi	9,69	9,12	5,17	6.84	9.34	6.47	5.03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,72	1,56	6,07	6.81	-0.48	0.9	-3.17
L	Real Estat	9,49	1,96	3,07	5.19	5.2	5.33	8.19
M,N	Jasa Perusahaan	9,20	(6,00)	(2,25)	4.46	8.52	8.39	5.44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	8,75	(0,38)	(0,76)	1.09	3.17	26.36	6.53
P	Jasa Pendidikan	8,30	0,69	(1,10)	-0.02	6.82	7.01	8.35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,13	4,41	9,14	2.94	8.94	13.23	0.14
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,36	(6,11)	1,39	7.77	10.98	4.68	6.72
Produk Domestik Regional Bruto		5,56	(3,76)	4,70	5.47	5.18	5	5.67

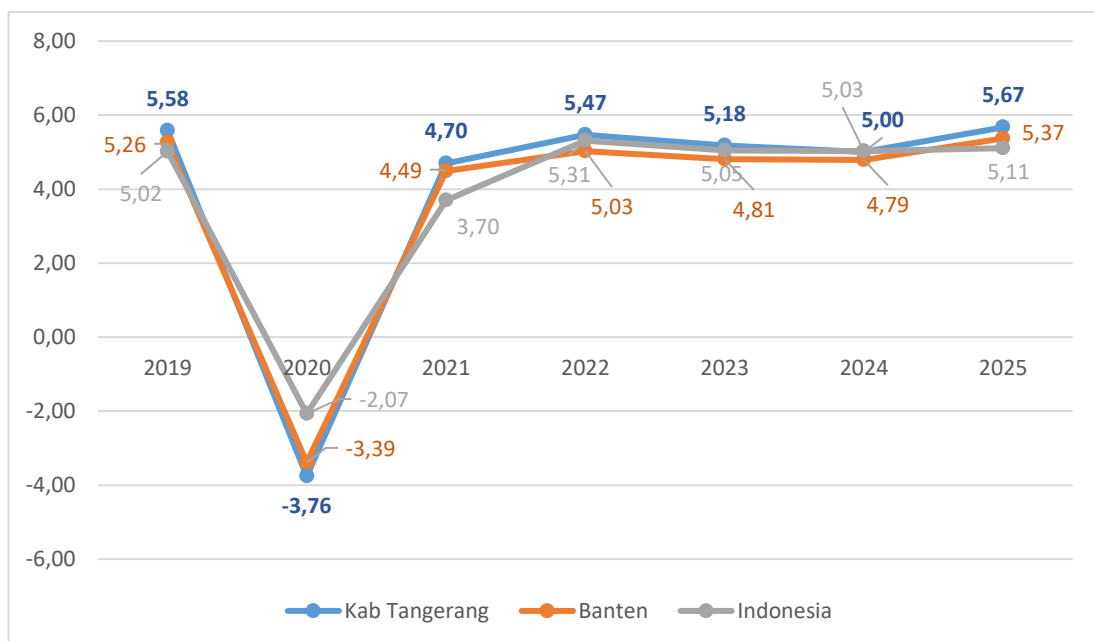
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang yang tumbuh di tahun 2025, dikarenakan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Real estate, Jasa Lainnya, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Pendidikan, Industri Pengolahan, Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, sektor industry pengolahan tetap

sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi karena menyerap banyak tenaga kerja di Kabupaten Tangerang.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Banten dan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang tahun 2019-2025, nilainya berkisar di atas angka 5,67% dan relatif masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten (5,37%) dan nasional (5,11%). Laju pertumbuhan ekonomi nasional, Banten dan Kabupaten Tangerang mulai pulih dengan ditunjukkan dengan mulai tumbuh positif, pada tahun 2021-2022 Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat di angka 4,70% di tahun 2021, dan meningkat di tahun 2022 diangka 5,47%, dan tahun 2025 sebesar 5,67%, tetapi Provinsi Banten dibawah Kabupaten Tangerang yang tumbuh sekitar 5,37%.

Gambar 1. 9
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2025



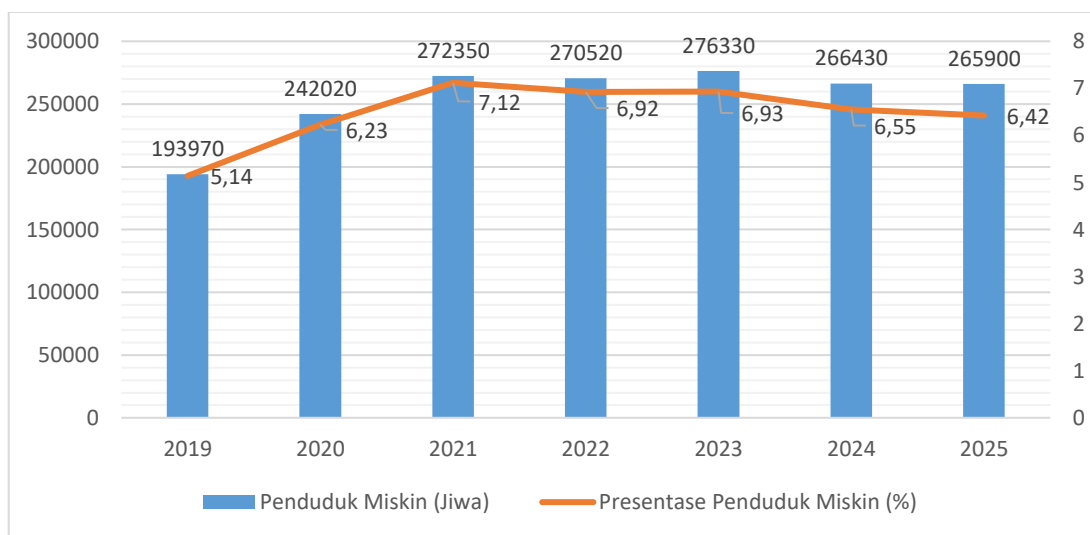
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

f. Kemiskinan

Kemiskinan didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemiskinan absolut yang mana pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Data dan informasi kemiskinan dirilis oleh BPS pada bulan Maret dan September tiap tahun, untuk bulan Maret BPS akan merilis Data dan Informasi Kemiskinan meliputi Kabupaten/Kota dan Provinsi, untuk bulan September BPS mempublikasikan data dan Informasi Kemiskinan per provinsi. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2025 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1. 10
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2025

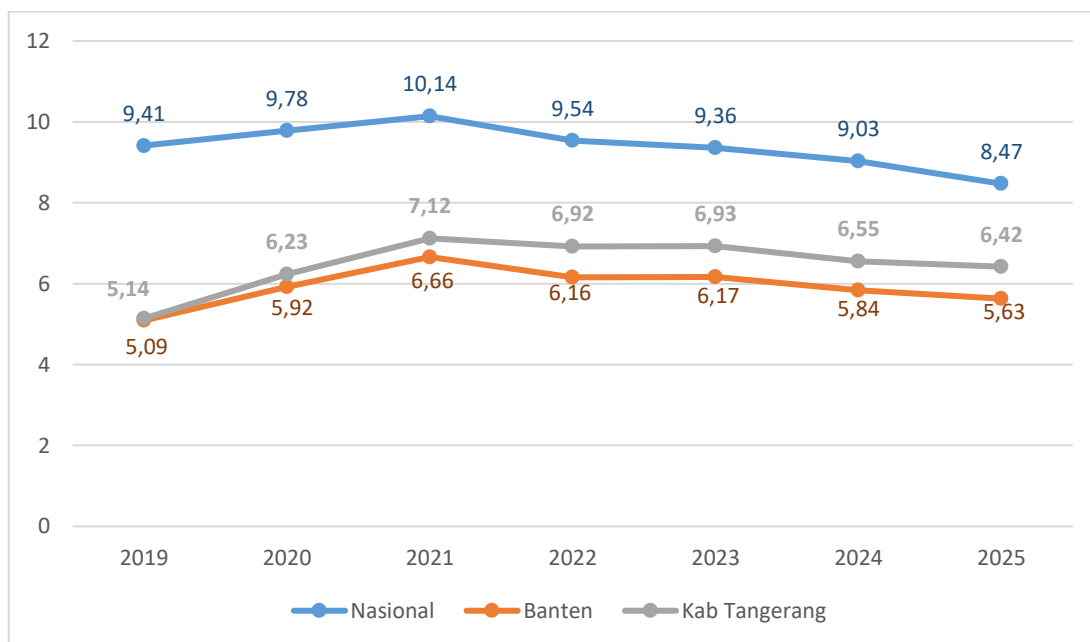


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data yang telah dirilis oleh BPS RI bersumber dari data Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2025, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Tangerang tahun 2024 sekitar 1,20, sedangkan tahun 2025 sebesar 0,887, indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Tangerang tahun 2024 sekitar 0,34, sedangkan tahun 2025 menjadi 0,209. Sementara itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tahun 2021 sekitar 7,12% atau sebanyak 272.350 orang, tahun 2022 turun menjadi 270.520 orang atau sekitar 6,92 persen, tahun 2023 jumlah penduduk miskin menjadi 276.330, jumlah penduduk miskin tahun 2024 turun menjadi 266.430 orang, tahun 2025 jumlah penduduk miskin turun menjadi 265.900 orang. Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2022 senilai Rp 576.122,-/kapita/bulan, sedangkan pada tahun 2023 sekitar 604,362 ,-/kapita/bulan, sedangkan pada tahun 2024 sekitar 632.941 ,-/kapita/bulan, tahun 2025 menjadi 655.324 Rp/kapita/bulan.

Selain itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang berfluktuasi nilainya, pada tahun 2019 persentase penduduk miskin sekitar 5,09%, mengalami kenaikan pada tahun 2020-2021 sebesar 5,92% dan 7,12% dampak dari Pandemi Covi , pada tahun 2022 kembali turun diangka 6,92%, pada tahun 2023 meningkat menjadi 6,93% dan tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 6,55%, tahun 2025 turun Kembali menjadi 6,42%. Sementara itu, Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional pada Tahun 2019-2025 dapat dilihat pada grafik .

Gambar 1. 11
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengentaskan kemiskinan dengan menjalankan beberapa program yang berasal dari pemerintah pusat, antara lain seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan non tunai. Selain itu, juga untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di tahun 2025 dengan melakukan tiga strategi intervensi antara lain mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

V. ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis pembangunan daerah menjadi landasan penting dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang. Aspek ini mencerminkan kondisi, tantangan, serta potensi yang dimiliki daerah yang perlu dikelola secara tepat melalui perencanaan pembangunan yang terarah dan terukur. Melalui penetapan indikator pembangunan makro serta perumusan visi dan misi pembangunan daerah, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan berjalan selaras dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya saing daerah.

Tabel 1. 11
Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang
Tahun 2025

No	Uraian Indikator Makro	Satuan	Capaian			Target RKPD 2025	Realisasi 2025
			2022	2023	2024		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,47	5,18	5,00	5,20-5,33	5,67
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,88	6,94	6,06	7,36	5,94
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,92	6,93	6,55	5,74	6,42
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,15	75,56	76,19	73,82	76,74
5	Index Gini	Poin	0,282	0,286	0,269	0,260	0,261

Sumber: LKPI Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025, 2025

Berdasarkan capaian indikator makro ekonomi hingga tahun 2025, kinerja pembangunan Kabupaten Tangerang menunjukkan perkembangan yang positif. Laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,67 persen atau berada di atas rentang target yang ditetapkan sebesar 5,05–5,30 persen. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,94 persen dan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,42 persen walaupun belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPD. Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami peningkatan menjadi 76,74 poin, sementara ketimpangan pendapatan yang tercermin dari Indeks Gini berada pada angka 0,261 yang relatif terkendali. Capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pembangunan yang

dilaksanakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Capaian tersebut selanjutnya menjadi landasan dalam pelaksanaan visi pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing.” Visi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat kemampuan daerah untuk bersaing melalui pembangunan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan enam misi pembangunan daerah. Misi pertama adalah mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Misi kedua adalah mewujudkan perekonomian yang kuat, produktif, dan berdaya saing melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan serta pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat. Misi ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan dan penguatan sistem pelayanan kesehatan yang merata.

Selanjutnya, misi keempat diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan yang berkualitas dan inklusif guna memperkuat kualitas sumber daya manusia. Misi kelima berfokus pada mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi guna mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat. Adapun misi keenam adalah meningkatkan ketahanan yang berkelanjutan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik, peningkatan ketahanan terhadap bencana, serta upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Melalui pelaksanaan misi-misi tersebut diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

VI. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tangerang pada RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan isu strategis yang dikaitkan dengan isu internasional, isu nasional dan isu daerah yang merupakan tantangan pembangunan yang perlu dicarikan solusinya.

a. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang kompetitif

1) Daya Saing dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

Pembangunan kualitas dan penyerapan tenaga kerja merupakan aspek dalam isu strategis Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang kompetitif. Aspek ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja di suatu daerah. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi adalah mismatch dengan lapangan pekerjaan, keterbatasan informasi lapangan kerja, keterbatasan pelatihan tenaga kerja, keterbatasan layanan perlindungan ketenagakerjaan. Akar permasalahan ini adalah: (1) terbatasnya kemitraan antara tenaga kerja dan perusahaan; (2) keterbatasan pendataan dan sistem informasi ketenagakerjaan; serta (3) belum optimalnya tata kelola, regulasi, dan pengawasan ketenagakerjaan.

2) Kualitas Layanan Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek dasar yang membentuk daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang. Sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pendidikan merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Akan tetapi, masih terdapat beberapa tantangan dan masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Tangerang, yakni : 1) belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan, 2) belum optimalnya pembentukan karakter peserta didik, 3) belum optimalnya literasi dan numerasi masyarakat, 4) kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, 5) belum maksimalnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas.

b. Peningkatan sumber daya ekonomi unggulan dan potensial yang berdaya ungkit serta pemenuhan infrastruktur dasar dan pemerataan Pembangunan wilayah

1) Skalabilitas Ekonomi Mikro

Perekonomian yang maju harus diikuti dengan penurunan ketimpangan dan penguatan ekonomi mikro. Maka dari itu diperlukan upaya peningkatan daya saing dan skalabilitas ekonomi di akar rumput yang meliputi UMKM, koperasi, BUMD, BUMDes, serta kewirausahaan. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi adalah dapat dilihat dari sisi produktivitas, tata kelola usaha dan kelembagaan, rantai dan akses pasar, keterbatasan permodalan. Akar permasalahan ini adalah: (1) terbatasnya kemitraan untuk rantai hilirisasi dan inovasi produk; (2) keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM; serta (3) keterbatasan informasi dan kemitraan untuk mengakses pasar.

2) Daya Saing Daerah dan Iklim Investasi

Peningkatan nilai tambah perekonomian didorong melalui daya saing daerah untuk berinovasi dan menghasilkan produk dengan keunggulan kompetitif, terlebih posisi Kabupaten Tangerang menjadi bagian dari aglomerasi Jabodetabek. Maka dari itu diperlukan integrasi ekonomi atau kerja sama lintas wilayah dan lintas stakeholder (e.g. pemerintah, badan usaha, swasta, dan lain sebagainya) yang dilandasi dengan kepastian regulasi dan iklim investasi yang kondusif. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi dapat dilihat dari sisi kewenangan/kelembagaan, tata kelola pemerintah, kepastian regulasi, dan sistem informasi yang belum terintegrasi. Akar permasalahan ini adalah: (1) belum optimalnya sinkronisasi dokumen rencana pembangunan serta koordinasi antar K/L dan OPD terkait; (2) belum optimalnya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal; (3) belum optimalnya adaptasi terhadap perubahan sistem perijinan menjadi OSS; serta (4) keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM.

3) Pemenuhan Infrastruktur Dasar

Pemenuhan sarana dan prasarana dasar merupakan aspek dari isu pemenuhan, penataan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur lingkungan masyarakat. Lingkup infrastruktur dasar meliputi infrastruktur Standar Pelayanan Minimum (SPM), permukiman yang layak, infrastruktur perhubungan dan transportasi, serta sarana penunjang sektor

perekonomian. Infrastruktur Standar Pelayanan Minimum (SPM) menjadi standar penghidupan yang layak dan pemerintah diharuskan menjamin akses masyarakat terhadap layanan/ infrastruktur tersebut. Akan tetapi permasalahannya adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap infrastruktur tersebut dari sisi ekonomi, sarana prasarana pendukung (jalan dan transportasi), dan geografis wilayah. Sanitasi dan permukiman layak merupakan infrastruktur dasar dan meningkatkan quality of life masyarakat. Akan tetapi permasalahannya adalah belum optimalnya regulasi penanganan permukiman tidak layak huni, minimnya inventarisasi/ pendataan cakupan permukiman kumuh, serta kecenderungan masyarakat menggunakan sarana-prasarana bermukim mandiri/ alami yang tidak sesuai standar. Dukungan infrastruktur berperan penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi permasalahannya adalah terbatasnya infrastruktur pendukung pada komoditas unggulan (perindustrian dan perdagangan) serta komoditas potensial (pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata). Akar permasalahan tersebut adalah keterbatasan anggaran, minimnya kemitraan untuk penyediaan dan pengembangan infrastruktur, serta belum optimalnya regulasi dan/atau skema insentif-disinsentif untuk pengembangan infrastruktur tersebut. Selain itu, infrastruktur perhubungan dan transportasi menjadi backbone pergerakan dan perekonomian daerah. Akan tetapi permasalahannya adalah belum optimalnya tata kelembagaan bidang perhubungan, terbatasnya sarana-prasarana jalan dan pengawasan ketertiban lalu lintas, serta belum terintegrasinya moda transportasi umum.

4) Pengembangan pembangunan wilayah utara dan tengah Kabupaten Tangerang

Isu kesenjangan wilayah utara dan tengah menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam merespon kebutuhan masyarakat akan pemerataan dan efisiensi pembangunan. Pengembangan wilayah tidak akan berhasil tanpa dukungan infrastruktur dan fasilitas publik yang memadai. Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas harus terintegrasi dengan rencana tata ruang. Meskipun demikian, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa pembangunan wilayah di bagian utara dan tengah Kabupaten Tangerang dapat tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

c. Mitigasi bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup berkelanjutan

1) Resiliensi terhadap Bencana

Wilayah Kabupaten Tangerang memiliki risiko terhadap bencana, sehingga manajemen risiko bencana yang responsif dan terpadu menjadi kunci dalam adaptasi dan mitigasi bencana. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi adalah: (1) belum optimalnya tata kelola manajemen penanggulangan, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana; (2) terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana; serta (3) belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana.

2) Pengendalian dan Konservasi Lingkungan Hidup

Perlindungan kawasan konservasi dan lindung berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, keseimbangan ekosistem, dan meningkatkan quality of life. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya tata kelola pemerintah dalam perlindungan kawasan konservasi, belum ketatnya regulasi dan fungsi pengawasan terhadap kawasan konservasi, belum optimalnya pendataan/inventarisasi kawasan lindung/ konservasi, serta belum optimalnya pengembangan infrastruktur yang bersinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup.

d. Tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan transformasi pelayanan publik

1) Penyelenggaraan reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi berkaitan dengan integrasi sektor pelayanan publik, pengawasan daerah, dan berbagai sektor mulai dari kependudukan, kearsipan, persandian, komunikasi dan informatika, statistik pemberdayaan masyarakat dan desa, pengelolaan aset daerah hingga manajemen ASN. Penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kabupaten Tangerang saat ini masih belum optimal dan efektif. Permasalahan terkait reformasi birokrasi berkaitan dengan beberapa aspek seperti keterbatasan sumber daya manusia, regulasi daerah, maupun koordinasi antar sektor.

2) Penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik

Kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu bagian dari unsur pemerintahan yang disusun oleh berbagai elemen pendukung. Mulai dari ideologi Pancasila, wawasan dan karakter masyarakat, kehidupan berpolitik, organisasi kemasyarakatan, pencegahan narkoba dan obat-obatan terlarang, serta secara

umum mencakup ketahanan sosial, ekonomi dan budaya.

3) Pencegahan dan penindakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu pondasi penting yang berkorelasi positif dalam mewujudkan stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang. Keamanan merupakan bagian yang terintegrasi dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan gangguan keamanan dan ketertiban adalah : 1) belum optimalnya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, 2) belum optimalnya penindakan gangguan keamanan dan ketertiban, serta 3) belum optimalnya penanganan konflik di masyarakat.

VII. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah, secara ringkas profil Kabupaten Tangerang, dan isu strategis serta arah kebijakan di Kabupaten Tangerang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi uraian singkat Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi pencapaian kinerja Tahun 2025 dan realisasi anggaran, analisis dan evaluasi capaian kinerja (hambatan/daya dukung dan solusi yang akan diambil sebagai upaya perbaikan/peningkatan kinerja untuk mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasi keseluruhan program dan kegiatan di Tahun 2025) atas kegagalan dan keberhasilan masing-masing sasaran, realisasi keuangan, juga pengungkapan prestasi/penghargaan yang diraih.

BAB IV PENUTUP

Meliputi secara ringkas tentang capaian kinerja dan realisasi penggunaan anggaran, mengungkapkan permasalahan, dan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2025.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

I. RENCANA STRATEGIS

Tahun 2025 merupakan masa transisi, dimana terdapat dua dokumen perencanaan yang menjadi acuan yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada dokumen RKPD Kabupaten Tangerang telah dilakukan perubahan secara manual pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 menyesuaikan dengan RPJMD 2025-2029 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2025. Akan tetapi secara aplikasi baik SIPD dan E-Sakip, perubahan dan penyesuaian tidak dapat dilakukan sehingga hal ini berdampak kepada Perjanjian Kinerja yang merupakan output dari aplikasi e-Sakip, Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Tahun 2025 masih menggunakan indikator kinerja yang tercantum dalam RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026. Perjanjian Kinerja inilah yang akhirnya menjadi dasar dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Tangerang Tahun 2025

Perencanaan strategis Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Dalam RPD tersebut telah dituangkan 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Adapun Visi yang tercantum dalam RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

“Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani”

Yang dimaksud dengan :

a. Daya Saing (Competitive Forces);

Kemampuan/kekuatan adaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal untuk meraih keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.

Daya Saing Daerah ; kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan regional, nasional dan global. Daya saing daerah terkait erat dengan Perkembangan Perekonomian Daerah, Keterbukaan, Sistem Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam serta Potensi Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat, Kinerja Pemerintahan dan kebijakan Pemerintah, Manajemen dan Ekonomi Makro.

- b. Masyarakat Madani (Civil Society); adalah masyarakat yang menjadikan agama (hubungan vertikal dengan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan horizontal antar sesama manusia dan makhluk hidup lainnya) sebagai tolok ukur kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Madani menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan/persaudaraan/kekeluargaan (egaliterianisme), penghargaan didasarkan kepada prestasi, keterbukaan (inclusivisme) dan partisipasi, adil dan demokratis, merdeka (independent) dari segala "penguasaan" manusia atas manusia lainnya, juga masyarakat yang bebas (freedom) dari pertentangan sosial yang anarkis dan destruktif.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Visi dan Misi tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan menetapkan sasaran pembangunan.

Tabel 2. 1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73.55	73.82	74.1
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0.69	0.70	0.71
		Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	0.78	0.79	0.8
		Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	52	53	54
		Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	62.67	63.17	63.67
		Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1.3	1.15	1.05
2	Meningkatkan Kondusifitas Daerah dengan Pengembangan Perilaku Masyarakat yang Berlandaskan Keagamaan, Toleransi, dan Gotong Royong		Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	74	76	78
		Mewujudkan Lingkungan yang kondusif, aman dan tertib	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	2.14	2.26	2.38

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.11-5.25	5.20-5.33	5.27-5.41
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7.51	7.36	7.2
			Persentase Penduduk Miskin	Persen	5.94	5.74	5.5
		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	Persen	3,08	3,48	3,88
			Persentase Realisasi Investasi (PMA/ PMDN)	Persen	5.12	5.12	5.12
			Persentase Daya Saing Produk Unggulan Lokal	Persen	22.73	26.52	30.30
			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	3.41	3.57	3.73
		Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.7307	0.7407	0.7507
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77.50	78.00	78.50
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	67.45	67.85	68.65
		Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Berdaya	Persen	1.44	1.69	1.87

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64	65	66
			Nilai SAKIP	Point	76	78	80.5
			Nilai Indeks Kemandirian Fiskal	Indeks	0.520	0.525	0.530
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
			Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	75	81
			Maturitas SPIP Terintegrasi	Point	3	3	3
			Indeks SPBE	Indeks	3.17	3.19	3.21
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.2	4.3	4.4
5	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkelanjutan	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	76,61	78	80
			Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik	Persen	94,5	95	95,5
			Persentase Realisasi Pola	Persen	37	55	55

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7
			Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW				
			Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak	Point	0.9439	0.9442	0.9442
			Rasio Konektivitas Kabupaten	Point	0.79	0.81	0.83
		Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh Terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	56.25	56.89	56.89
			Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Indeks	120	115	115

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang periode 2024-2026

II. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dalam RPD 2024-2025, sejumlah target kinerja telah ditetapkan sebagai bagian dari rencana strategis pembangunan daerah. Namun, berdasarkan hasil realisasi tahun 2024, ditemukan bahwa beberapa indikator kinerja yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2025 telah terlampaui lebih awal sehingga dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja tahun 2025. Hal ini menunjukkan efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta adanya percepatan pencapaian sasaran strategis.

Akibat dari pencapaian ini, target yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja 2025 mengalami penyesuaian agar tetap relevan dan mencerminkan tantangan yang lebih tinggi dalam pengelolaan kinerja instansi.

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1. Indeks Pendidikan	Indeks	0.7
2	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	2. Indeks Kesehatan	Indeks	0.86
3	Meningkatkan Daya Saing Pemuda	3. Indeks pembangunan Pemuda	Indeks	53
4	Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	4. Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	64
5	Meningkatkan Pengendalian Penduduk	5. Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1.15

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
6	Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif, Aman, dan Tertib	6. Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	1
7	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	7. Laju Pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Persen	3.48
		8. Persentase Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Persen	5.12
		9. Persentase Daya saing produk unggulan lokal	Persen	26.52
		10. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	3.57
8	Meningkatkan Kemandirian Desa	11. Indeks desa membangun	Indeks	0.7853
9	Meningkatnya Ketahanan Pangan	12. Indeks ketahanan pangan	Indeks	78.00
10	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	13. Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	67.85
11	Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	14. Persentase PPKS yang berdaya	Persen	1.69
12	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	15. Nilai Sakip	Point	78
		16. Nilai indeks kemandirian fiskal	Indeks	0.525
		17. Opini BPK	Opini	WTP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
		18. Indeks profesionalitas ASN	Indeks	75
		19. Maturitas SPIP terintegrasi	Point	3
		20. Indeks SPBE	Indeks	3.19
		21. Indeks Pelayanan publik	Indeks	4.3
13	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	22. Presentase infrastruktur dalam kondisi baik	Persen	95
		23. Presentase Realisasi pola pemanfaatan ruang sesuai RTRW	Persen	55
		24. Rasio luas kawasan permukiman, perumahan dan pemakaman yang layak	Rasio	0.9442
		25. Rasio konektivitas kabupaten	Rasio	0.83
14	Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh Terhadap Bencana	26. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	56.89
		27. Indeks resiko bencana (IRBI)	Indeks	115

Tabel 2. 3
Program Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	9.408.515.776,00
2	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	135.128.174.640,00
3	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN / KOTA	84.960.378.138,00
4	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	43.831.968.850,00
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3.005.920.400,00
6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	42.312.200.692,50
7	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.263.265.900,00
8	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.735.441.650,00
9	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.319.346.070,00
10	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	14.910.481.040,00
11	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.134.289.460,00
12	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	865.999.100,00
13	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	29.078.630,00
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	796.912.700,00
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	16.233.167.200,00
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.767.747.840,00
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	32.508.122.990,00
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.722.413.117,00
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	87.421.324.748,70
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	5.337.130.850,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	5.835.965.390,00
22	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.653.947.290,00
23	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	306.969.000,00
24	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	908.372.000,00
25	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10.781.128.091,00
26	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.712.591.910,00
27	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	911.567.200,00
28	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	634.058.703.362,00
29	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	128.135.088.733,00
30	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.278.314.000,00
31	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.104.600.940,00
32	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	274.043.500,00
33	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	8.831.400,00
34	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.172.723.550,00
35	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	29.472.598.000,00
36	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	377.350.576.234,00
37	PROGRAM PENATAAN DESA	1.888.039.840,00
38	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	123.760.446.490,00
39	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	174.500.000,00
40	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	8.360.880.000,00
41	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	8.604.136.550,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
42	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	594.802.730,00
43	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	242.836.920,00
44	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.897.284.100,00
45	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3.738.517.120,00
46	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.809.877.260,00
47	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	130.451.700,00
48	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	134.489.500,00
49	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	43.639.498.780,00
50	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	995.310.600,00
51	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	14.802.671.725,00
52	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	19.480.157.541,50
53	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	62.701.981.639,80
54	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	122.193.399.230,00
55	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	484.387.700,00
56	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	813.280.360,00
57	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	8.596.770.400,00
58	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	20.595.268.361,00
59	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.022.970.481.207,00
60	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11.373.959.350,00
61	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	921.170.951.605,00
62	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	10.523.629.846,00
63	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	7.763.550.030,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
64	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	127.720.430.829,00
65	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	69.180.000,00
66	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	40.339.800,00
67	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	950.496.200,00
68	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	137.993.446.653,00
69	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.529.167.800,00
70	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	401.622.790,00
71	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	606.202.467,00
72	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	792.034.100,00
73	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	30.337.124.620,00
74	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	6.620.650.800,00
75	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.899.556.560,00
76	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	385.548.000,00
77	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.051.672.000,00
78	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.341.032.000,00
79	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.143.688.600,00
80	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	10.704.648.836,00
81	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	95.227.740,00
82	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	115.190.600,00
83	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.363.639.310,00
84	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	302.000.680,00
85	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.488.295.748,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
86	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.411.577.362,00
87	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	245.242.150,00
88	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	289.224.400,00
89	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	769.020.000,00
90	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.059.888.912,00
91	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	7.189.805.420,00
92	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI	139.964.800,00
93	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	348.070.500,00
94	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	6.755.156.590,00
95	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	12.658.278.500,00
96	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	652.803.210,00
97	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.487.452.900,00
98	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.191.841.020,00
99	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	612.065.120,00
100	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	7.107.404.800,00
101	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	124.637.528.460,00
102	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	39.552.000,00
103	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	3.864.630.985.423,58
104	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.309.376.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
105	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	17.718.415.380,00
106	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	350.416.345.484,88
107	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	78.651.921.103,00
108	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	419.355.669.461,04
109	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.786.585.380,00
110	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.837.508.400,00
111	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	8.143.592.173,00
112	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.117.626.800,00
113	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.327.614.680,00
114	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.975.989.980,00
115	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.066.493.600,00
116	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	940.960.950,00
117	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.356.633.600,00
118	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	56.762.400,00
119	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.879.983.019,00
120	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	52.947.463.920,00
121	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	429.180.480,00
122	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	847.072.700,00
123	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.002.586.430,00
124	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.322.596.200,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
125	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	341.600.580,00
126	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.554.299.984,00
127	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	912.850.200,00
128	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.127.827.400,00
129	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	904.955.280,00
TOTAL ANGGARAN		9.495.608.430.263,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merujuk pada transparansi pencapaian keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang selama satu periode kepada masyarakat. Pengukuran capaian kinerja memiliki manfaat yang penting, yaitu memberikan informasi kepada pihak internal dan eksternal pemerintah tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud. Untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang menggunakan capaian dari target kinerja sebagai tolak ukur realisasi program mereka dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Tangerang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

I. CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi

keberhasilan suatu organisasi. Untuk mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja, dilakukan perbandingan antara realisasi capaian dengan target IKU Sasaran Strategis. Dengan cara ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat mengevaluasi kinerja mereka dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam periode yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Capaian Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,82	76,74	103,96
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,70	0,66	94,77
		Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,86	0,856	99,52
		Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	53	57,50*	108,49
		Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	64	69,37*	108,39
		Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,15	1,20	95,83
2	Meningkatkan Kondusifitas Daerah dengan		Indeks Kesalehan Sosial	76	82,73	108,86

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
	Pengembangan Perilaku Masyarakat yang Berlandaskan Keagamaan, Toleransi, dan Gotong Royong	Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif, Aman, dan Tertib	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	1	1	100
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,20-5,33	5,67	106,38
			Tingkat Pengangguran Terbuka	7,36	5,94	123,91
			Persentase Penduduk Miskin	5,74	6,42	89,4
		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	3,48	11,61	333,62
			Persentase Realisasi Investasi (PMA/ PMDN)	5,12	43,2	843,74
			Persentase Daya Saing Produk Unggulan Lokal	26,52	26,52	100
			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	3,57	4,83	135,29

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
		Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,7853	0,7853	100
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	78	79,39	101,78
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,85	66,26	97,66
		Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Berdaya	1,69%	1,69%	100%
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	65	84,56	130,09
			Nilai SAKIP	78	77,87	99,83
			Nilai Indeks Kemandirian Fiskal	0,525	0,605	115,24
			Opini BPK	WTP	WTP*	100
			Indeks Profesionalitas ASN	75	83,65	111,53
			Maturitas SPIP Terintegrasi	3	2,6	86,67
			Indeks SPBE	3,19	3,91*	122,57
			Indeks Pelayanan Publik	4,3	4,22	98,14
5	Meningkatkan Pengembangan		Indeks Kepuasan	78	72,41	92,83

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
	Infrastruktur yang Terpadu dan Berkelanjutan		Layanan Infrastruktur			
		Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik	95	97*	102,11
			Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	55%	57,72%	104,95
			Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak	0,9442	0,9473	100,33
			Rasio Konektivitas Kabupaten	0,83	0,6	72,29
		Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh Terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,89	60,18	105,78
			Indeks Resiko Bencana (IRBI)	115	125,22	91,84

Indikator Kinerja Utama terdiri dari indikator tujuan dan indikator sasaran RPD 2024-2026. Terdapat realisasi IKU Tahun 2025 yang telah atau belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD, adapun penjelasan dari realisasi indikator tujuan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kabupaten Tangerang Tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan, adapun capaiannya adalah 103,96%. IPM senantiasa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya indeks komposit pembentuk IPM yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat. Adapun rencana aksi dalam upaya meningkatkan IPM antara lain :

- Meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan melalui penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung
- Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan
- Meningkatkan daya beli masyarakat dengan pengendalian inflasi terhadap bahan pokok
- Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing
- Menjaga kondisi perekonomian yang kondusif

2. Indeks Kesalehan Sosial

Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan, adapun capaiannya adalah 108,86%. Indeks Kesalehan Sosial mencakup beberapa dimensi yaitu Solidaritas/Kepedulian Sosial, relasi antar manusia, etika dan budi pekerti, melestarikan lingkungan dan patuh pada peraturan negara. Rencana Aksi dalam upaya meningkatkan IPM antara lain :

- Meningkatkan solidaritas sosial dengan cara revitalisasi forum masyarakat agar lebih interaktif, inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
- Pemberdayaan komunitas berbasis agama
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup
- Mengintegrasikan nilai-nilai kesalehan sosial dalam kurikulum pendidikan formal dan non formal
- Edukasi tentang peraturan tingkat pusat dan daerah

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

LPE Kabupaten Tangerang Tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan, adapun capaiannya adalah 106,38%. Kenaikan LPE dari 5% pada tahun 2024 menjadi 5,67% pada tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh tumbuhnya sektor industri pengolahan yang memiliki proporsi 33,69% dari total PDRB mengalami pertumbuhan

positif sebesar 5,37% diikuti pula oleh tumbuhnya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan sektor-sektor dominan lainnya.

Rencana Aksi dalam upaya meningkatkan LPE antara lain :

- Menciptakan iklim investasi yang kondusif khususnya pada sektor yang dominan
- Hilirisasi industri berfokus pada industri yang berorientasi ekspor dan padat karya
- Pengembangan SDM yang terampil
- Mendukung Pelaku Usaha Mikro dalam hal akses permodalan dan digitalisasi

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT Kabupaten Tangerang Tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan, adapun capaiannya adalah 123,91%. Pada tahun 2025 TPT menurun menjadi 5,94% dari 6,06% pada tahun 2024, atau menurun sebanyak 102.715 orang.

Rencana aksi dalam upaya meningkatkan TPT antara lain :

- Optimalisasi BLK untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan vokasi
- Menumbuhkan wirausaha baru yang kompeten
- Menyelenggarakan Informasi pasar kerja
- Mendukung pelaku usaha mikro dalam hal pendampingan, permodalan dan akses pasar
- Mendorong investasi dan hubungan industrial yang kondusif

5. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan, adapun capaiannya adalah 89,4% akan tetapi persentase penduduk miskin di Kabupaten Tangerang senantiasa mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Selain itu jumlah penduduk miskin pun menurun dari 266.430 orang pada tahun 2024 menjadi 265.900 orang pada tahun 2025. Rencana aksi dalam upaya menurunkan persentase penduduk miskin antara lain:

- Pengurangan beban pengeluaran dengan memberikan bantuan sosial, jaminan kesehatan dan beasiswa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- Peningkatan pendapatan dengan pemberdayaan usaha mikro, pelatihan dan akses permodalan
- Pengurangan kantong kemiskinan dengan memperbaiki infrastruktur dasar seperti sanitasi, air bersih serta perumahan layak huni.

6. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang belum dirilis oleh Kemenpan RB, sehingga untuk realisasi tahun 2025 masih menggunakan data tahun 2024 yaitu sebesar 84,56 atau telah mencapai 130,09%. Rencana aksi dalam upaya meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi antara lain :

- Meningkatkan digitalisasi pelayanan kepada masyarakat
- Penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana
- Penataan sistem manajemen ASN
- Memperkuat pengawasan dan pengendalian internal
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Fokus pada isu pembangunan dan berdampak

7. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Tangerang Tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan, adapun capaiannya adalah 92,83%. Infrastruktur secara umum dibagi dalam tiga kelompok yaitu infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial, serta infrastruktur lingkungan dan permukiman. Berdasarkan realisasi nilai indeks kepuasan infrastruktur tahun 2025, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa puas terhadap layanan infrastruktur akan tetapi belum mencapai tingkat sangat puas. Rencana aksi dalam upaya meningkatkan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur anatara lain :

- Pemerataan layanan dasar kesehatan dan transformasi digital layanan kesehatan
- Pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan
- Menambah ruang kelas baru dan unit sekolah barau khususnya jenjang SMP
- Meningkatkan layanan air bersih
- Meningkatkan pengelolaan limbah komunal
- Memperbaiki sistem tata kelola persampahan
- Meningkatkan penerangan jalan umum dan jalan dalam kondisi mantap

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,66	0,71	93,44
2	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,856	0,8	106,98
3	Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Indeks pembangunan Pemuda	57,50*	54	106,48
4	Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	69,37*	64	108,39
5	Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,20	1,05	87,50
6	Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif, Aman, dan Tertib	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	1	2,38	238,00
7	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	11,61	3,88	299,23
		Persentase Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	43,2	5,12	843,74
		Persentase Daya saing produk unggulan lokal	26,52	30,3	87,52
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	4,83	3,73	129,49
8	Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks desa membangun	0,7853	0,7507	104,61
9	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketahanan pangan	79,39	78,5	101,13
10	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	66,26	68,65	96,52

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
11	Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang berdaya	1,69%	1,87%	90,37
12	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai Sakip	77,87	80,5	96,73
		Nilai indeks kemandirian fiskal	0,605	0,53	114,15
		Opini BPK	WTP*	WTP	100
		Indeks profesionalitas ASN	83,65	81	103,27
		Maturitas SPIP terintegrasi	2,60	3,37	86,67
		Indeks SPBE	3,91*	3,21	121,81
		Indeks Pelayanan publik	4,22	4,4	95,91
13	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Presentase infrastruktur dalam kondisi baik	97*	95,5	101,57
		Presentase Realisasi pola pemanfaatan ruang sesuai RTRW	57,72%	55%	104,95
		Rasio luas kawasan permukiman, perumahan dan pemakaman yang layak	0,9473	0,9442	100,33
		Rasio konektivitas kabupaten	0,6	0,83	72,29
14	Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh Terhadap Bencana	Indeks kualitas lingkungan hidup	60,18	56,89	105,78
		Indeks resiko bencana (IRBI)	125,22	115	91,84

II. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara umum Kabupaten Tangerang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 sebanyak 14 Sasaran Strategis.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Kabupaten Tangerang, dari sebanyak 14 Sasaran Strategis dengan 27 indikator kinerja yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran Kabupaten Tangerang sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.2 diatas.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan target akhir RPD.
3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
4. Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2025 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada 14 Sasaran Strategis dengan 27 indikator akan dilakukan analisis kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui rencana aksi kedepan sebagai upaya nyata pelaksanaan peningkatan dan perbaikan.

Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

SASARAN 01

Meningkatkan
Kualitas Pendidikan

TINGKAT EFISIENSI SASARAN STRATEGIS 01

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan kualitas pendidikan didukung oleh program :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
5. Program Pembinaan Perpustakaan

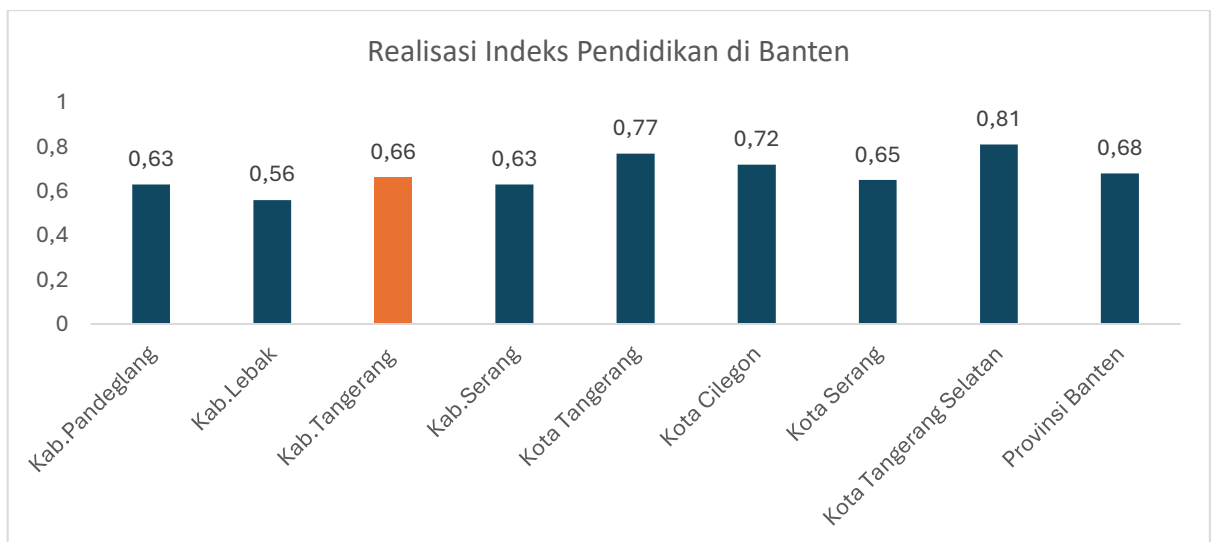
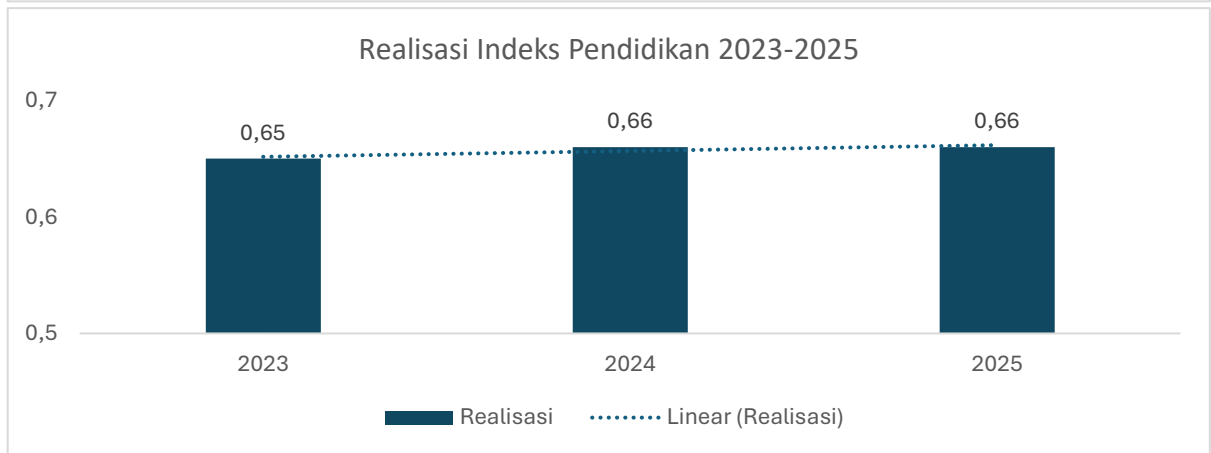
Rata-rata capaian realisasi anggaran per program pada Sasaran Strategis 1 tercatat sebesar 88,59% dari total pagu anggaran program yang telah ditetapkan. Secara agregat, realisasi anggaran pada sasaran strategis tersebut mencapai Rp894.391.504.211 dari total pagu anggaran sebesar Rp924.109.136.395 atau sebesar 96,78%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran pada Sasaran Strategis 1 berada pada kategori sangat tinggi.

Di sisi lain, rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis tersebut mencapai 95% dari target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan antara tingkat realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang dihasilkan, terlihat bahwa persentase penyerapan anggaran lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Sasaran Strategis 1 belum sepenuhnya menunjukkan tingkat efisiensi yang optimal, karena penggunaan anggaran yang relatif tinggi belum sepenuhnya diikuti oleh capaian kinerja yang proporsional. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, termasuk peningkatan kualitas perencanaan kinerja, penajaman indikator kinerja, serta penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar pemanfaatan anggaran dapat lebih efisien dan memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

INDEKS PENDIDIKAN

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
0,70	0,66	95%	0,71



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Indeks Pendidikan merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kualitas pendidikan di suatu daerah. Indeks ini dihitung berdasarkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang mencerminkan akses serta tingkat partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan.

Data Capaian RLS dan HLS Kabupaten Tangerang (<i>Sumber: www.bps.go.id</i>)	
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	9,16 Tahun
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,89 Tahun

Perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$I_{pend} = \frac{IHLS + IRLS}{2}$$

Langkah perhitungan :

1. Menghitung Indeks Harapan Lama Sekolah (IHLS)

$$IHLS = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

$$IHLS = \frac{12,89 - 0}{18 - 0} = \frac{12,89}{18} = 0,716$$

2. Menghitung Indeks Rata-Rata Lama Sekolah (IRLS)

$$IRLS = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

$$IRLS = \frac{9,16 - 0}{15 - 0} = \frac{9,16}{15} = 0,611$$

3. Menghitung Indeks Pendidikan

$$IPend = \frac{IHLS + IRLS}{2}$$

$$IPend = \frac{0,716 + 0,611}{2} = \frac{1,327}{2} = 0,663$$

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Tangerang menunjukkan tren peningkatan indeks pendidikan, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 indeks pendidikan tercatat 0,65 dan 2024 sebesar 0,66, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 0,663. Meskipun mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi tersebut masih belum memenuhi target 2025 sebesar 0,70.

Berdasarkan realisasi Indeks Pendidikan di Provinsi Banten, terlihat adanya kesenjangan antara kabupaten dan kota. Secara umum, kabupaten memiliki indeks pendidikan yang lebih rendah dibandingkan kota.

Dari empat kabupaten di Banten, Kabupaten Tangerang memiliki capaian tertinggi dengan indeks 0,66, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang yang sama-sama berada di angka 0,63, serta Kabupaten Lebak yang memiliki indeks pendidikan terendah sebesar 0,56.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kota-kota di Banten, indeks pendidikan kabupaten tertinggal cukup jauh. Kota Tangerang Selatan mencatat capaian tertinggi sebesar 0,81, disusul oleh Kota Tangerang 0,77 dan Kota Cilegon 0,72. Bahkan Kota Serang yang memiliki indeks 0,65, masih lebih tinggi dari tiga kabupaten di Banten.

Faktor penyebab ketidakcapaian target

Ketidakcapaian target Indeks Pendidikan Tahun 2025 yang terealisasi sebesar 0,66 dari target 0,70 (95%) dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti masih adanya anak yang tidak melanjutkan pendidikan atau mengalami putus sekolah, serta keterbatasan kondisi ekonomi keluarga yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan. Selain itu, perbedaan akses dan partisipasi pendidikan antar wilayah juga turut mempengaruhi capaian indikator ini, terutama pada jenjang pendidikan menengah yang cenderung mengalami penurunan partisipasi. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah pada sebagian kelompok masyarakat, sehingga peningkatan nilai Indeks Pendidikan berjalan secara bertahap dan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025.

Meskipun Indeks Pendidikan Tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melaksanakan berbagai program strategis untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Upaya tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Sekolah Gratis SD dan SMP

Pemerintah Kabupaten Tangerang mulai menerapkan program sekolah gratis secara bertahap pada tahun 2025 untuk jenjang SD dan SMP, baik pada sekolah negeri maupun swasta. Program ini didukung oleh anggaran daerah sekitar Rp40 miliar dan

bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan masyarakat serta meningkatkan partisipasi sekolah.

2. Kerja Sama dengan Sekolah Swasta untuk Memperluas Akses Pendidikan

Pemkab Tangerang menjalin kerja sama dengan 179 sekolah swasta (51 SD dan 128 SMP) untuk menyelenggarakan pendidikan gratis. Program ini memberikan bantuan pembiayaan pendidikan seperti SPP, uang pangkal, dan biaya pendaftaran sehingga lebih banyak anak dapat mengakses pendidikan formal.

3. Program Gerakan Lanjut Sekolah untuk Menekan Angka Putus Sekolah

Pemerintah daerah juga meluncurkan Gerakan Lanjut Sekolah yang mendorong masyarakat, termasuk mereka yang telah putus sekolah, untuk kembali melanjutkan pendidikan melalui jalur formal maupun nonformal. Program ini menjadi bagian dari upaya mengatasi permasalahan anak putus sekolah dan meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat.

4. Pemberian Program Beasiswa Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Tangerang juga mengalokasikan program Beasiswa Tangerang Gemilang, dengan anggaran sekitar Rp24,39 miliar untuk 235 mahasiswa, sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
2. Terpenuhinya pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kompetensi minimal;
3. Sebaran pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;
4. Pemenuhan layanan satuan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas;
5. Tersedianya unit layanan disabilitas Kabupaten Tangerang;
6. Pemberian beasiswa pada masyarakat berpenghasilan rendah pada jenjang SD, SMP dan Kesetaraan melalui program PAKADES (program pendidikan kesetaraan di desa);
7. Memperluas akses layanan pendidikan dengan pelaksanaan program sekolah gratis swasta;
8. Meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di Satuan Pendidikan Negeri.

SASARAN 02

Meningkatkan
Kualitas Kesehatan

TINGKAT EFISIENSI SASARAN STRATEGIS 02

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan kualitas kesehatan didukung oleh program :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

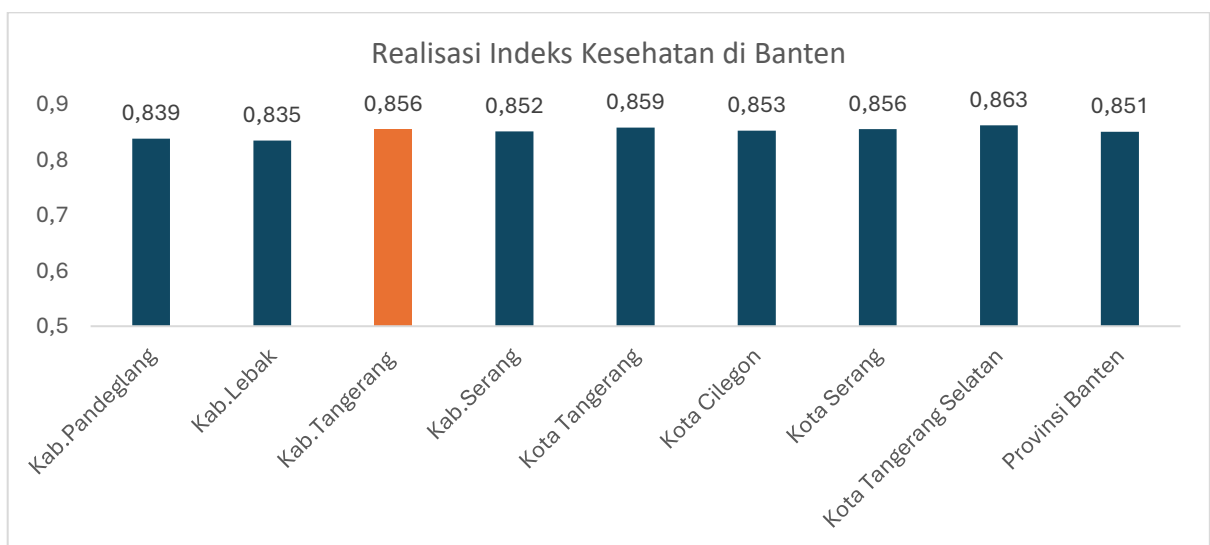
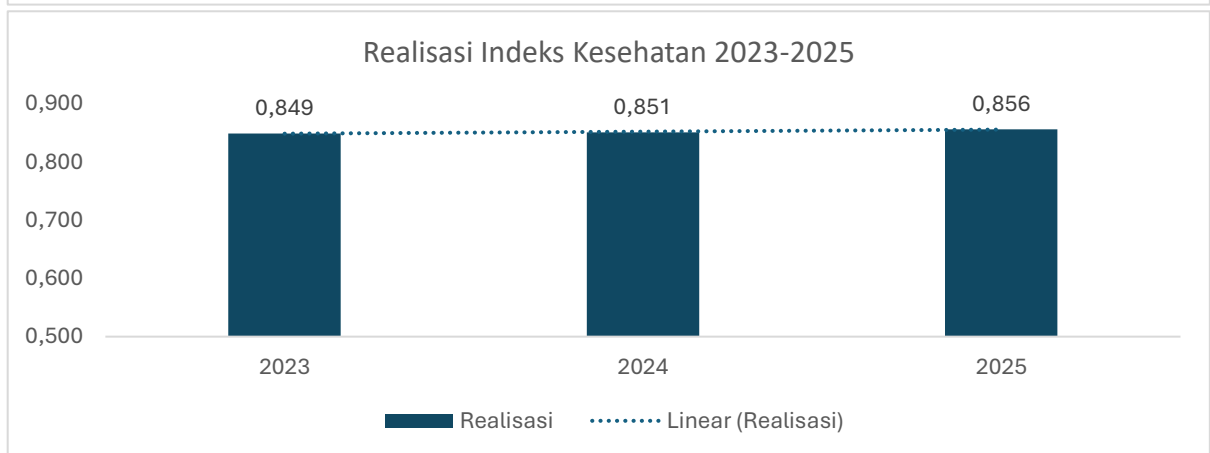
Rata-rata capaian realisasi anggaran per program pada Sasaran Strategis 2 tercatat sebesar 98,51% dari total pagu anggaran program yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program yang mendukung Sasaran Strategis 2 telah dilaksanakan dengan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi.

Secara agregat, realisasi anggaran pada sasaran strategis tersebut mencapai Rp648.176.862.502 dari total pagu anggaran sebesar Rp657.352.245.179 atau setara dengan 98,60%. Tingginya tingkat realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 2 telah berjalan secara optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sementara itu, capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2 tercatat sebesar 99,52% dari target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 98,60%, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Sasaran Strategis 2 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, karena dengan tingkat penyerapan anggaran yang relatif lebih rendah mampu menghasilkan capaian kinerja yang sangat tinggi. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan pada Sasaran Strategis 2 menunjukkan kinerja yang sangat baik baik dari sisi pencapaian target kinerja maupun efisiensi pemanfaatan anggaran.

INDEKS KESEHATAN

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
0,860	0,856	99,52%	0,800



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

Indeks kesehatan adalah salah satu komponen dasar dalam mengukur kualitas hidup berdasarkan dimensi kesehatan dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir.

Data Capaian UHH Kabupaten Tangerang (Sumber: banten.bps.go.id)	
Umur Harapan Hidup (UHH)	75,63 Tahun

Perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Ikes = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{max} - UHH_{min}}$$

Langkah perhitungan :

$$UHH_{min} = 20$$

$$UHH_{max} = 85$$

$$UHH \text{ Kabupaten Tangerang tahun 2025} = 75,63$$

$$Ikes = \frac{75,63 - 20}{85 - 20}$$

$$Ikes = \frac{55,63}{65} = 0,856$$

Indeks Kesehatan Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025 tercatat sebesar 0,856 dari target 0,860, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,52%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan sektor kesehatan secara umum sudah berjalan dengan baik dan mendekati target yang telah ditetapkan. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, selisih capaian yang relatif kecil menggambarkan bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan serta perbaikan derajat kesehatan masyarakat telah memberikan hasil yang positif. Selain itu, jika dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 0,800, capaian tahun 2025 sudah berada di atas target tersebut, yang menunjukkan bahwa kinerja sektor kesehatan berada pada tren yang baik dan melampaui target jangka menengah daerah. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang tercermin dari indikator seperti meningkatnya angka harapan hidup, perbaikan status kesehatan ibu dan anak, serta semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar.

Faktor penyebab ketidakcapaian target

Ketidakcapaian target Indeks Kesehatan Tahun 2025 yang terealisasi sebesar 0,856 dari target 0,860 (99,52%) dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang. Salah satunya adalah masih adanya kasus stunting dan permasalahan gizi pada balita, yang menjadi tantangan dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, tingginya jumlah penduduk serta kepadatan wilayah di Kabupaten Tangerang turut mempengaruhi pemerataan kualitas layanan kesehatan dan perilaku hidup sehat masyarakat. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah belum meratanya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat, sehingga peningkatan indikator kesehatan seperti angka harapan hidup dan status kesehatan masyarakat berlangsung secara bertahap dan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, selisih capaian yang relatif kecil menunjukkan bahwa kinerja pembangunan sektor kesehatan secara umum sudah berada pada jalur yang positif.

Beberapa Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan Indeks Kesehatan, diantaranya :

1. Penguatan penanganan stunting dan masalah gizi

Pemerintah Kabupaten Tangerang menjadikan penurunan stunting sebagai prioritas kesehatan dengan berbagai intervensi gizi, termasuk pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil serta pemantauan kesehatan secara berkala.

2. Gerakan kesehatan ibu dan anak

Dilaksanakan program Gerakan Ibu Hamil Sehat dan penguatan pemantauan kesehatan pada masa 1.000 hari pertama kehidupan, yang dianggap sangat menentukan kualitas kesehatan generasi mendatang.

3. Optimalisasi layanan Posyandu dan Puskesmas

Posyandu difungsikan tidak hanya untuk pemeriksaan kesehatan balita, tetapi juga sebagai pusat edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi kelompok rentan.

4. Gerakan Gerebek Posyandu

Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan balita secara serentak melalui program Gerebek Posyandu untuk melakukan deteksi dini masalah gizi dan pertumbuhan anak.

5. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam kesehatan Masyarakat

Pemerintah daerah juga melakukan koordinasi lintas perangkat daerah dan tenaga kesehatan untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat serta meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam menangani masalah gizi dan kesehatan masyarakat.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Penguatan upaya promotif dan preventif kesehatan Masyarakat

Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat (PHBS), pencegahan penyakit, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.

2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar

Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui optimalisasi layanan puskesmas, posyandu, serta fasilitas kesehatan lainnya agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas.

3. Percepatan penanganan stunting dan peningkatan gizi Masyarakat

Memperkuat intervensi gizi pada ibu hamil, balita, dan kelompok rentan melalui pemantauan pertumbuhan, pemberian makanan tambahan, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak.

4. Peningkatan akses dan pemerataan layanan Kesehatan

Mendorong pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah serta meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan

SASARAN 03

Meningkatkan Daya
Saing Pemuda

TINGKAT EFISIENSI SASARAN STRATEGIS 03

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan daya saing pemuda didukung oleh program :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Rata-rata capaian realisasi anggaran program pada Sasaran Strategis tersebut tercatat sebesar 98,29% dari total pagu anggaran program yang telah ditetapkan. Secara agregat, realisasi anggaran pada sasaran strategis mencapai Rp36.433.684.140 dari total pagu anggaran sebesar Rp36.957.775.420 atau setara dengan 98,58%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran pada sasaran strategis tersebut berada pada kategori sangat tinggi.

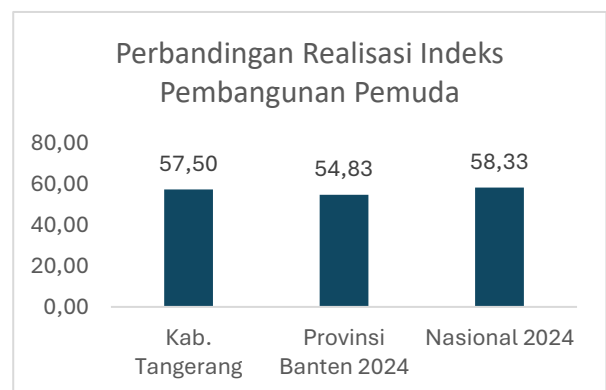
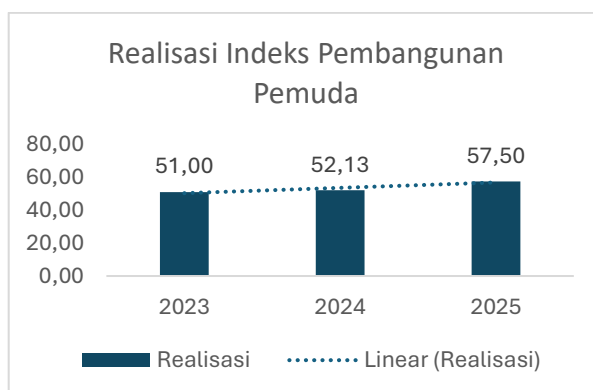
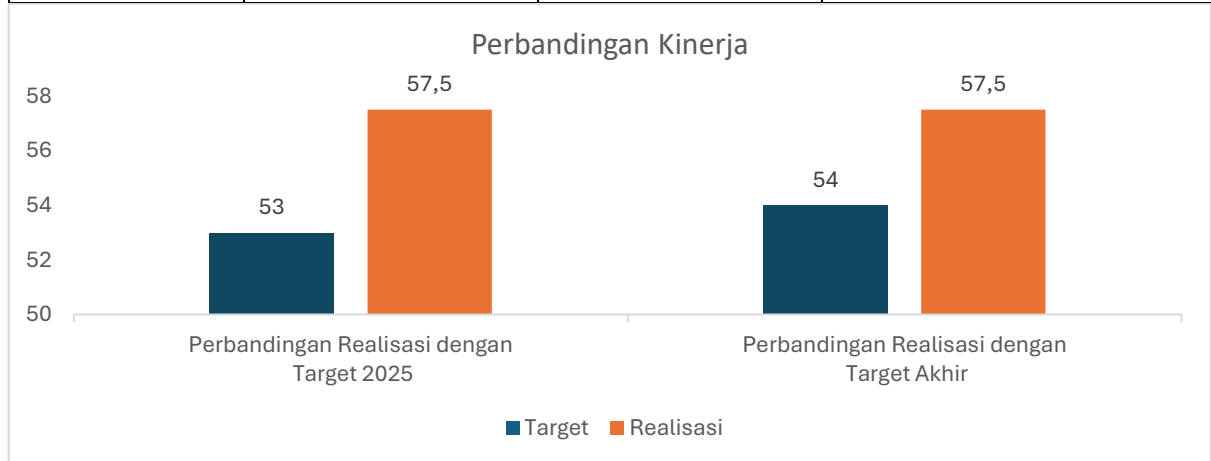
Sementara itu, rata-rata capaian kinerja indikator sasaran strategis tercatat sebesar 108,49%, yang menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan tidak hanya tercapai tetapi juga melampaui target yang direncanakan. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja dengan tingkat realisasi anggaran, terlihat bahwa capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran.

Berdasarkan perbandingan tersebut, diperoleh **tingkat efisiensi sebesar 9,91%**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran strategis tersebut telah berjalan secara efektif dan efisien. Dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 98,58%, program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target hingga 108,49%, sehingga pemanfaatan anggaran dapat dinilai memberikan hasil kinerja yang optimal.

INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA

*menggunakan realisasi 2024

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
53	57,5*	108,49%	54



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Tangerang mencapai angka 57,50, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 53, dengan capaian kinerja 108,49%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang berada diatas IPP Provinsi Banten yang berada di angka 54,83 namun masih berada dibawah nasional yang berada diangka 58,33. Secara keseluruhan, capaian Indeks Pembangunan Pemuda menunjukkan kinerja yang sangat baik karena telah melampaui target tahunan maupun target akhir RPJPD, serta menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun.

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan berbagai inisiatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan pemuda, termasuk pengembangan Sekolah Terpadu Ramah Anak (SETARA), peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta program beasiswa pendidikan bagi pemuda kurang mampu. Selain itu, pelatihan vokasional dan peningkatan keterampilan berbasis teknologi digital telah diperluas untuk meningkatkan kesiapan pemuda dalam menghadapi tantangan dunia kerja.

2. Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Kepemudaan

Pembangunan dan revitalisasi pusat kegiatan kepemudaan dan fasilitas olahraga terus dilakukan untuk mendorong keterlibatan pemuda dalam aktivitas positif. Stadion, gelanggang olahraga, serta ruang kreatif bagi komunitas pemuda telah diperbaiki dan diperluas agar dapat menjadi wadah pengembangan bakat dan potensi generasi muda.

3. Pemberdayaan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda

Untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pemuda, Kabupaten Tangerang telah melaksanakan berbagai program pelatihan kewirausahaan, akses permodalan usaha mikro, serta pendampingan startup kepemudaan. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi digital bagi wirausaha muda agar dapat bersaing dalam ekonomi berbasis inovasi.

4. Penguatan Kepemimpinan dan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

Melalui program Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan Penguatan Organisasi Kepemudaan, Kabupaten Tangerang terus membangun kapasitas pemuda sebagai agen perubahan. Berbagai kegiatan seperti forum kepemimpinan, seminar kebangsaan, dan pelatihan advokasi sosial telah digelar untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah.

5. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Masyarakat

Sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas pemuda menjadi kunci dalam peningkatan IPP. Program kemitraan dengan perusahaan untuk mendukung magang dan peningkatan keterampilan kerja, serta kerja sama dengan organisasi kepemudaan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial dan inovasi, turut berkontribusi pada pencapaian target IPP 2025.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Pengurangan angka pengangguran pemuda melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas keterampilan tenaga kerja muda.
2. Peningkatan keterlibatan pemuda dalam sektor ekonomi kreatif sehingga potensi dan kreativitas pemuda dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.
3. Perluasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi guna meningkatkan kompetensi pemuda agar mampu bersaing di era digital.

SASARAN 04

**Meningkatkan Partisipasi
Perempuan dalam Pembangunan**

TINGKAT EFISIENSI SASARAN STRATEGIS 04

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan didukung oleh program :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
6. Program Perlindungan Khusus Anak

Rata-rata capaian realisasi anggaran program pada Sasaran Strategis 4 tercatat sebesar 98,61% dari total pagu anggaran program yang telah ditetapkan. Secara agregat, realisasi anggaran pada sasaran strategis mencapai Rp5.138.408.736 dari total pagu anggaran sebesar Rp5.223.508.510 atau setara dengan 98,37%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran strategis tersebut telah berjalan dengan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi.

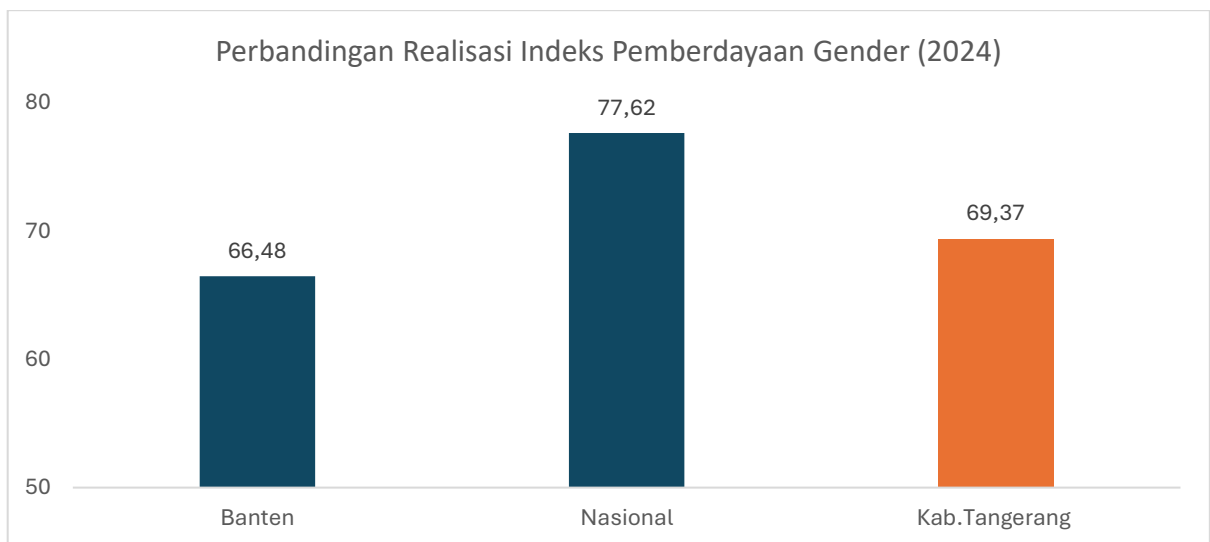
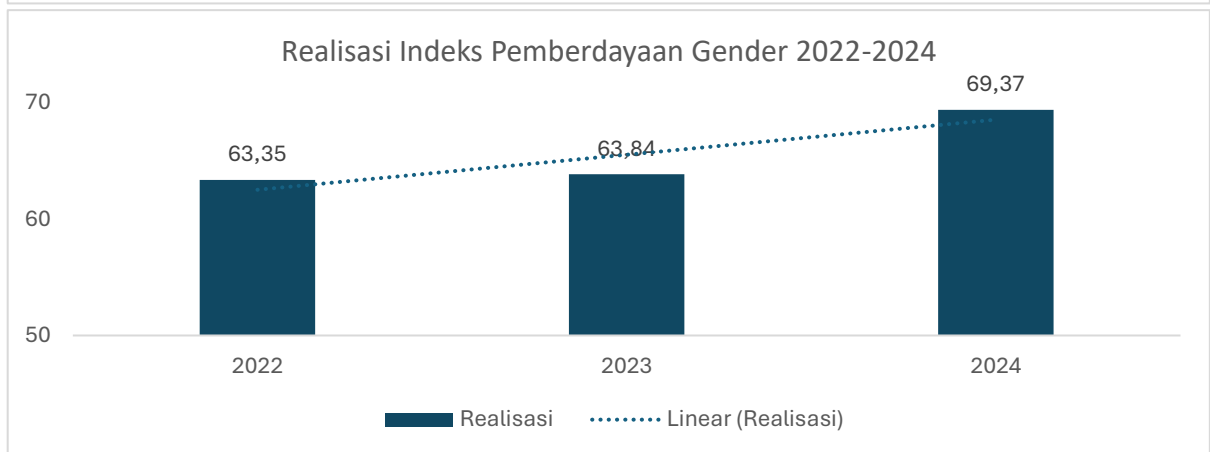
Sementara itu, rata-rata capaian kinerja indikator sasaran strategis tercatat sebesar 108,40%, yang menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan tidak hanya tercapai tetapi juga melampaui target yang direncanakan. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja dengan tingkat realisasi anggaran, terlihat bahwa persentase capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran.

Berdasarkan perbandingan tersebut, diperoleh **tingkat efisiensi sebesar 10,03%**, yang dihitung dari selisih antara capaian kinerja sebesar 108,40% dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 98,37%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran strategis 4 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, karena dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 98,37% mampu menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target hingga 108,40%. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran pada sasaran strategis tersebut dapat dinilai memberikan hasil kinerja yang optimal.

INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

*menggunakan realisasi 2024

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
64	69,37*	108,4%	64



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tangerang Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Dengan target yang ditetapkan sebesar 64, realisasi yang digunakan berdasarkan data tahun 2024 tercatat sebesar 69,37 sehingga capaian kinerja mencapai 108,4%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan telah melampaui target yang direncanakan, sekaligus telah memenuhi target akhir RPD Tahun 2026 yang juga sebesar 64. Capaian ini mencerminkan kondisi yang positif dalam aspek pemberdayaan gender, khususnya dalam hal keterlibatan perempuan pada sektor ekonomi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta kontribusi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.

Jika dilihat dari tren perkembangan selama tiga tahun terakhir, Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan peningkatan yang konsisten, yaitu dari 63,35 pada tahun 2022 menjadi 63,84 pada tahun 2023, dan meningkat signifikan menjadi 69,37 pada tahun 2024. Tren kenaikan ini mengindikasikan adanya kemajuan yang berkelanjutan dalam mendorong kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Tangerang. Peningkatan yang cukup signifikan pada tahun terakhir juga menunjukkan bahwa berbagai program dan kebijakan yang mendukung pengarusutamaan gender mulai memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas partisipasi perempuan.

Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Banten sebesar 66,48, nilai Kabupaten Tangerang berada di atas rata-rata provinsi, yang menunjukkan posisi daerah relatif lebih baik dalam aspek pemberdayaan gender. Namun demikian, dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 77,62, masih terdapat selisih yang menunjukkan adanya ruang perbaikan agar kualitas pemberdayaan gender di Kabupaten Tangerang dapat lebih meningkat dan mendekati rata-rata nasional. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan kinerja yang positif dan progresif, namun tetap memerlukan upaya berkelanjutan agar peningkatan yang telah dicapai dapat dipertahankan serta terus ditingkatkan secara konsisten pada periode pembangunan berikutnya.

Faktor Keberhasilan pencapaian target

1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, yang diikuti oleh operator perencanaan dari berbagai

perangkat daerah. Tujuan kegiatan ini adalah agar perspektif gender terintegrasi dalam seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lain dapat diakomodasi dalam kebijakan dan anggaran daerah.

2. Pengarusutamaan Gender sebagai Komitmen Kebijakan Daerah

Pemerintah Kabupaten Tangerang menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah sebagai upaya mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs). Komitmen ini penting agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga keadilan manfaat bagi perempuan, laki-laki, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

3. Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) di Lingkungan Kerja

Dalam rangka meningkatkan perhatian terhadap hak kesehatan dan kesejahteraan perempuan pekerja, DPPPA Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) di sejumlah perusahaan. Kegiatan ini menitikberatkan pada pentingnya penyediaan fasilitas ramah perempuan di tempat kerja seperti ruang laktasi, izin khusus bagi ibu hamil, serta kebijakan kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan perempuan. Upaya ini diharapkan mempengaruhi kualitas hidup serta produktivitas perempuan dalam ranah ekonomi.

4. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

DPPPA Kabupaten Tangerang secara aktif menggencarkan kampanye dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat serta instansi pemerintahan dan sektor swasta. Upaya kolaboratif ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan berbasis gender, yang merupakan bagian penting dari pemberdayaan perempuan.

5. Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Inspiratif dan Apresiasi

Program seperti pemilihan “Perempuan Inspiratif Kabupaten Tangerang” juga dilaksanakan sebagai langkah pemberdayaan perempuan. Kegiatan ini memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi inspirator dan agen perubahan di komunitasnya, sekaligus menunjukkan peran perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

6. Keterlibatan dalam Komunitas dan Ormas untuk Kesadaran Gender

Selain program pemerintah, pejabat daerah juga mengajak organisasi masyarakat seperti Fatayat NU untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap isu gender, khususnya pencegahan kekerasan berbasis gender. Upaya komunikasi dan kolaborasi seperti ini memperluas partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Meningkatkan Akses Perempuan ke Sumber Daya Ekonomi

Mendorong pelatihan kewirausahaan bagi perempuan dan memperluas akses mereka terhadap permodalan dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam industri berbasis teknologi dan digital.

2. Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Kepemimpinan

Mendorong keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan melalui kebijakan afirmatif dan memberikan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan untuk mendukung peran mereka dalam pengambilan keputusan.

3. Memperkuat Pendidikan dan Kesehatan untuk Perempuan

Menyediakan lebih banyak program pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan perempuan di berbagai sektor dan memperluas akses layanan kesehatan reproduksi dan gizi untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan.

4. Mengubah Pola Pikir Sosial tentang Peran Perempuan

Melakukan kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembagian peran yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan.

SASARAN 05

Meningkatkan
Pengendalian Penduduk

TINGKAT EFISIENSI SASARAN STRATEGIS 05

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan pengendalian penduduk didukung oleh program :

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

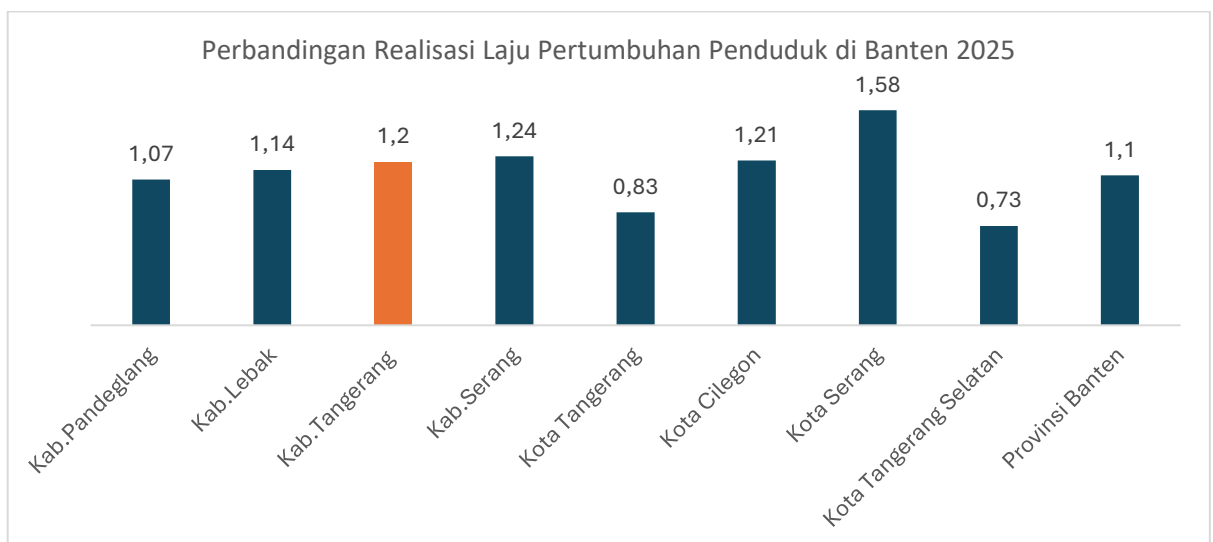
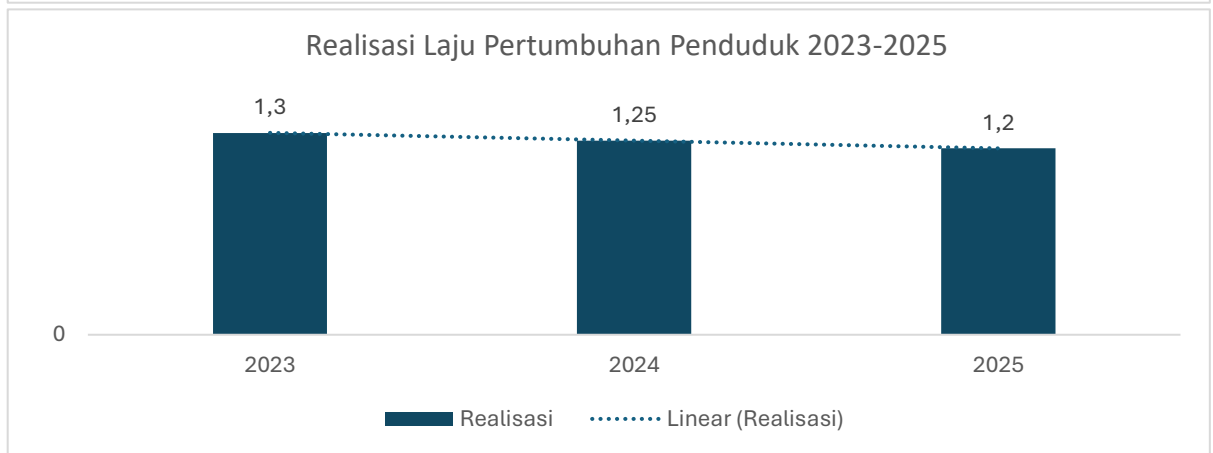
Rata-rata capaian realisasi anggaran program pada Sasaran Strategis tersebut tercatat sebesar 98,21% dari total pagu anggaran program yang telah ditetapkan. Secara agregat, realisasi anggaran pada sasaran strategis mencapai Rp28.231.632.461 dari total pagu anggaran sebesar Rp28.425.872.653 atau setara dengan 99,32%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran strategis tersebut telah berjalan dengan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi.

Sementara itu, rata-rata capaian kinerja indikator sasaran strategis tercatat sebesar 95,83% dari target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja dengan tingkat realisasi anggaran, terlihat bahwa tingkat penyerapan anggaran lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja yang dihasilkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran pada sasaran strategis tersebut belum sepenuhnya optimal, karena tingkat penyerapan anggaran yang tinggi belum sepenuhnya diikuti oleh capaian kinerja yang sebanding dengan target yang telah ditetapkan.

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
1.15	1.20	95,83%	1.05



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

Berdasarkan data Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2025, realisasi tercatat sebesar 1,20 dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 1,15, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 95,83%. Perbedaan antara target dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian laju pertumbuhan penduduk masih memerlukan penguatan agar dapat sepenuhnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian dalam rangka mendukung terciptanya pertumbuhan penduduk yang selaras dengan daya dukung wilayah dan perencanaan pembangunan daerah.

Jika dilihat dari tren tahun sebelumnya, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang menunjukkan kecenderungan yang positif, yaitu mengalami penurunan dari sebesar 1,30 pada tahun 2023 menjadi 1,25 pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 1,20 pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang telah dilaksanakan. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, termasuk dalam rangka mendukung pencapaian target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 1,05.

Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Banten sebesar 1,10, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang masih berada pada tingkat yang relatif lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan karakteristik Kabupaten Tangerang sebagai wilayah yang berkembang pesat dan memiliki daya tarik tinggi terhadap mobilitas dan aktivitas penduduk. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian indikator laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2025 menunjukkan tren yang membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ke depan, diperlukan upaya yang berkesinambungan dan terintegrasi untuk semakin mengoptimalkan pengendalian pertumbuhan penduduk, sehingga target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Faktor ketidak pencapaian target

1. Tingginya arus urbanisasi dan perpindahan penduduk ke Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah penyangga kawasan metropolitan Jabodetabek yang memiliki perkembangan kawasan permukiman, industri, dan pusat

kegiatan ekonomi yang pesat. Kondisi ini menarik perpindahan penduduk dari daerah lain untuk tinggal dan bekerja di Kabupaten Tangerang, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah penduduk dan menyebabkan laju pertumbuhan penduduk relatif lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

2. Pertumbuhan kawasan permukiman dan pembangunan perumahan yang cukup pesat

Perkembangan kawasan perumahan dan permukiman baru di berbagai wilayah Kabupaten Tangerang turut mendorong peningkatan jumlah penduduk, baik melalui pertumbuhan alami maupun perpindahan penduduk. Ketersediaan hunian yang semakin luas meningkatkan daya tarik wilayah sebagai tempat tinggal, sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk.

Walaupun target laju pertumbuhan penduduk tidak tercapai, pemerintah daerah sebenarnya sudah melakukan beberapa program pengendalian penduduk sepanjang 2025. Dari beberapa berita resmi kegiatan pemerintah di Kabupaten Tangerang, berikut contoh kegiatan yang memang dilakukan untuk menekan pertumbuhan penduduk. Berikut beberapa program yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang :

1. Pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan KB kepada masyarakat, antara lain melalui kegiatan safari KB dan pelayanan KB serentak di fasilitas kesehatan maupun lokasi keramaian seperti pasar. Kegiatan ini memberikan layanan kontrasepsi kepada pasangan usia subur guna mencegah kehamilan yang tidak direncanakan serta mengatur jarak kelahiran sehingga dapat menekan laju pertumbuhan penduduk.

2. Pelaksanaan program pelayanan KB bergerak

Untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan KB, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga melaksanakan program pelayanan KB bergerak yang menjangkau masyarakat hingga ke wilayah yang jauh dari fasilitas kesehatan. Program ini melibatkan tenaga kesehatan, kader KB, serta fasilitas kesehatan setempat guna memastikan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kontrasepsi secara mudah dan merata.

3. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KB

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan KB, pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya yang memberikan pelayanan KB. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kontrasepsi serta edukasi kesehatan reproduksi kepada masyarakat.

4. Pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data keluarga

Pemerintah Kabupaten Tangerang juga melaksanakan kegiatan pemutakhiran pendataan keluarga untuk memperoleh data yang akurat terkait kondisi keluarga dan kependudukan. Data tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan program pembangunan keluarga serta pengendalian penduduk sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dalam menekan laju pertumbuhan penduduk.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Meningkatkan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Pemerintah daerah akan mengoptimalkan pelaksanaan program keluarga berencana melalui peningkatan sosialisasi, pelayanan, dan pembinaan kepada masyarakat guna mengendalikan angka kelahiran.

2. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk

Pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah terkait dalam perencanaan dan pengendalian pertumbuhan penduduk agar sejalan dengan daya dukung dan daya tampung wilayah.

3. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengendalian pertumbuhan penduduk

Upaya sosialisasi akan ditingkatkan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

4. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan jumlah penduduk

Pemerintah daerah akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program pengendalian pertumbuhan penduduk.

5. Mengintegrasikan kebijakan kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan daerah akan diselaraskan dengan kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk guna menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya serta infrastruktur.

SASARAN 06

Mewujudkan Lingkungan yang
Kondusif, Aman, dan Tertib

TINGKAT EFISIENSI SASARAN STRATEGIS 06

Pencapaian kinerja sasaran strategis mewujudkan kondisi lingkungan yang kondusif, aman, dan tertib didukung oleh program :

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Rata-rata capaian realisasi anggaran program pada Sasaran Strategis tersebut tercatat sebesar 98,15% dari total pagu anggaran program yang telah ditetapkan. Secara agregat, realisasi anggaran pada sasaran strategis mencapai Rp25.233.252.508 dari total pagu anggaran sebesar Rp25.681.788.840 atau setara dengan 98,25%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis telah berjalan dengan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi.

Sementara itu, rata-rata capaian kinerja indikator sasaran strategis tercatat sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja dengan tingkat realisasi anggaran, terlihat bahwa target kinerja dapat dicapai dengan tingkat penyerapan anggaran yang tidak sepenuhnya mencapai pagu yang tersedia.

Berdasarkan perbandingan tersebut, diperoleh **tingkat efisiensi sebesar 2%**, yang dihitung dari selisih antara capaian kinerja sebesar 100% dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 98,25%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, karena dengan tingkat penyerapan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia mampu menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran pada sasaran strategis tersebut dapat dinilai telah memberikan hasil yang optimal dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

INDEKS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
1	1	100%	2,38

Sumber: Satpol PP Kabupaten Tangerang, 2025

Indeks Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Tangerang menunjukkan capaian kinerja yang signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh, target indeks ketentraman dan ketertiban untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 1,00, dan realisasi yang dicapai adalah 1,00. Dengan hasil tersebut, capaian kinerja mencapai 100%, yang mengindikasikan adanya efektivitas dalam penyelesaian permasalahan ketertiban dan ketentraman di wilayah Kabupaten Tangerang.

Perhitungan indeks ini didasarkan pada persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang dilaporkan. Pada tahun 2025, jumlah penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum adalah 79 kasus, yang juga merupakan jumlah total pelanggaran yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pelanggaran yang terjadi telah berhasil diselesaikan sepenuhnya.

Namun, dalam dokumen perencanaan RPD (Rencana Pembangunan Daerah) 2026, terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan Target Akhir RPD 2026, di mana angka yang tercantum adalah 2,38. Seharusnya, nilai target akhir ini lebih kecil dari target tahun 2024, mengingat bahwa indeks ini dihitung berdasarkan jumlah pelanggaran yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang terjadi. Dengan kata lain, semakin kecil nilai indeks, semakin baik capaian ketertiban dan ketentraman di daerah tersebut.

Komposisi penyusun indeks ini mencakup aspek-aspek seperti penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, laporan jumlah kriminalitas di tingkat kabupaten, serta faktor konflik sosial. Keberhasilan dalam peningkatan indeks ketentraman dan ketertiban diukur dengan membandingkan nilai indeks tahun berjalan (tahun n) dengan tahun sebelumnya (tahun n1). Apabila nilai indeks lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan peningkatan capaian kinerja dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

Secara keseluruhan, pencapaian indeks ketentraman dan ketertiban Kabupaten Tangerang tahun 2025 telah menunjukkan progres yang baik. Namun, tetap diperlukan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan serta meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban di tahun-tahun mendatang guna mencapai target akhir RPD 2026.

Faktor Keberhasilan pencapaian target

Kabupaten Tangerang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Indeks Ketentraman dan Ketertiban (IKK). Berikut beberapa langkah yang telah diambil:

1. Pelaksanaan sosialisasi ketentraman dan ketertiban kepada Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Satpol PP secara aktif melakukan sosialisasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum kepada perangkat desa, Satlinmas, dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sehingga potensi gangguan ketentraman dapat dicegah sejak dini.

2. Peluncuran program “Satpol PP Menyapa Masyarakat”

Pada tahun 2025 Pemkab Tangerang meluncurkan program Satpol PP Menyapa Masyarakat yang melakukan roadshow ke berbagai wilayah seperti RT/RW, sekolah, pasar, dan kawasan rawan gangguan ketertiban. Program ini bertujuan memperkuat komunikasi antara aparat pemerintah dan masyarakat serta memberikan edukasi terkait aturan dan ketertiban umum sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan tertib.

3. Penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Satpol PP bersama dinas terkait melakukan operasi penertiban terhadap gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di beberapa wilayah Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk menjaga ketertiban ruang publik dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi masyarakat.

4. Penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan aktivitas yang melanggar Perda

Pemerintah daerah melakukan penataan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi yang melanggar peraturan daerah. Penertiban dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi dan pemberian surat peringatan

sebelum tindakan penertiban, dengan tujuan menjaga ketertiban kawasan serta mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur dan aktivitas masyarakat.

5. Penertiban bangunan liar di fasilitas umum

Satpol PP juga melakukan penertiban bangunan liar yang berdiri di fasilitas umum seperti bantaran saluran air. Penertiban ini dilakukan untuk menegakkan peraturan daerah, mengembalikan fungsi fasilitas publik, serta mencegah potensi gangguan keamanan, ketertiban, dan risiko banjir di wilayah tersebut.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat

Mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui kampanye ketertiban umum dan penguatan kegiatan siskamling berbasis komunitas, serta menjalin sinergi dengan aparat keamanan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.

2. Pemanfaatan Teknologi

Penggunaan teknologi diperkuat melalui pemasangan CCTV, pengembangan aplikasi pelaporan, serta sistem monitoring digital. Selain itu, dilakukan analisis data secara berkala untuk mendeteksi potensi kerawanan secara lebih cepat dan tepat.

3. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi peraturan, pemberdayaan generasi muda, serta program rehabilitasi sosial guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku.

SASARAN 07

Meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi Daerah Sektor
Unggulan

TINGKAT EFISIENSI SASARAN STRATEGIS 07

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sektor unggulan didukung oleh 31 program :

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Penilaian Kesehatan Ksp / Usp Koperasi
3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)
6. Program Pengembangan Umkm
7. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
8. Program Promosi Penanaman Modal
9. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
10. Program Pelayanan Penanaman Modal
11. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
12. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
13. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
14. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
15. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
16. Program Pemasaran Pariwisata
17. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
18. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
19. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
20. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
21. Program Perizinan Usaha Pertanian
22. Program Penyuluhan Pertanian
23. Program Pengembangan Ekspor
24. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
25. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
26. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
27. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
28. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
29. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
30. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
31. Program Pengembangan Kebudayaan

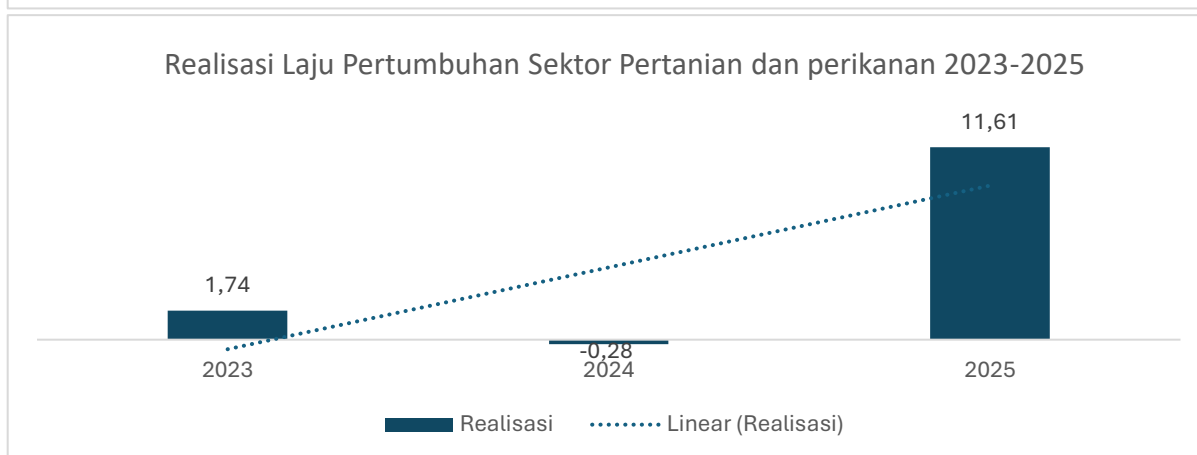
Rata-rata capaian realisasi anggaran program pada Sasaran Strategis tersebut tercatat sebesar 97,16% dari total pagu anggaran program yang telah ditetapkan. Secara agregat, realisasi anggaran pada sasaran strategis mencapai Rp. 81.683.510.052 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 85.822.141.521, atau setara dengan 95,18%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis telah berjalan dengan tingkat penyerapan anggaran yang cukup tinggi.

Sementara itu, rata-rata capaian kinerja indikator sasaran strategis tercatat sebesar 353%, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan melampaui target yang telah ditetapkan secara signifikan. Tingginya capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan hasil yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target kinerja yang direncanakan.

Apabila dibandingkan antara capaian kinerja dengan tingkat realisasi anggaran, terlihat bahwa capaian kinerja yang dihasilkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran. Berdasarkan perbandingan tersebut, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 73%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran strategis tersebut telah berjalan secara sangat efisien dan efektif, karena dengan tingkat pemanfaatan anggaran yang relatif lebih rendah mampu menghasilkan capaian kinerja yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelolaan program dan kegiatan pada sasaran strategis tersebut dapat dinilai telah memberikan hasil yang optimal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
3,48%	11,61%	333,62%	3,88%



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

Laju pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat signifikan, yakni sebesar 11,61%. Angka ini jauh melampaui target tahunan 2025 yang ditetapkan sebesar 3,48% dan juga melampaui target akhir RPD tahun 2026 sebesar 3,88%. Capaian ini mengindikasikan adanya lonjakan kinerja sektor pertanian dan perikanan yang tidak hanya memenuhi ekspektasi perencanaan, tetapi juga menunjukkan akselerasi yang kuat dalam satu tahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terjadi perubahan tren yang sangat tajam. Pada tahun 2024, pertumbuhan sektor ini tercatat negatif sebesar -0,28%, yang menandakan adanya kontraksi atau penurunan kinerja sektor. Sementara itu, pada tahun 2023, pertumbuhan masih berada pada level positif namun relatif rendah yaitu

sebesar 1,74%. Dengan demikian, capaian 11,61% pada tahun 2025 mencerminkan pemulihan yang sangat cepat sekaligus peningkatan produktivitas yang signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Kinerja yang melonjak ini dapat mengindikasikan adanya berbagai faktor pendukung, seperti perbaikan kondisi cuaca, peningkatan produktivitas lahan dan hasil tangkapan, optimalisasi program bantuan dan subsidi sektor pertanian serta perikanan, hingga membaiknya distribusi dan permintaan pasar. Selain itu, kemungkinan adanya intervensi kebijakan daerah yang lebih tepat sasaran juga turut mendorong peningkatan kinerja sektor ini secara signifikan.

Dari sisi pencapaian target, realisasi 2025 tidak hanya melampaui target tahunan, tetapi juga telah melampaui target akhir RPD tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sebelumnya relatif konservatif dibandingkan dengan potensi riil sektor di lapangan. Kondisi ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan target perencanaan berikutnya agar lebih adaptif dan realistis terhadap dinamika ekonomi sektoral.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 3,88%, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara kondisi aktual dan arah kebijakan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih kuat dan terfokus. Strategi yang dapat dipertimbangkan antara lain perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, peningkatan produktivitas melalui mekanisasi dan inovasi teknologi, penguatan hilirisasi produk pertanian dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah, serta stabilisasi harga melalui kemitraan dengan pelaku usaha dan offtaker.

Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan pemulihan yang sangat kuat dari kondisi sebelumnya, sekaligus memperlihatkan performa yang jauh melampaui target perencanaan. Hal ini menjadi indikasi adanya akselerasi yang signifikan, yang perlu dijaga keberlanjutannya melalui kebijakan dan program yang konsisten agar kinerja positif ini dapat dipertahankan pada periode perencanaan berikutnya.

Faktor keberhasilan pencapaian target

1. Kondisi cuaca dan musim yang lebih mendukung

Kondisi iklim yang relatif lebih stabil dibanding tahun sebelumnya, sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, serta hasil

tangkapan perikanan. Stabilitas musim tanam dan musim melaut turut mengurangi risiko gagal panen dan gagal tangkap.

2. Penguatan program bantuan dan sarana produksi

Pemerintah daerah secara aktif menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih unggul, pupuk, hingga sarana budidaya kepada kelompok tani di berbagai kecamatan. Bantuan alsintan dalam jumlah besar serta sarana produksi hortikultura terbukti mempercepat proses produksi, menekan biaya, dan meningkatkan hasil panen petani.

3. Dukungan nyata terhadap produktivitas sektor perikanan

Di sektor perikanan, pemerintah daerah menyalurkan berbagai bantuan sarana tangkap serta dukungan operasional seperti bahan bakar bagi nelayan. Program tersebut secara langsung menekan biaya melaut dan meningkatkan frekuensi serta hasil tangkapan, sehingga berdampak positif terhadap pendapatan nelayan.

4. Pengembangan komoditas dan perluasan kawasan produksi

Berbagai pemberitaan menunjukkan adanya pengembangan komoditas unggulan seperti jagung, semangka, dan hortikultura lainnya, termasuk pemanfaatan lahan tidak produktif menjadi lahan budidaya baru. Perluasan areal tanam dan diversifikasi komoditas ini meningkatkan volume produksi serta memperluas basis ekonomi sektor pertanian.

5. Sinergi program pemerintah, penyuluh, dan kelompok tani/nelayan

Keberhasilan panen dan peningkatan produksi juga menunjukkan adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, penyuluh lapangan, serta kelompok tani dan nelayan. Sinergi ini mempercepat adopsi teknologi, inovasi budidaya, serta memastikan bantuan yang diberikan dimanfaatkan secara efektif di lapangan.

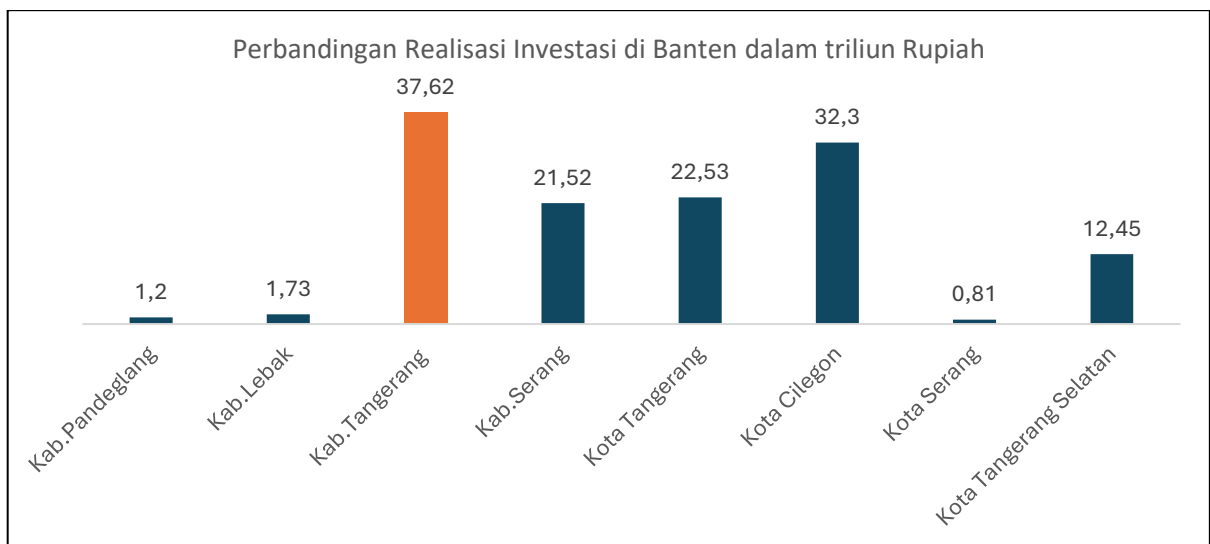
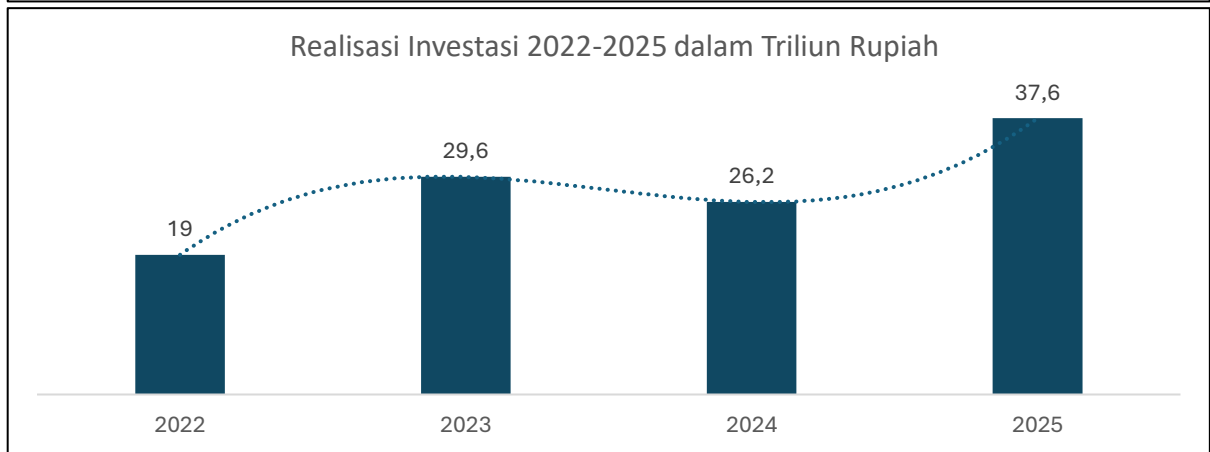
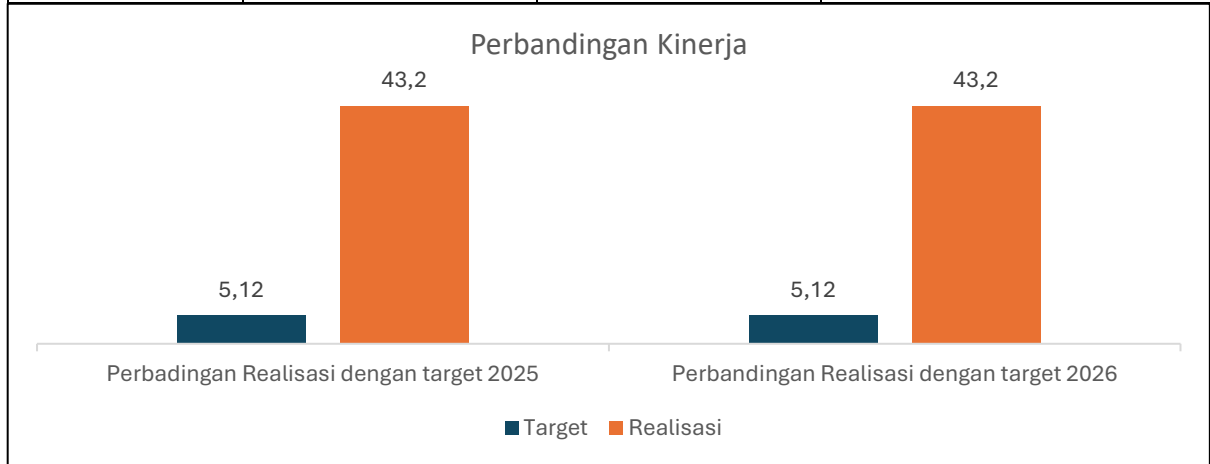
RENCANA TINDAK LANJUT

1. Memperkuat perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta pengendalian alih fungsi lahan melalui penegasan regulasi tata ruang dan pengawasan berbasis digital.

2. Melakukan revitalisasi dan normalisasi jaringan irigasi serta meningkatkan pengawasan pengelolaan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air pertanian dan tambak.
3. Membangun sistem stabilisasi harga dan memperkuat rantai distribusi melalui kemitraan dengan offtaker, penguatan koperasi, serta pengembangan sentra pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
4. Mendorong modernisasi sektor melalui penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), teknologi budidaya perikanan, serta pelatihan peningkatan kapasitas petani dan nelayan.
5. Mengembangkan program adaptasi perubahan iklim, termasuk penggunaan varietas tahan cuaca ekstrem, asuransi pertanian/perikanan, serta sistem peringatan dini berbasis data cuaca.

PERSENTASE REALISASI INVESTASI (PMA/PMDN)

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
5,12%	43,2%	843,7%	5,12%



Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang, 2025

Berdasarkan data realisasi investasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Investasi/BKPM pada tanggal 15 Januari 2026, Pencapaian realisasi 00 Kabupaten Tangerang periode Oktober – Desember (Triwulan IV) Tahun 2025 mencapai Rp. 9.08 Triliun. Menurun 23,86% dari periode Triwulan III Tahun 2025, namun meningkat 21,67% dibandingkan dengan periode yang sama pada Triwulan IV Tahun 2024, yang hanya mencapai Rp 7,4 Triliun.

Secara kumulatif, realisasi investasi sepanjang Tahun 2025 menunjukkan pencapaian pertumbuhan yang sangat positif dengan total pencapaian realisasi investasi Rp. 37,6 Triliun, atau meningkat 43,20% dibandingkan dengan Tahun 2024 yang hanya mencapai 26,2 Triliun. Dengan pencapaian ini realisasi investasi Kabupaten Tangerang Tahun 2025 telah mencapai 154% dari target investasi 2025 sebesar Rp 24,4 Triliun dan mencatat pencapaian realisasi investasi tertinggi sepanjang masa Kabupaten Tangerang.

Pada Triwulan IV Tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Tangerang mencatat jumlah pelaku usaha/proyek yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berjumlah 12.156 pelaku usaha/proyek dan secara keseluruhan jumlah pelaku usaha/proyek Tahun 2025 yang melaporkan LKPM meningkat secara signifikan sebesar 80,31% atau berjumlah 47.456 pelaku usaha/proyek dibandingkan dengan Tahun 2024.

Realisasi Investasi pada periode Triwulan IV Tahun 2025 masih menunjukkan dominasi Pemilik Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan komposisi 56% atau senilai Rp. 5,08 Triliun dengan jumlah pelaku usaha/proyek yang melaporkan LKPM 7.201, sedangkan Pemilik Modal Asing (PMA) mencapai 44 % atau senilai Rp. 4,00 Triliun dari total investasi. Tren PMDN yang terus menguat dan mendominasi sejak tahun sebelum-sebelumnya menunjukkan kepercayaan pelaku usaha dalam negeri yang semakin kuat dan tumbuh terhadap perekonomian nasional dan menunjukkan ketahanan ekonomi yang mandiri di tengah tantangan global yang masih diwarnai ketidakpastian, mulai dari pelambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, hingga fragmentasi perdagangan internasional. Kontribusi PMA pada Tahun 2025 yang meningkat 27,21 % dibandingkan Tahun 2024, Capaian ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor juga global tetap terjaga ditengah dinamika ekonomi dunia sebagaimana disampaikan diatas dan beberapa proyek baru dan perluasan telah mulai terealisasi. Berdasarkan asal Negara PMA, realisasi investasi periode Tahun 2025 mencatat terdapat 61 Negara asal PMA yang melakukan pelaporan LKPM, Negara R.R. Tiongkok menjadi negara dengan realisasi investasi paling

tinggi dengan pencapaian (Rp.3,61 Triliun), diikuti oleh Singapura (Rp. 2,83 Triliun), Korea Selatan (Rp. 2,50 Triliun), Jepang (Rp. 763 Miliar) dan Hongkong (Rp. 747 Miliar).

Berdasarkan sektor usaha, pada Tahun 2025 lima besar realisasi investasi berasal dari PMDN masih konsisten dari sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp. 9,73 Triliun), Perdagangan dan Reparasi (Rp. 3,31 Triliun), Industri Kimia dan Farmasi (Rp. 2,47 Triliun), Industri Makanan (Rp. 1,78 Triliun) dan Jasa Lainnya (Rp. 1,32 Triliun). Sedangkan, lima besar realisasi investasi yang menjadi kontribusi dari PMA ada pada Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp. 2,03 Triliun), Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam (Rp. 1,75 Triliun), Industri Lainnya (Rp. 1,55 Triliun), Perdagangan dan Reparasi (Rp. 1,58 Triliun) serta Jasa Lainnya (Rp. 913 Miliar).

Faktor keberhasilan pencapaian target

1. Digitalisasi pelayanan perizinan melalui sistem OSS dan SIPINTER

Salah satu faktor keberhasilan realisasi investasi di Kabupaten Tangerang adalah penerapan digitalisasi pelayanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan aplikasi SIPINTER yang dikembangkan oleh DPMPTSP Kabupaten Tangerang. Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat mengurus berbagai perizinan secara elektronik tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Pada tahun 2025, pemerintah daerah berhasil menerbitkan sebanyak 12.413 Nomor Induk Berusaha (NIB) serta 1.799 izin melalui sistem SIPINTER. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara aktif mempermudah proses legalitas usaha. Kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan ini menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Tangerang.

2. Percepatan penerbitan izin usaha dan sertifikat standar bagi pelaku usaha

Pemerintah Kabupaten Tangerang juga secara aktif mempercepat penerbitan izin usaha dan sertifikat standar sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan investasi. Pada tahun 2025, pemerintah daerah berhasil menerbitkan sebanyak 4.944 izin dan sertifikat standar kepada pelaku usaha. Selain itu, tercatat sebanyak 31.350 rencana proyek usaha yang didaftarkan oleh pelaku usaha di Kabupaten Tangerang. Penerbitan izin tersebut memberikan kepastian hukum kepada investor untuk menjalankan kegiatan usaha dan merealisasikan rencana investasi mereka. Dengan adanya

kepastian hukum dan kemudahan perizinan, investor dapat segera melakukan pembangunan fasilitas usaha, membuka kegiatan produksi, dan mengembangkan usahanya di wilayah Kabupaten Tangerang.

3. Penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan kepada investor dan pelaku usaha

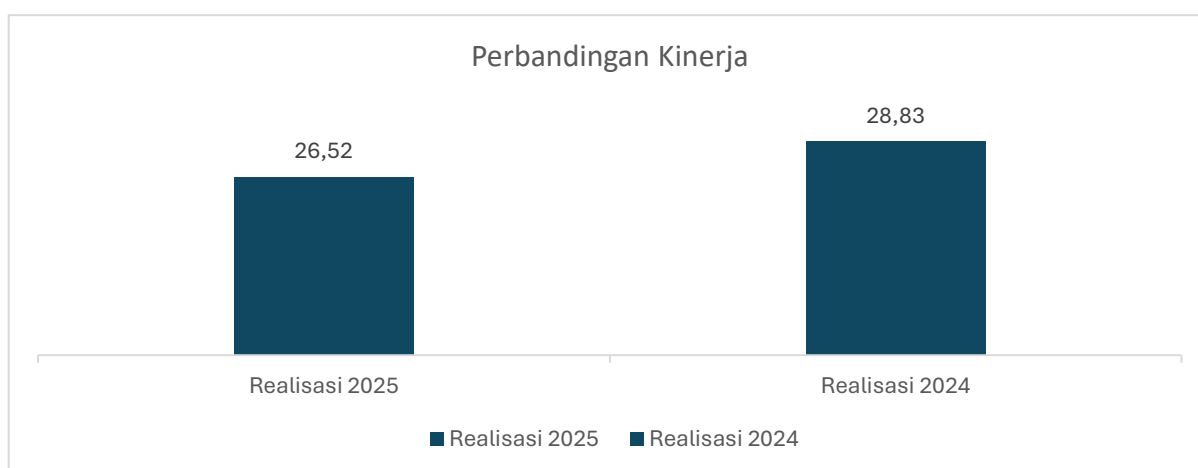
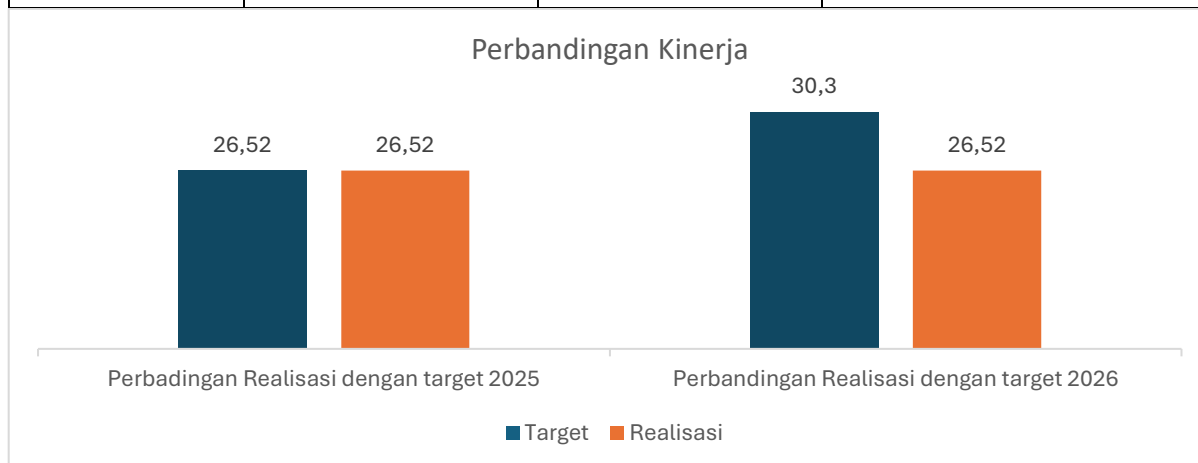
Pemerintah Kabupaten Tangerang juga menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan kepada investor dan pelaku usaha untuk membantu proses perizinan dan kegiatan investasi. Melalui layanan ini, pelaku usaha dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan perizinan, prosedur investasi, dan tahapan yang harus dilakukan dalam merealisasikan investasi. Pendampingan ini membantu pelaku usaha menghindari kesalahan dalam proses perizinan dan mempercepat proses realisasi investasi. Dengan adanya dukungan dan pendampingan dari pemerintah daerah, pelaku usaha menjadi lebih mudah dalam menjalankan kegiatan usaha dan merealisasikan investasi mereka di Kabupaten Tangerang.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Meningkatkan kualitas dan mempercepat proses pelayanan perizinan berusaha agar investor dapat segera merealisasikan kegiatan investasinya.
2. Melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala terhadap investor yang telah memperoleh izin untuk memastikan investasi benar-benar direalisasikan.
3. Melakukan pendampingan kepada investor dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi selama proses pembangunan dan operasional usaha.
4. Menyediakan dan memastikan ketersediaan kawasan yang sesuai dengan tata ruang wilayah dan siap digunakan untuk kegiatan investasi.
5. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur pendukung investasi, khususnya di kawasan industri dan wilayah yang memiliki potensi investasi.
6. Meningkatkan kegiatan promosi potensi investasi daerah untuk menarik investor baru, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
7. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah untuk mempercepat penyelesaian kebutuhan administrasi dan teknis terkait investasi.
8. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian realisasi investasi untuk memastikan target investasi dapat tercapai

PERSENTASE DAYA SAING PRODUK UNGGULAN

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
26,52%	26,52%	100%	30,30%



Sumber: LAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Tujuan sudah sesuai target yang diharapkan, adapun indikator pendukung dari tujuan yaitu Persentase Daya Saing Produk Usaha Mikro dengan definisi operasional yaitu jumlah Produk yang keluar daerah. Dimana pada tahun 2025 jumlah produk Usaha Mikro yang berhasil dipasarkan ke luar daerah sebanyak 159 produk unggulan usaha mikro atau 26,52% dari target. Sedangkan target akhir di tahun 2026 yang harus dicapai yaitu sebanyak 600 produk unggulan yang dipasarkan ke luar daerah.

Fasilitasi pemasaran luar daerah dilakukan melalui pameran yang diikuti oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro diantaranya :

No.	Pameran Luar Daerah	Produk Usaha Mikro
1	Pameran UMKM Bali	85
2	Dekranasda Balikpapan	74
Total		159

Target ini tercapai karena adanya proses kurasi terhadap produk usaha mikro sehingga produk unggulan yang layak dipasarkan ke luar daerah. Dari 236 produk unggulan yang dilakukan kurasi hanya 159 yang layak untuk dipasarkan keluar, selebihnya sebanyak 77 produk yang gagal kurasi dilakukan pembinaan dan pendampingan lanjutan, sehingga layak untuk dipasarkan ke luar daerah.

Faktor Keberhasilan pencapaian target

1. Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro

Keberhasilan peningkatan daya saing produk usaha mikro didukung oleh adanya kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kegiatan ini membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produk, pengemasan, serta kemampuan manajemen usaha, sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih kompetitif di pasar.

2. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk usaha mikro

Pemerintah daerah memberikan dukungan melalui kegiatan promosi, pameran, dan fasilitasi pemasaran produk usaha mikro. Melalui kegiatan tersebut, produk usaha mikro menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas dan memiliki peluang yang lebih besar untuk bersaing dengan produk lainnya.

3. Dukungan pengembangan kualitas produk usaha mikro

Upaya peningkatan kualitas produk, termasuk perbaikan kemasan dan standarisasi produk, turut berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk usaha mikro. Produk yang memiliki kualitas baik dan kemasan yang menarik lebih mudah diterima oleh pasar dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

4. Peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha mikro

Melalui berbagai program pendampingan dan pengembangan usaha, pelaku usaha mikro menjadi lebih mampu mengelola usahanya secara efektif dan efisien. Peningkatan kapasitas ini berdampak pada peningkatan kualitas dan daya saing produk yang dihasilkan.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Ekspansi Pasar ke Level Nasional dan Internasional

- Meningkatkan partisipasi dalam pameran dan expo bertaraf internasional.
- Menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan kementerian terkait untuk membuka akses pasar lebih luas.
- Memanfaatkan platform perdagangan digital global untuk memperkenalkan produk unggulan ke luar negeri.

2. Optimalisasi Digital Marketing dan E-Commerce

- Meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam pemasaran digital melalui pelatihan dan pendampingan intensif.
- Membangun platform e-commerce lokal atau bekerja sama dengan marketplace nasional untuk memperluas jangkauan produk.
- Menggunakan strategi iklan digital yang lebih efektif, seperti pemasaran melalui media sosial, influencer, dan iklan berbayar.

3. Peningkatan Kualitas dan Standarisasi Produk

- Memastikan produk unggulan memiliki standar kualitas yang sesuai dengan pasar nasional dan internasional.
- Mendukung UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, BPOM, dan SNI untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.
- Meningkatkan inovasi dan diversifikasi produk agar lebih kompetitif di pasar.

4. Peningkatan Kolaborasi dan Kemitraan Strategis

- Mengembangkan jaringan kemitraan dengan pelaku usaha besar, ritel modern, dan eksportir.
- Mendorong kerja sama dengan instansi pendidikan dan pusat riset untuk meningkatkan inovasi produk.

- Memperkuat kolaborasi dengan komunitas bisnis dan asosiasi industri guna meningkatkan daya saing bersama.

5. Peningkatan Promosi dan Branding Produk Unggulan

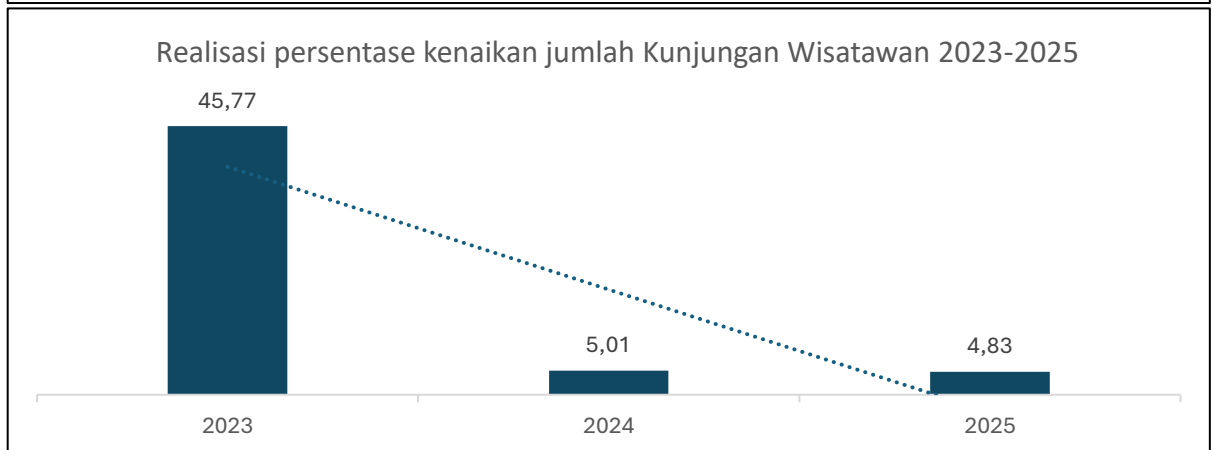
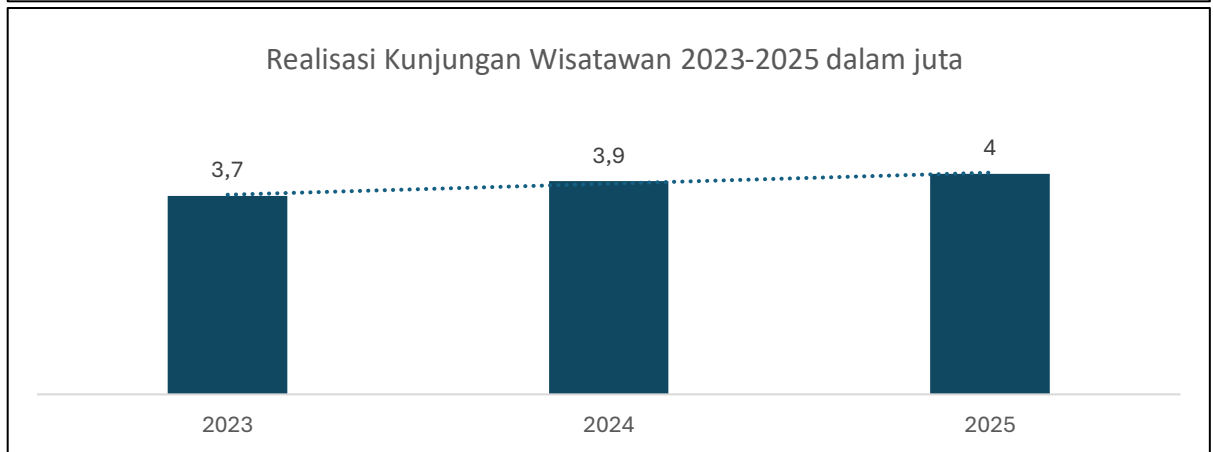
- Menyelenggarakan kampanye promosi terintegrasi yang mengangkat keunikan dan nilai tambah produk lokal.
- Mengembangkan konsep branding daerah yang kuat agar produk unggulan lebih dikenal secara luas.
- Mengadakan festival produk unggulan secara rutin untuk menarik lebih banyak pembeli dan investor.

6. Optimalisasi Infrastruktur dan Regulasi Pendukung

- Mempermudah perizinan bagi pelaku usaha dan UMKM untuk meningkatkan legalitas dan kredibilitas produk.
- Meningkatkan infrastruktur pendukung seperti pusat distribusi, gudang penyimpanan, dan sistem logistik yang efisien.
- Memberikan insentif dan bantuan modal bagi UMKM yang berorientasi ekspor agar dapat bersaing lebih kuat

PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
3,57%	4,83%	135,29%	3,73%



Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang, 2025

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tangerang menargetkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 3,57% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2024 tercatat sebanyak 3.900.961 kunjungan dan meningkat menjadi 4.090.171 kunjungan pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 189.210 kunjungan atau sekitar 4,85%, sehingga melampaui target kenaikan yang telah ditetapkan sebesar 3,57%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kunjungan wisatawan nusantara telah berjalan dengan baik dan efektif.

Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara juga mengalami peningkatan dari 37.403 kunjungan pada tahun 2024 menjadi 38.653 kunjungan pada tahun 2025, atau meningkat sebesar 1.250 kunjungan atau sekitar 3,34%. Peningkatan ini menunjukkan adanya tren positif dalam pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Tangerang, meskipun peningkatannya masih relatif moderat dibandingkan wisatawan nusantara.

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengembangkan sektor pariwisata telah memberikan hasil yang positif. Capaian ini mencerminkan meningkatnya daya tarik destinasi wisata di Kabupaten Tangerang serta efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata. Ke depan, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas destinasi wisata, sarana dan prasarana pendukung, serta promosi pariwisata guna mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara berkelanjutan.

Berdasarkan data realisasi persentase kenaikan jumlah kunjungan wisatawan periode 2023–2025, terlihat bahwa meskipun jumlah kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan setiap tahun, namun persentase kenaikannya menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2023, persentase kenaikan jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebesar 45,77%, kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi sebesar 5,01%. Selanjutnya, pada tahun 2025 persentase kenaikan kembali mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 4,83%. Kondisi ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mengalami perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Penurunan persentase kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun jumlah wisatawan masih bertambah, tingkat pertumbuhannya tidak setinggi periode sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti mulai stabilnya jumlah kunjungan wisatawan setelah mengalami peningkatan yang signifikan pada periode sebelumnya, serta perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan daya tarik destinasi wisata. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis yang lebih optimal dalam pengembangan dan promosi pariwisata guna meningkatkan kembali laju pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan pada periode selanjutnya.

Faktor Keberhasilan pencapaian target

1. Penguatan promosi pariwisata melalui pelatihan dan peningkatan kualitas konten promosi

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata telah melaksanakan kegiatan workshop fotografi dan desain grafis yang melibatkan komunitas pariwisata dan generasi muda. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas promosi destinasi wisata daerah melalui media visual yang lebih menarik dan profesional. Upaya ini memberikan dampak nyata berupa meningkatnya eksposur destinasi wisata Kabupaten Tangerang di media digital dan media sosial, sehingga mempermudah wisatawan dalam memperoleh informasi destinasi wisata dan mendorong peningkatan minat kunjungan wisatawan.

2. Dukungan kebijakan yang mendorong wisata lokal di wilayah Banten, termasuk Kabupaten Tangerang

Kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Banten yang mendorong kegiatan wisata lokal, seperti pembatasan study tour ke luar daerah, secara langsung memberikan dampak pada peningkatan kunjungan wisata di wilayah Banten, termasuk Kabupaten Tangerang. Kebijakan ini menyebabkan sekolah dan masyarakat lebih memilih destinasi wisata lokal sebagai tujuan rekreasi dan edukasi, sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik. Kondisi ini memberikan kontribusi positif terhadap capaian target kunjungan wisatawan di Kabupaten Tangerang, khususnya dari segmen wisatawan nusantara.

3. Peningkatan kualitas pelayanan dan kesiapan destinasi wisata untuk menghadapi lonjakan wisatawan

Pemerintah daerah bersama pengelola destinasi wisata terus meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk aspek kebersihan, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan wisatawan. Upaya ini penting untuk menciptakan pengalaman wisata yang positif dan meningkatkan kepuasan wisatawan. Dengan adanya peningkatan kualitas layanan dan kesiapan destinasi, wisatawan menjadi lebih tertarik untuk berkunjung kembali maupun merekomendasikan destinasi wisata di Kabupaten Tangerang kepada orang lain, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

4. Pengembangan sumber daya manusia dan keterlibatan komunitas pariwisata lokal

Pemerintah Kabupaten Tangerang juga melibatkan komunitas pariwisata seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Generasi Pesona Indonesia dalam pengembangan sektor pariwisata. Keterlibatan komunitas ini membantu meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata, memperkuat promosi berbasis komunitas, serta menciptakan daya tarik wisata yang lebih beragam. Dampaknya, destinasi wisata menjadi lebih aktif, dikenal luas, dan mampu menarik lebih banyak wisatawan.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Meningkatkan promosi destinasi wisata Kabupaten Tangerang melalui media digital, media sosial, dan kegiatan promosi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.
2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung di destinasi wisata, seperti fasilitas umum, akses jalan, area parkir, dan fasilitas penunjang lainnya.
3. Menyelenggarakan event pariwisata secara rutin, seperti festival budaya, kegiatan seni, dan kegiatan hiburan masyarakat untuk menarik minat kunjungan wisatawan.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata melalui pembinaan dan pelatihan kepada pengelola wisata dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis).
5. Meningkatkan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan destinasi wisata guna memberikan pengalaman yang positif bagi wisatawan.

6. Mengembangkan potensi wisata lokal, termasuk wisata budaya, wisata kuliner, dan wisata buatan, sebagai daya tarik tambahan bagi wisatawan.
7. Meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta dan pelaku usaha dalam pengembangan dan promosi pariwisata daerah.
8. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap perkembangan jumlah kunjungan wisatawan sebagai dasar perbaikan program dan kegiatan pariwisata

SASARAN 08

Meningkatkan
Kemandirian Desa

TINGKAT EFISIENSI SASARAN STRATEGIS 08

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan kemandirian desa didukung oleh 4 program :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
3. Program Penataan Desa
4. Program Peningkatan Kerja Sama Desa

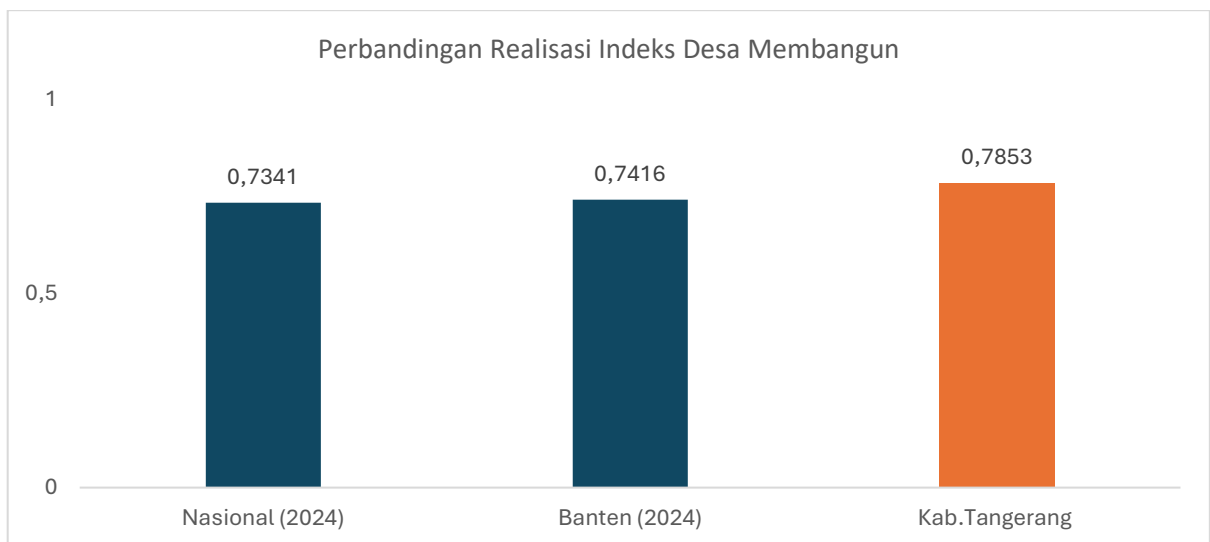
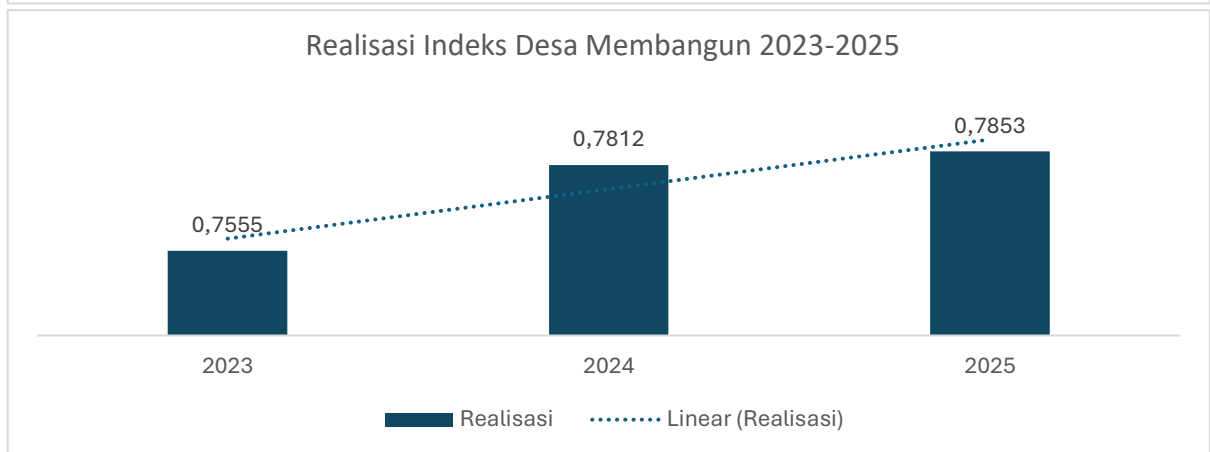
Rata-rata capaian realisasi anggaran program pada Sasaran Strategis tersebut tercatat sebesar 96,24% dari total pagu anggaran program yang telah ditetapkan. Secara agregat, realisasi anggaran pada sasaran strategis mencapai Rp41.303.488.574 dari total pagu anggaran sebesar Rp44.457.481.816, atau setara dengan 92,91%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis telah berjalan dengan tingkat penyerapan anggaran yang cukup tinggi.

Sementara itu, rata-rata capaian kinerja indikator sasaran strategis tercatat sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis tersebut dapat tercapai sepenuhnya. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja dengan tingkat realisasi anggaran, terlihat bahwa target kinerja dapat dicapai dengan tingkat penyerapan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia.

Berdasarkan perbandingan tersebut, diperoleh **tingkat efisiensi sebesar 7%**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan tingkat pemanfaatan anggaran sebesar 92,91%, program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mencapai seluruh target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran pada sasaran strategis tersebut dapat dinilai telah memberikan hasil yang optimal dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

INDEKS DESA MEMBANGUN

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
0.7853	0.7853	100%	0.7507



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, 2025

Indeks Desa Membangun terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi. Dengan uraian sebagai berikut :

1. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

IDM dihitung dengan menggunakan rumus :

$$IDM = 1/3 (IS + IEK + IL)$$

Keterangan :

IS : Indeks Sosial

IEK : Indeks Ekonomi

IL : Indeks Lingkungan (Ekologi).

Perhitungan Indeks Desa Membangun memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

1. Memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi pembangunan desa
2. Menjadi alat evaluasi yang objektif untuk mengukur kemajuan pembangunan desa
3. Memfasilitasi kolaborasi antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah, LSM, dan masyarakat desa
4. Membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa yang tepat sasaran

IDM selanjutnya digunakan dalam pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Berikut merupakan 5

(lima) status Desa : Desa Mandiri Desa Maju Desa Berkembang Desa Tertinggal Desa Sangat Tertinggal. Adapun progress status Desa di Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

TAHUN	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL
2020	1 DESA	50 DESA	195 DESA	0 DESA	0 DESA
2021	1 DESA	55 DESA	190 DESA	0 DESA	0 DESA
2022	5 DESA	114 DESA	127 DESA	0 DESA	0 DESA
2023	36 DESA	167 DESA	43 DESA	0 DESA	0 DESA
2024	78 DESA	143 DESA	25 DESA	0 DESA	0 DESA
2025	105 DESA	116 DESA	25 DESA	0 DESA	0 DESA

Pada tahun 2025, Kabupaten Tangerang berhasil mencapai target kinerja yang sangat signifikan dalam meningkatkan pembangunan desa melalui peningkatan jumlah desa mandiri. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, capaian desa mandiri mencapai 42,68 % atau sebanyak 105 desa dari total 246 desa di Kabupaten Tangerang. Angka telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 42,68 % atau 105 desa, dengan capaian sebesar 100%, yang tergolong sangat baik.

Peningkatan signifikan dalam jumlah desa mandiri bukan hanya menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah, tetapi juga berkontribusi langsung dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun, yang menjadi ukuran utama dalam menilai kesejahteraan dan kemajuan desa di Indonesia. Target Indeks Desa Membangun Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 0.7853, dengan realisasi mencapai target, yaitu 0.7853. Capaian ini menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 100%, yang mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dalam pembangunan desa dibandingkan dengan perencanaan awal.

Faktor Keberhasilan pencapaian target

1. **Program PROSPEK (Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah)**

Program unggulan Pemkab Tangerang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan UMKM, kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan industri berbasis potensi lokal di desa.

2. **Program Desa Mandiri Pangan**

Program pengembangan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan di sejumlah desa untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi desa.

3. **Program Pengentasan Kemiskinan di 50 Desa**

Program kolaborasi pemerintah daerah dengan berbagai pihak (akademisi dan swasta) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi dan inovasi produk lokal.

4. **Desa Awards Kabupaten Tangerang**

Program penghargaan bagi desa berprestasi untuk mendorong inovasi desa, tata kelola pemerintahan desa, desa digital, BUMDes, dan pelayanan publik desa.

5. **Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa**

Program peningkatan kapasitas kepala desa dan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar pembangunan desa lebih efektif.

6. **Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif Desa dan UMKM**

Program pembangunan pusat pemberdayaan UMKM dan industri kecil (IKM) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

7. **Program Pasar Murah di Setiap Kecamatan**

Program stabilisasi ekonomi masyarakat desa melalui penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau secara berkala.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. **Melanjutkan dan memperluas program pemberdayaan ekonomi desa**

Program pemberdayaan ekonomi desa terus dilaksanakan untuk meningkatkan kegiatan usaha masyarakat, seperti pengembangan UMKM dan usaha produktif di desa.

2. **Peningkatan peran BUMDes**

Penguatan dan pengembangan BUMDes dilakukan agar dapat menjadi penggerak perekonomian desa serta meningkatkan pendapatan desa.

3. **Pelatihan dan pembinaan perangkat desa**

Pelatihan dan pembinaan bagi perangkat desa terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa.

4. **Pengembangan pelayanan desa berbasis digital**

Pemanfaatan teknologi digital di desa terus didorong untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi administrasi desa.

5. **Pengembangan potensi dan produk unggulan desa**

Potensi lokal desa terus dikembangkan, termasuk peningkatan kualitas dan pemasaran produk unggulan desa agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

6. **Peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak**

7. Kerja sama dengan perguruan tinggi, sektor swasta, dan berbagai lembaga lainnya terus diperkuat guna mendukung pembangunan dan pengembangan desa.

8. **Pemberian penghargaan kepada desa berprestasi**

Pemberian penghargaan dan dukungan kepada desa yang menunjukkan kinerja baik dilakukan untuk mendorong desa lain meningkatkan pembangunan dan mencapai status desa mandiri.

SASARAN 09

Meningkatnya
Ketahanan Pangan

TINGKAT EFISIENSI SASARAN STRATEGIS 09

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan didukung oleh 4 program :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

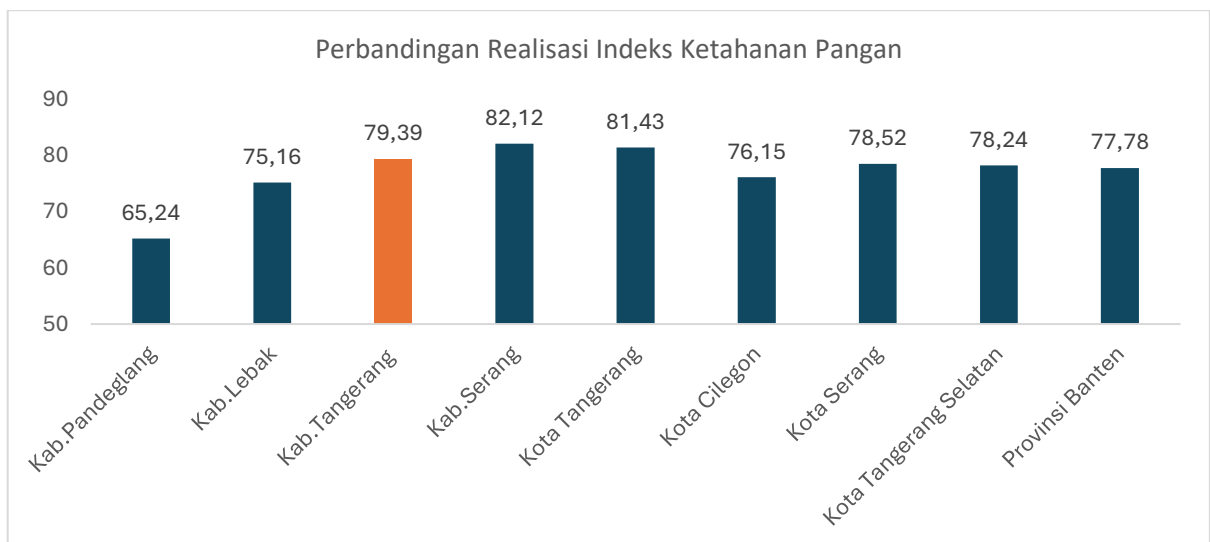
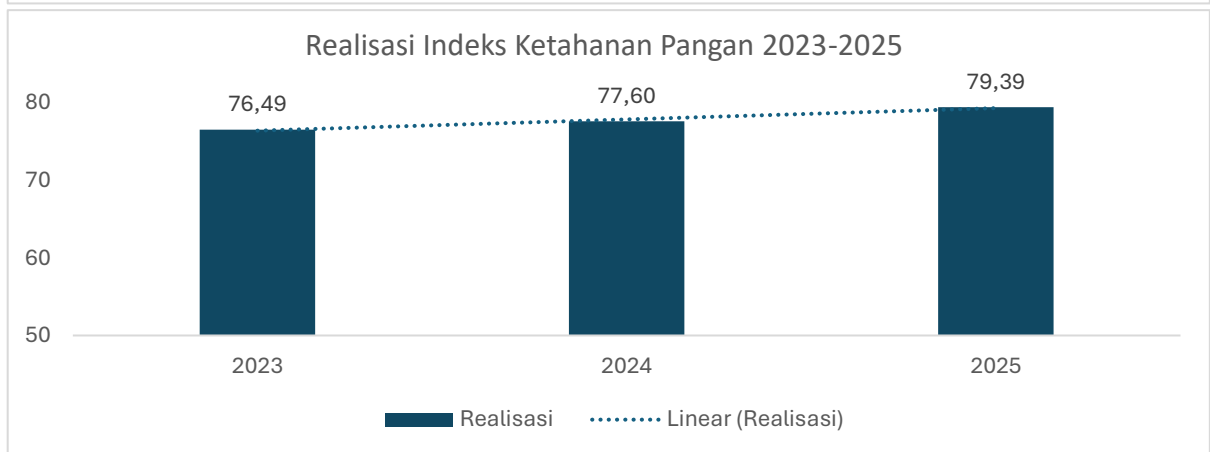
Rata-rata capaian realisasi anggaran program pada Sasaran Strategis tersebut tercatat sebesar 94,75% dari total pagu anggaran program yang telah ditetapkan. Secara agregat, realisasi anggaran pada sasaran strategis mencapai Rp. 9.072.110.547,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 9.523.414.830,- atau setara dengan 95,26%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis telah berjalan dengan tingkat penyerapan anggaran yang cukup tinggi.

Sementara itu, rata-rata capaian kinerja indikator sasaran strategis tercatat sebesar 101,78%, yang menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis tersebut dapat tercapai bahkan melampaui target yang direncanakan. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja dengan tingkat realisasi anggaran, terlihat bahwa capaian kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran.

Berdasarkan perbandingan tersebut, diperoleh **tingkat efisiensi sebesar 6%**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan tingkat pemanfaatan anggaran sebesar 95,26%, program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelolaan program dan kegiatan pada sasaran strategis tersebut dapat dinilai telah memberikan hasil yang optimal dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

INDEKS KETAHANAN PANGAN

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
78	79,39	101,78%	78,50



Sumber: Lumbung Data Provinsi Banten berdasarkan Badan Pangan Nasional, 2025

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan target sebesar 78, realisasi indeks pada tahun 2025 tercatat sebesar 79,39 sehingga capaian kinerja mencapai 101,78%. Capaian ini tidak hanya berhasil melampaui target tahunan, tetapi juga telah melampaui target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 78,50. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan dan program ketahanan pangan daerah telah berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

Jika dilihat dari tren tiga tahun terakhir, indeks ketahanan pangan Kabupaten Tangerang menunjukkan pola peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2023 nilai indeks tercatat sebesar 76,49, kemudian meningkat menjadi 77,60 pada tahun 2024, dan kembali meningkat signifikan menjadi 79,39 pada tahun 2025. Kenaikan yang berkelanjutan ini menunjukkan adanya perbaikan yang nyata pada aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Peningkatan tersebut juga mengindikasikan bahwa berbagai intervensi program ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah daerah mulai memberikan hasil yang optimal.

Dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2025 yang telah melampaui target akhir RPD Tahun 2026 menunjukkan percepatan kinerja pembangunan sektor ketahanan pangan. Hal ini menjadi indikator bahwa strategi yang diterapkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan kualitas ketahanan pangan daerah. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Tangerang berada pada posisi yang semakin kuat dalam menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara struktural, peningkatan indeks ketahanan pangan tidak terlepas dari penguatan pada tiga pilar utama, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan relatif terjaga melalui penguatan cadangan pangan daerah serta kelancaran distribusi antarwilayah. Dari sisi akses, daya beli masyarakat yang relatif stabil turut mendukung kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan yang cukup. Sementara itu, pada aspek pemanfaatan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan bergizi dan beragam turut mendorong peningkatan kualitas konsumsi pangan.

Meskipun capaian tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, tantangan ke depan tetap perlu diantisipasi. Urbanisasi dan alih fungsi lahan pertanian masih menjadi risiko terhadap ketersediaan pangan lokal, sementara ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah masih cukup tinggi. Selain itu, faktor perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan juga berpotensi memengaruhi stabilitas ketahanan pangan. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi capaian yang telah diraih.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, melampaui target, dan berada pada tren yang meningkat. Ke depan, penguatan produksi pangan lokal, peningkatan efisiensi distribusi, penguatan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan ketahanan pangan daerah agar tetap kuat dan berdaya saing.

Faktor Keberhasilan pencapaian target

- 1. Kerja sama pengelolaan cadangan pangan daerah (CPPD):** Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjalin kerja sama dengan Perum Bulog Cabang Tangerang untuk mengelola cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD). Kerja sama ini bertujuan menjaga ketersediaan beras sebagai cadangan pangan daerah untuk menghadapi kekurangan pangan, gejolak harga, atau keadaan darurat. Realisasi cadangan beras pemerintah daerah hingga tahun 2025 terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ketersediaan pangan.
- 2. Distribusi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada kelompok tani:** Pemkab Tangerang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendistribusikan 140 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani di 27 kecamatan. Bantuan ini diharapkan mampu mempercepat pengolahan tanah, mengurangi biaya produksi, mengatasi keterbatasan tenaga kerja, serta meningkatkan hasil panen yang pada akhirnya memperkuat produktivitas pangan di tingkat lokal. **Penyaluran Bantuan Pangan Beras Fortifikasi:** Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang menyalurkan beras fortifikasi ke 18 desa yang rentan rawan pangan. Tujuannya adalah menurunkan jumlah desa rentan rawan pangan dan gizi di Kabupaten Tangerang.

3. **Penyelenggaraan Tangerang Agro Festival sebagai upaya inovasi pertanian :** Pemerintah daerah menyelenggarakan Tangerang Agro Festival 2025 yang mendorong inovasi pertanian, regenerasi petani, dan penguatan ketahanan pangan. Festival ini menjadi wadah pembelajaran teknologi pertanian, kolaborasi antarstakeholder, serta pengembangan wirausaha pangan. Kegiatan ini memperkuat partisipasi masyarakat terutama generasi muda dalam sektor pertanian.
4. **Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM):** Pemkab Tangerang mengadakan Lomba Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dengan tujuan meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan pangan berbasis komunitas. LPM diarahkan menjadi pilar ketahanan pangan di tingkat lokal dengan strategi pengelolaan cadangan dan pemberdayaan masyarakat.
5. **Penyaluran bantuan pangan kepada kelompok rentan:** Pemerintah daerah juga melakukan penyaluran beras bantuan pangan kepada warga di desa-desa yang masuk dalam kategori rentan rawan pangan. Bantuan ini penting untuk memastikan keluarga berpendapatan rendah tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar pangannya, terutama pada kelompok desa yang memiliki kerawanan pangan lebih tinggi.
6. **Penyaluran Bantuan Pangan Beras untuk kelompok rentan masyarakat:** Kabupaten Tangerang bersama Bulog menyelesaikan 100% penyaluran bantuan pangan beras untuk periode Juni–Juli 2025. Penyaluran ini mencakup ribuan keluarga penerima manfaat yang mendapat alokasi beras sehingga membantu menjaga daya beli masyarakat dan kebutuhan pokok mereka.
7. **Sosialisasi penanganan kerawanan pangan di desa/kelurahan :** Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi penanganan kerawanan pangan berdasarkan pemetaan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). Forum ini melibatkan lintas OPD untuk menyusun rekomendasi intervensi seperti pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lumbung pangan desa.

Seiring dengan capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang tahun 2025 yang telah melampaui target dan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terdapat beberapa tantangan strategis yang tetap perlu diantisipasi untuk menjaga keberlanjutan kinerja tersebut ke depan antara lain:

1. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Kabupaten Tangerang terus mengalami urbanisasi yang pesat, menyebabkan banyak lahan pertanian beralih fungsi menjadi area pemukiman dan industri. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya produksi pangan lokal, sehingga ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah semakin meningkat.

2. Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Produksi Pangan

Faktor cuaca dan perubahan iklim menjadi tantangan utama dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan. Intensitas hujan yang tinggi, kekeringan, serta perubahan pola musim dapat mengganggu produksi pangan lokal. Jika tidak diantisipasi dengan baik, hal ini dapat menyebabkan fluktuasi harga pangan dan berkurangnya ketersediaan bahan pangan pokok.

3. Kualitas Gizi dan Diversifikasi Pangan

Meskipun ketersediaan pangan di Kabupaten Tangerang relatif stabil, tantangan selanjutnya adalah bagaimana memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat memiliki kandungan gizi yang cukup. Diversifikasi pangan dan peningkatan konsumsi bahan pangan lokal yang bernutrisi tinggi perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Peningkatan Produksi Pangan Lokal

- Mendorong program pertanian berkelanjutan dengan penggunaan teknologi modern, seperti pertanian hidroponik dan pertanian berbasis digital.
- Meningkatkan insentif dan dukungan kepada petani lokal untuk memperluas area pertanian dan meningkatkan produktivitas lahan yang ada.
- Memanfaatkan lahan-lahan marginal untuk dijadikan lahan produktif guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.

2. Penguatan Distribusi dan Akses Pangan

- Meningkatkan efisiensi rantai pasok dan infrastruktur distribusi pangan agar harga tetap stabil dan akses pangan merata di seluruh wilayah.
- Mengembangkan pasar pangan lokal yang dapat mendukung petani dan produsen pangan dalam memasarkan hasil panennya.

- Mendorong kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memastikan ketersediaan pangan di daerah-daerah yang rawan pangan.

3. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

- Mengembangkan sistem pertanian yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, seperti penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem.
- Memanfaatkan sistem irigasi yang lebih efisien untuk mengantisipasi risiko kekeringan.
- Menggalakkan program penghijauan dan konservasi lingkungan guna menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian.

4. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

- Mendorong pola konsumsi yang lebih sehat dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang dan diversifikasi pangan.
- Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan dan mendorong pemanfaatan pangan lokal yang lebih beragam.
- Mengembangkan program ketahanan pangan berbasis masyarakat, seperti kebun pangan rumah tangga dan urban farming.

SASARAN 10

Meningkatnya Daya

Saing Tenaga Kerja

TINGKAT EFISIENSI SASARAN STRATEGIS 10

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya daya saing tenaga kerja didukung oleh 5 program :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

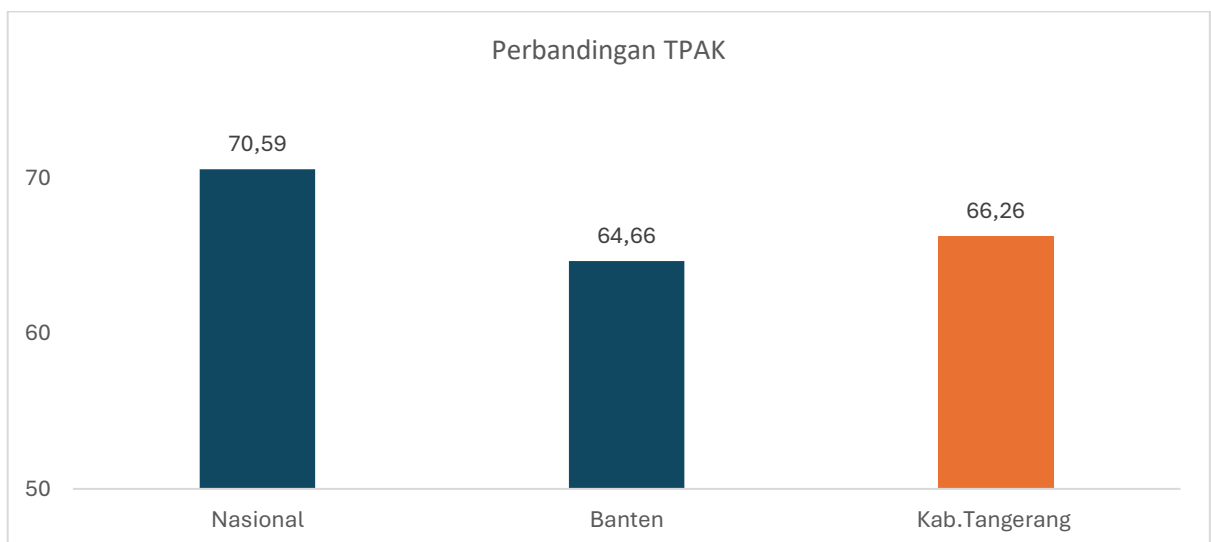
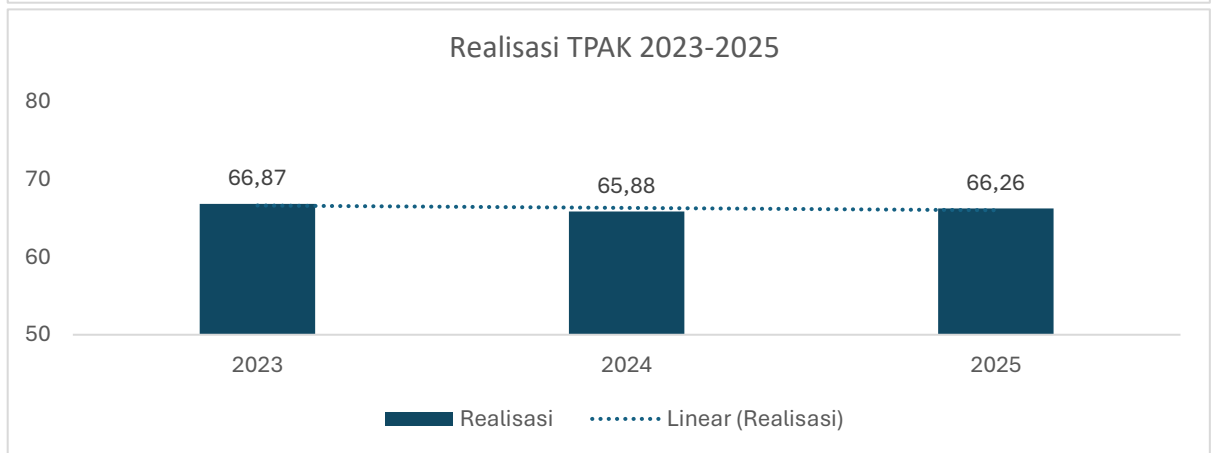
Rata-rata capaian realisasi anggaran program pada Sasaran Strategis tersebut tercatat sebesar 96,84% dari total pagu anggaran program yang telah ditetapkan. Secara agregat, realisasi anggaran pada sasaran strategis mencapai Rp20.428.857.415 dari total pagu anggaran sebesar Rp21.740.759.590, atau setara dengan 93,97%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis telah berjalan dengan tingkat penyerapan anggaran yang cukup tinggi.

Sementara itu, rata-rata capaian kinerja indikator sasaran strategis tercatat sebesar 97,66%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis tersebut dapat tercapai dengan sangat baik. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja dengan tingkat realisasi anggaran, terlihat bahwa capaian kinerja yang dihasilkan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran strategis tersebut telah berjalan secara cukup efisien dan efektif, karena dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,97% mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 97,66%. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran pada sasaran strategis tersebut dapat dinilai telah memberikan hasil yang optimal dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

TINGKAT PARTISPASI ANGKATAN KERJA

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
67.85	66.26	97.66%	68.65



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, yang merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar partisipasi penduduk usia kerja dalam dunia kerja. TPAK dihitung dengan membandingkan jumlah angkatan kerja dengan total jumlah penduduk usia kerja. Secara rinci rumus tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

$$\text{TPAK} = \text{jumlah angkatan kerja} / \text{jumlah penduduk 15 tahun ke atas} \times 100\%$$

TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tingkat Partisipasi Angakatan Kerja pada tahun 2025 dari target sebesar 68,25 % terealisasi 66,26% dengan capaian kinerja sebesar 97,08 %. Berdasarkan data Sakernas Tahun 2025 kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Penduduk Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Angkatan Kerja	1.110.105	618.837	1.728.942
1.1	Bekerja	1.047.459	578.768	1.626.227
1.2	Pengangguran	62.646	40.069	102.715
2	Bukan Angkatan Kerja	217.085	663.205	880.290
	Jumlah	1.327.190	1.272.042	2.609.232
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,64	6,47	5,94
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	83,64	48,27	66,26

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

Selama 3 tahun terakhir 2023-2025 angka tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami fluktuasi dimana tahun 2025 sebesar 66,26 % naik dibandingkan tahun 2024 sebesar 65,88% ini menggambarkan dari 100 orang angkatan kerja terdapat 66 hingga 67

orang yang aktif secara ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian baik mereka yang bekerja maupun mereka yang mencari pekerjaan.

TPAK Kabupaten Tangerang tahun 2025 sebesar 66,26 % di sedangkan TPAK Provinsi Banten sebesar 64,66% dan Nasional 70,59% %. Tingginya TPAK Kabupaten Tangerang dibanding rata-rata Banten menunjukkan bahwa wilayah ini adalah menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi di provinsi Banten.

Hasil survei angkatan kerja nasional (sakernas) Oleh BPS mencatat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tangerang mencapai 66,26 %. Mengindikasikan besarnya persentase penduduk yang aktif secara ekonomi, dari 2.609.232 jumlah penduduk usia kerja produktif (15-64 tahun) hanya 66,26 % atau 1.728.942 juta orang yang bekerja dan sedang menganggur yang aktif secara ekonomi dan masih terdapat 33,74 % atau 880.290 ribu orang usia produktif yang tidak aktif secara ekonomi dimana mayoritas dari mereka adalah mengurus rumah tangga dan masih sekolah.

Upaya yang dilaksanakan dalam optimalisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Sebagai Berikut :

1. Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat. Tahun 2025 UPT Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi maupun berbasis masyarakat bagi pencari kerja berjumlah 1760 Orang.

Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat

No	Program	Jenis Kelamin		Total
		Laki - Laki	Perempuan	
1	Bahasa Inggris	8	8	16
2	Bahasa Jepang	5	11	16
3	Bahasa Korea	8	24	32
4	Bahasa Mandarin	7	9	16
5	Barista	31	17	48
6	Basic Office	37	75	112
7	Cleaning Service	13	3	16

No	Program	Jenis Kelamin		Total
		Laki - Laki	Perempuan	
8	Desain Grafis	25	7	32
9	Digital Marketing	17	15	32
10	Instalasi Listrik Rumah Sederhana	48		48
11	Kuliner		64	64
12	Las Pabrikasi	16		16
13	Membatik	3	29	32
14	Menjahit Alas Kaki	69	91	160
15	Menjahit Garment	12	36	48
16	Menjahit Kebutuhan Rumah Tangga	3	29	32
17	Menjahit Pakaian	30	306	336
18	Multimedia	7	25	32
19	Operator Forklift	160		160
20	Otomotif Sepeda Motor	224		224
21	Pangkas Rambut	16		16
22	Pemeliharaan Ac	48		48
23	Pengolahan Tempe	11	5	16
24	Sablon	28	4	32
25	Smaw 2F	96	16	114
26	Tata Rias Wajah		48	48
27	Teknisi AC	16		16
	Grand Total	940	822	1760

Selain menggunakan dana APBD Dinas Tenaga Kerja melakukan kerjasama pelatihan dengan Lembaga atau organisasi berjumlah 60 orang Kerjasama pelatihan dengan lembaga terkait seperti terlihat dalam tabel dibawah ini:

Kerjasama Pelatihan dengan Lembaga/Organisasi tahun 2025

No	Nama Pelatihan	Sumber Dana	Jumlah
1.	Pelatihan satuan pengamanan (satpam)	CSR PIK 2	50
2.	Pelatihan Service Ac	CSR PIK 2	20

2. Melalui Perluasan Kesempatan Kerja

Selain melaksanakan pelatihan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 melaksanakan perluasan kesempatan kerja Melalui kegiatan Pembentukan wira usaha baru

Pembentukan Wira Usaha Baru

No.	Bidang	Jumlah Kelompok	Peserta	Angkatan	Lokasi/Pelatihan	Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Menjahit	4	16	1	Sindang Asih Kec. Sindang Jaya	Sindang Jaya
2	Menjahit	4	16	1	Desa Mekar Jaya Kec. Panongan	Panongan
3	Menjahit	4	16	1	Desa Kebun cau dan Desa Teluk Naga	Teluk Naga
4	Menjahit	4	16	1	Yayasan Nurul Ihsan Desa Rancailat Kresek	Kresek
5	Menjahit	4	16	1	Kp. Waru Desa Sukaharja	Sukamantri Pasarkemis
6	Menjahit	4	16	1	Desa Kiara Payung Kec. Pakuhaji	Pakuahaji
7	Menjahit	4	16	1	Desa Cikuya Kec. Solear	Solear
8	Menjahit	4	16	1	Desa Sukamanah Kec. Rajeg	Rajeg
9	Menjahit	4	16	1	Desa Daon Kec. Rajeg	Rajeg

No.	Bidang	Jumlah Kelompok	Peserta	Angkatan	Lokasi/Pelatihan	Kecamatan
10	Menjahit	4	16	1	Kampung Besar Kec. Teluknaga	Teluknaga
11	Menjahit	4	16	1	Desa Ranca Gede Kec. Gunung Kaler	Gunung Kaler
12	Menjahit	4	16	1	Sindang Sono Kec. Sindang Jaya	Sindang Jaya
13	Menjahit	4	16	1	Desa Lebak Wangi Kec. Sepatan Timur	Sepatan Timur
14	Menjahit	4	16	1	Desa Pangarengan Kec. Rajeg	Rajeg
15	Bengkel Otomotif	4	16	1	Desa Pangarengan Kec. Rajeg	Rajeg
16	Bengkel Otomotif	4	16	1	Desa Kiara Payung Kec. Pakuhaji	Pakuhaji
17	Bengkel Otomotif	4	16	1	Desa Lebak Wangi Kec. Sepatan Timur	Sepatan Timur
18	Bengkel Otomotif	4	16	1	Sindang Sono Kec. Sindang Jaya	Sindang Jaya
19	Bengkel Otomotif	4	16	1	Desa Ranca Gede Kec. Gunung Kaler	Gunung Kaler
20	Bengkel Otomotif	4	16	1	Desa Sindang Asih Kec. Sindang Jaya	Sindang Jaya
21	Bengkel Otomotif	4	16	1	Kp. Gelam Timur Rt. 006/003 Desa Gelam Jaya	Pasarkemis
22	Bengkel Otomotif	4	16	1	Desa Daon Kec. Rajeg	Rajeg
23	Bengkel Otomotif	4	16	1	Desa Tanjakan Mekar Kec. Rajeg	Rajeg

No.	Bidang	Jumlah Kelompok	Peserta	Angkatan	Lokasi/Pelatihan	Kecamatan
24	Bengkel Otomotif	4	16	1	Desa Mekar Jaya Kec. Panongan	Panongan
25	Bengkel Otomotif	4	16	1	Desa Sukamurni Kec. Balaraja	Balaraja
26	Bengkel Otomotif	4	16	1	Desa Jati Mulya Kec. Sepatan Timur	Sepatan Timur
27	Bengkel Otomotif	4	16	1	Desa Rawa Kidang Kec. Sukadiri	Sukadiri
28	Las Listrik	8	16	1	Desa Jambu Karya Kec. Rajeg	Rajeg
29	Las Listrik	8	16	1	Desa Cibugel Kecamatan Cisoka	Cisoka
30	Las Listrik	8	16	1	Desa Surya Bahari Kec. Pakuhaji	Paku haji
31	Las Listrik	8	16	1	Desa Kohod Kec. Paku haji	Paku haji
32	Membatik	8	16	1	Desa Cikuya Kec. Solear	Solear
33	Pemeliharaan AC	8	16	1	Kampung Besar Kec. Teluknaga	Teluknaga
34	Kuliner Tataboga	4	16	1	Desa Daon Kec. Rajeg	Rajeg
35	Kuliner Tataboga	4	16	1	Desa Sukamanah Kec. Rajeg	Rajeg
36	Sablon Printing	1	16	1	Desa Sodong kec. Tigaraksa	Tigaraksa
37	Sablon Printing	4	16	1	Kp. Salembaran Desa Cengklong	Kosambi

No.	Bidang	Jumlah Kelompok	Peserta	Angkatan	Lokasi/Pelatihan	Kecamatan
38	Pembuatan Tempe	4	16	1	Disabilitas	Cikupa
39	Rias kecantikan	8	16	1	Rancagede	Gunung Kaler
40	Membatik	4	16	1	Rajeg Mulya	Rajeg
41	Kuliner	4	16	1	Waliwis	Mekar Baru
42	Kuliner	4	16	1	Waliwis	Mekar Baru
43	Menjahit	4	16	1	Rajeg Mulya	Rajeg
	JUMLAH	197	688	43		

Faktor kegagalan pencapaian target

1. Perubahan Struktur Ekonomi

- Berkurangnya peluang kerja di sektor padat karya (misalnya industri manufaktur yang mengalami otomatisasi).
- Pergeseran dari sektor formal ke informal yang tidak tercatat dalam survei ketenagakerjaan.

2. Tingkat Pengangguran yang Masih Tinggi

- Kabupaten Tangerang memiliki kawasan industri yang cukup besar, namun persaingan kerja yang ketat serta dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa memengaruhi angka TPAK.
- Tingginya kebutuhan keterampilan baru akibat perubahan industri menyebabkan tidak semua tenaga kerja dapat bersaing.

3. Faktor Sosial dan Demografi

- Bertambahnya jumlah penduduk usia tidak produktif atau meningkatnya angka putus sekolah dan tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi.
- Meningkatnya jumlah ibu rumah tangga yang memilih untuk tidak bekerja karena kondisi sosial-ekonomi.

4. Kurangnya Akses dan Peluang Kerja bagi Masyarakat Lokal

- Tidak meratanya informasi terkait peluang kerja dan pelatihan keterampilan.
- Kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Penguatan Program Pelatihan dan Upskilling

Meningkatkan akses pelatihan keterampilan berbasis industri 4.0, seperti digital marketing, data analytics, dan manufaktur modern serta kolaborasi dengan perusahaan di Tangerang untuk program magang dan rekrutmen tenaga kerja lokal.

2. Mendorong Sektor UMKM dan Wirausaha

Memberikan dukungan modal dan pendampingan bagi UMKM agar lebih banyak menciptakan lapangan kerja serta mempermudah akses permodalan bagi pengusaha kecil dan startup lokal.

3. Peningkatan Keterlibatan Perempuan dan Generasi Muda di Pasar Kerja

Program kerja fleksibel bagi perempuan yang ingin bekerja sambil mengurus keluarga dan Pelatihan kerja bagi anak muda agar lebih siap memasuki dunia kerja.

4. Peningkatan Investasi dan Insentif bagi Perusahaan

Menarik lebih banyak investasi di sektor manufaktur dan teknologi untuk menciptakan lapangan kerja baru serta Insentif pajak bagi perusahaan yang menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.

5. Penguatan Sistem Informasi Pasar Kerja

Optimalisasi platform digital dan bursa kerja online untuk menjembatani pencari kerja dengan perusahaan serta mengadakan job fair rutin dan memperluas layanan bimbingan karir.

SASARAN 11

Meningkatnya Cakupan
Penanganan PPKS

TINGKAT EFISIENSI SASARAN STRATEGIS 11

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya cakupan penanganan PPKS didukung oleh 5 program :

1. Program pemberdayaan sosial
2. Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
3. Program rehabilitasi sosial
4. Program perlindungan dan jaminan sosial
5. Program penanganan bencana

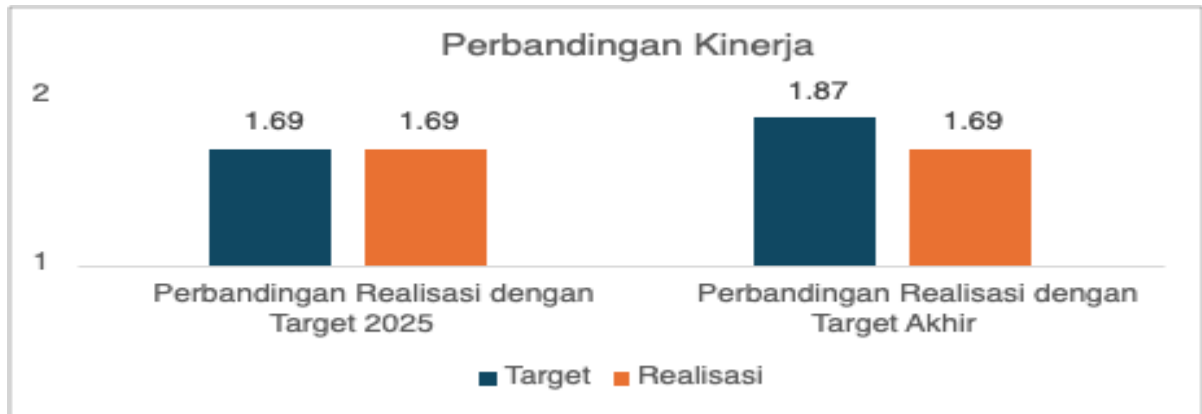
Sasaran meningkatnya cakupan penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp62.126.040.154,00 yang digunakan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka penanganan serta peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp61.375.984.603,00 atau 98,79% dari total anggaran yang telah dialokasikan. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung penanganan PPKS telah berjalan secara optimal.

Dari sisi kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran tersebut menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam upaya peningkatan cakupan penanganan PPKS dapat direalisasikan secara penuh sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

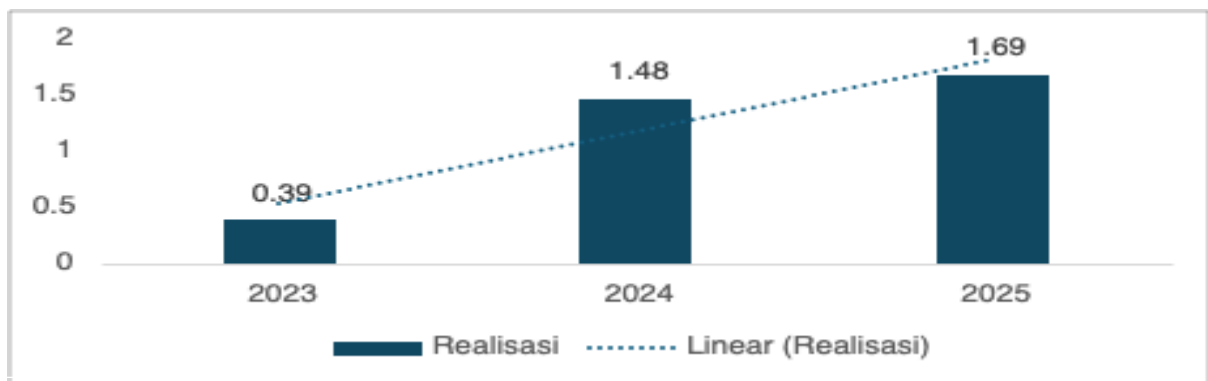
Apabila dibandingkan antara capaian realisasi anggaran sebesar 98,79% dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 100%, terlihat bahwa capaian kinerja yang dihasilkan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung penanganan PPKS telah berjalan cukup efisien, karena dengan tingkat penggunaan anggaran yang hampir seluruhnya terserap, target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Hal ini mencerminkan bahwa pemanfaatan sumber daya anggaran telah memberikan kontribusi yang baik terhadap pencapaian sasaran peningkatan cakupan penanganan PPKS.

PERSENTASE PPKS YANG BERDAYA

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
1.69	1.69	100.00%	1.87



Perbandingan Realisasi PPKS yang Berdaya Tahun 2023 - 2025



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, 2025

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemberdayaan Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa kelompok rentan di masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai kesempatan ekonomi, pendidikan, serta layanan sosial.

PPKS mencakup berbagai kelompok rentan, seperti anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, korban tindak kekerasan, warga miskin, serta fakir miskin. Berdasarkan data terbaru, jumlah total PPKS desil 1 yang terdaftar di wilayah ini mencapai 61.685 orang. Pemerintah dan berbagai pihak terkait terus berupaya agar sebanyak mungkin dari mereka dapat berdaya secara ekonomi dan sosial, sehingga

mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka secara mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan.

Capaian indikator telah memenuhi target tahun berjalan sebesar 100%, dengan realisasi 1,69 dari target 1,69 atau sejumlah 1.044 orang. Namun demikian, untuk mencapai target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 1,87, masih diperlukan peningkatan sebesar 0,18 poin. Oleh karena itu, diperlukan upaya percepatan dan penguatan program/kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan indikator dimaksud agar target akhir dapat tercapai sesuai waktu yang ditetapkan. Namun, jika di lihat dari realisasi pertahun menunjukan tren positif atas ketercapaian target kinerja. Hal ini mencerminkan efektivitas berbagai program yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pelatihan keterampilan, penguatan usaha mikro, bantuan sosial produktif, dan peningkatan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan.

Faktor Keberhasilan pencapaian target

1. Penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan bagi PPKS

Pemerintah Kabupaten Tangerang bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan organisasi masyarakat menyalurkan bantuan kepada kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Bantuan tersebut diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian sosial masyarakat rentan, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemberdayaan sosial agar PPKS dapat kembali berfungsi secara sosial dan ekonomi di masyarakat.

2. Program pemberdayaan sosial untuk meningkatkan kemandirian Masyarakat

Dinas Sosial Kabupaten Tangerang melaksanakan berbagai program pemberdayaan sosial yang bertujuan mendorong masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial. Melalui dukungan program pemberdayaan dan pendampingan, masyarakat diharapkan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga mampu keluar dari permasalahan sosial dan menjadi masyarakat yang berdaya.

3. Penanganan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Pemerintah daerah juga melakukan penertiban dan penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti pengemis, anak jalanan, dan kelompok rentan lainnya. Penanganan ini bertujuan memberikan pembinaan, rehabilitasi sosial, serta

pendampingan agar mereka dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

4. Penyaluran bantuan dan dukungan bagi PPKS di berbagai wilayah

Sepanjang tahun 2025, berbagai bantuan sosial dan program dukungan bagi PPKS terus disalurkan di wilayah Kabupaten Tangerang. Program ini menjangkau ratusan penerima manfaat di berbagai kecamatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, memberikan akses bantuan, serta mendorong kemandirian kelompok rentan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut dan memastikan lebih banyak PPKS yang dapat berdaya, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Meningkatkan Akses Pelatihan dan Pendidikan Vokasi

- Menyediakan pelatihan keterampilan berbasis industri, teknologi, dan kewirausahaan bagi PPKS agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Membangun kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan perusahaan untuk menyediakan program magang dan sertifikasi bagi kelompok rentan.

2. Mendorong Kewirausahaan Sosial bagi PPKS

- Memberikan bantuan modal usaha serta pendampingan bagi PPKS yang ingin memulai usaha kecil dan menengah (UMKM).
- Mengembangkan program inkubasi bisnis yang didukung oleh pemerintah dan sektor swasta untuk membantu PPKS mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan.

3. Meningkatkan Peran Dunia Usaha dan Industri

- Mendorong kebijakan rekrutmen inklusif di perusahaan-perusahaan agar lebih banyak PPKS yang mendapatkan kesempatan bekerja di sektor formal.
- Memberikan insentif pajak atau subsidi kepada perusahaan yang aktif mempekerjakan dan memberdayakan PPKS.

4. Memperkuat Program Pendampingan dan Monitoring

- Membentuk tim pendamping sosial yang secara aktif membantu PPKS dalam proses transisi menuju kemandirian.
- Mengembangkan sistem monitoring berbasis data untuk memastikan bahwa PPKS yang telah diberdayakan tetap berada dalam kondisi yang stabil dan mandiri.

5. Optimalisasi Program Bantuan Sosial Produktif

- Mengubah pola pemberian bantuan sosial dari yang bersifat konsumtif menjadi bantuan yang lebih produktif, seperti modal usaha, alat kerja, dan akses pembiayaan mikro.
- Memastikan bahwa bantuan yang diberikan memiliki dampak jangka panjang dan tidak hanya menyelesaikan masalah dalam waktu singkat.

SASARAN 12

**Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintah**

TINGKAT EFISIENSI SASARAN STRATEGIS 12

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah didukung oleh 28 program :

1. Program pendaftaran penduduk
2. Program pencatatan sipil
3. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
4. Program pengelolaan profil kependudukan
5. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
6. Program pengelolaan aplikasi informatika
7. Program penyelenggaraan statistik sektoral
8. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
9. Program pengelolaan arsip
10. Program perizinan penggunaan arsip
11. Program perlindungan dan penyelamatan arsip
12. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
13. Program perekonomian dan pembangunan
14. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd
15. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
16. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
17. Program pengelolaan keuangan daerah
18. Program pengelolaan barang milik daerah
19. Program pengelolaan pendapatan daerah
20. Program kepegawaian daerah
21. Program pengembangan sumber daya manusia
22. Program penelitian dan pengembangan daerah
23. Program penyelenggaraan pengawasan
24. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
25. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
26. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
27. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
28. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Sasaran meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp5.728.095.791.260,32 yang digunakan untuk mendukung berbagai

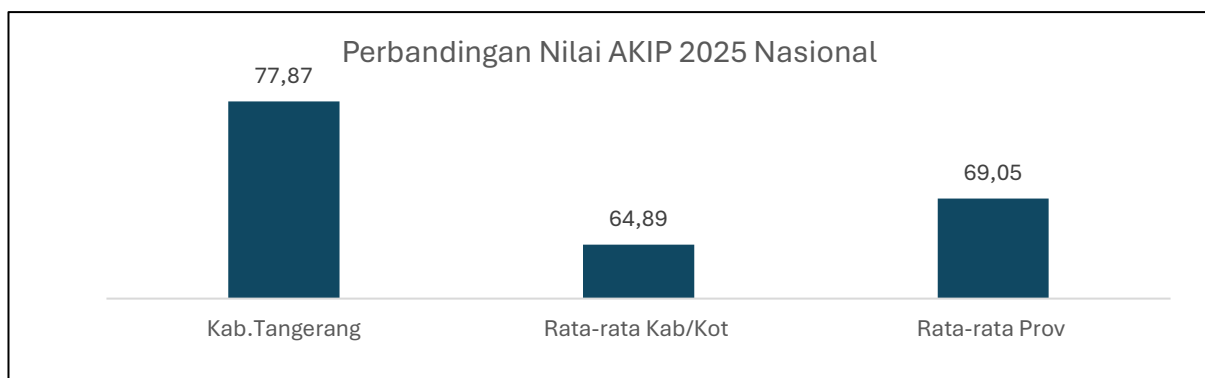
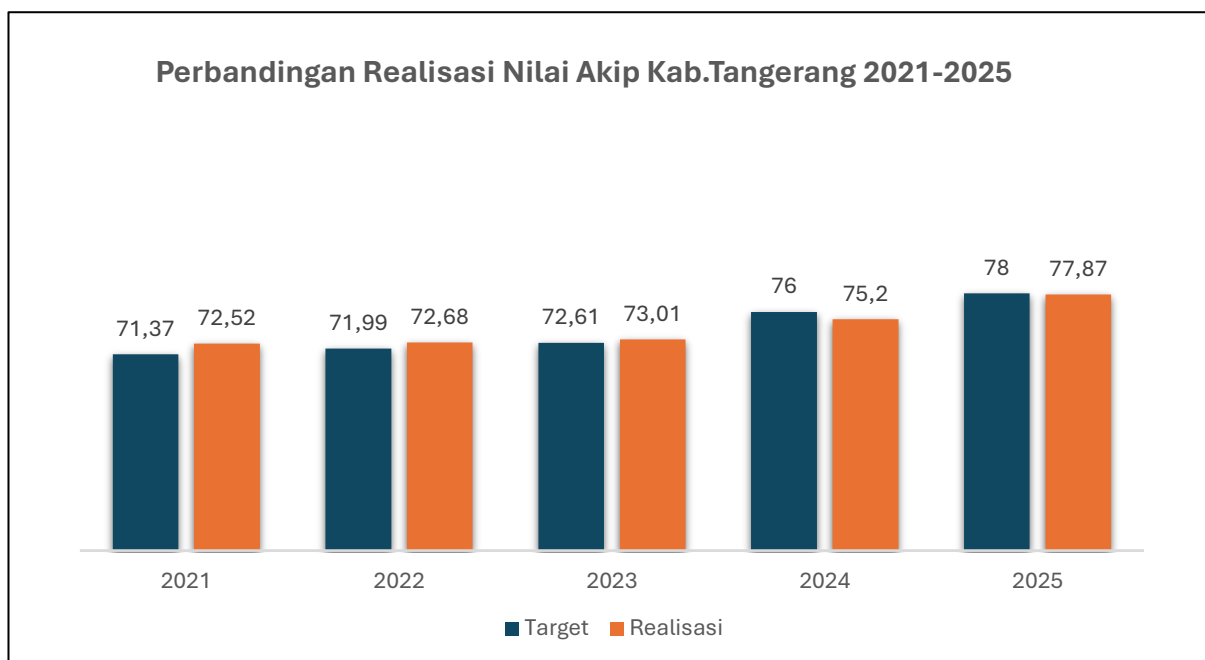
program dan kegiatan dalam rangka penguatan sistem pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan aparatur. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp5.495.788.734.824,00 atau 95,94% dari total anggaran yang telah dialokasikan. Tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran tersebut.

Dari sisi kinerja, pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menunjukkan capaian yang sangat baik. Hal ini tercermin dari rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 104,85%, yang menunjukkan bahwa secara umum realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut menggambarkan adanya peningkatan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, baik dari aspek penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Apabila dibandingkan antara capaian realisasi anggaran sebesar 95,94% dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 104,85%, terlihat bahwa capaian kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran tersebut telah berjalan efisien, karena dengan tingkat penggunaan anggaran yang tidak sepenuhnya terserap, kinerja yang dihasilkan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan pengelolaan sumber daya yang cukup optimal dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

NILAI SAKIP

arget	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
78	77,87	99,8%	80,5



Sumber: LHE SAKIP Kementerian PANRB, 2026

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Nilai AKIP diperoleh dari hasil evaluasi akip yang dilakukan oleh Kementerian PANRB kepada setiap instansi pemerintah, Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Realisasi nilai SAKIP pada tahun ini mencapai 77,87, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 78. Meskipun tidak sepenuhnya memenuhi target, capaian kinerja masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 99,8%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya dalam meningkatkan efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai target yang lebih tinggi. Ke depan, dengan target akhir RPD sebesar 80,5, diperlukan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintahan agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30-50	Kurang
7	D	>0-30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa nilai sebesar **77.87 (sumber. KemenPANRB RI)** dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik". yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama. namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2024	2025
a. Perencanaan Kinerja	30	25,00	25,64
b. Pengukuran Kinerja	30	18,55	19,83
c. Pelaporan Kinerja	15	12,02	12,24
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,63	20,16
Nilai Hasil Evaluasi	100	75,20	77,87
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Faktor Kegagalan pencapaian target

Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 78 pada tahun pelaporan belum sepenuhnya tercapai, dengan realisasi sebesar 77,87. Selisih yang relatif kecil tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa catatan perbaikan, antara lain penyempurnaan indikator kinerja agar lebih selaras dengan sasaran strategis, peningkatan keterpaduan dokumen perencanaan dan dokumen kinerja tahunan, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Selain itu, tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi internal juga masih perlu ditingkatkan guna memperkuat kualitas implementasi manajemen kinerja.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Melakukan penyempurnaan indikator kinerja agar lebih relevan dan berorientasi pada outcome.

Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu melakukan reviu dan penyempurnaan indikator kinerja, khususnya pada indikator yang belum secara langsung mengukur hasil atau dampak pembangunan. Indikator kinerja harus disesuaikan agar mampu merepresentasikan pencapaian sasaran strategis secara lebih akurat, sehingga pengukuran kinerja dapat mencerminkan keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

2. Menyelaraskan dokumen perencanaan jangka menengah dengan dokumen perencanaan tahunan

Pemerintah daerah perlu memastikan keselarasan antara dokumen RPJMD, Renstra perangkat daerah, dan Perjanjian Kinerja tahunan. Hal ini dapat dilakukan melalui review dokumen perencanaan secara berkala, sehingga seluruh sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dapat terakomodasi secara konsisten dalam dokumen perencanaan tahunan.

3. Meningkatkan kualitas penetapan target kinerja agar lebih menantang dan mendorong peningkatan kinerja

Perangkat daerah perlu menetapkan target kinerja yang realistis namun tetap menantang, dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya serta potensi peningkatan kinerja yang dapat dicapai. Hal ini bertujuan agar target kinerja dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan dan tidak hanya mempertahankan capaian sebelumnya.

4. Melengkapi definisi operasional indikator kinerja utama (IKU)

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa seluruh indikator kinerja utama memiliki definisi operasional yang jelas, termasuk metode pengukuran, sumber data, dan satuan pengukuran. Hal ini penting untuk meningkatkan konsistensi, akurasi, dan akuntabilitas dalam proses pengukuran dan pelaporan kinerja.

5. Meningkatkan capaian kinerja unit kerja yang belum memenuhi target

Perangkat daerah perlu melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang capaian kinerjanya masih di bawah target, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, perlu dilakukan langkah perbaikan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan capaian kinerja.

6. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar pengambilan Keputusan

Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja perlu dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar dalam melakukan perbaikan perencanaan, pelaksanaan, dan penetapan target kinerja pada periode berikutnya. Hal ini bertujuan agar perencanaan kinerja lebih berbasis pada hasil evaluasi dan data kinerja yang telah dicapai sebelumnya.

7. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi internal secara tepat waktu

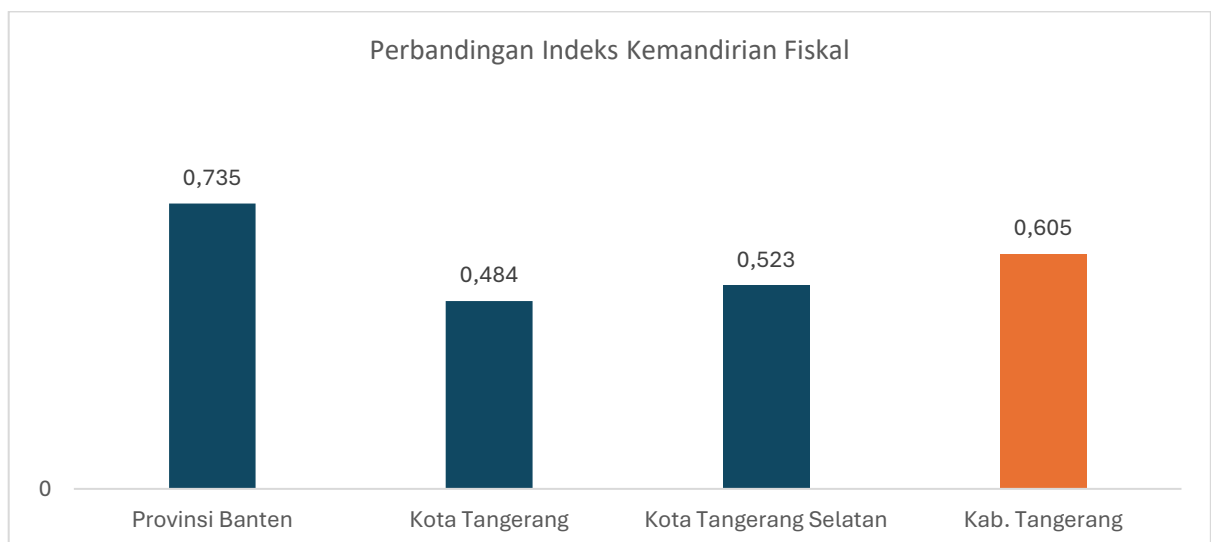
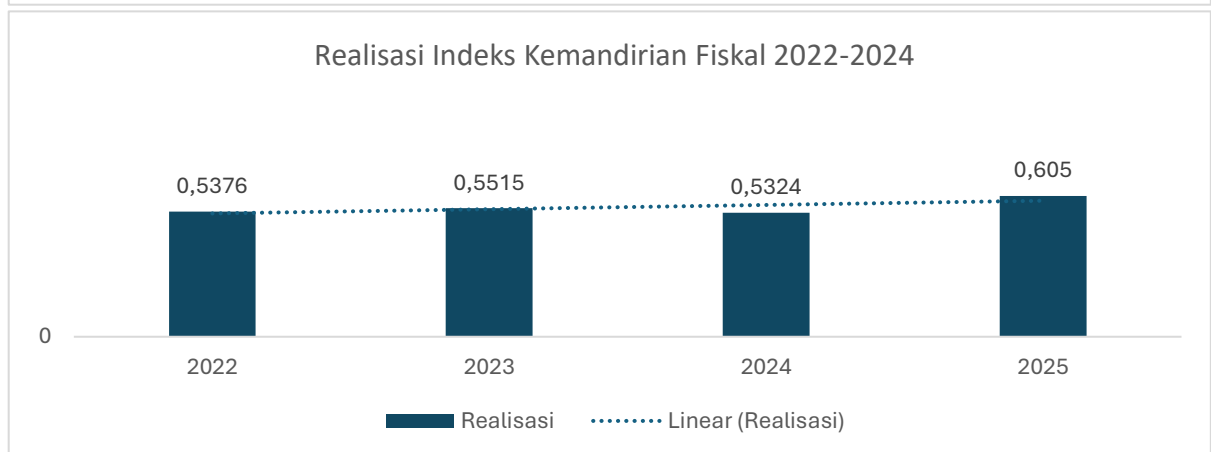
Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu memastikan bahwa seluruh rekomendasi hasil evaluasi internal, khususnya dari Inspektorat, ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah. Tindak lanjut ini penting untuk memperbaiki kelemahan dalam implementasi SAKIP dan meningkatkan kualitas manajemen kinerja secara keseluruhan.

8. Memperkuat monitoring dan evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP

Pemerintah daerah perlu meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan SAKIP di seluruh perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komponen SAKIP telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

INDEKS KEMANDIRIAN FISKAL

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
0,53	0,605	114,20%	0,53



Sumber: LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang, 2026

Berdasarkan hasil pengukuran Tahun 2025, Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Tangerang terealisasi sebesar 0,605, melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,53 dengan capaian kinerja sebesar 114,20%. Capaian ini juga telah memenuhi target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 0,53, sehingga secara kuantitatif menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Realisasi Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sebesar 0,605 menempatkan daerah pada kategori **“Mandiri”** ($0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$). Capaian ini tidak hanya melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,53, tetapi juga menunjukkan bahwa struktur fiskal daerah telah berada pada level yang relatif kuat dalam menopang pembiayaan pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara konseptual, nilai tersebut mencerminkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah telah cukup dominan, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat semakin terkendali dan ruang fleksibilitas fiskal daerah semakin luas.

Apabila dilihat dari tren tahun sebelumnya, indeks kemandirian fiskal Kabupaten Tangerang menunjukkan pola yang relatif stabil pada periode 2022–2024 (0,5376 pada 2022; 0,5515 pada 2023; dan 0,5324 pada 2024), sebelum mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025 menjadi 0,605. Kenaikan ini mengindikasikan adanya penguatan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur pendapatan daerah, serta semakin berkurangnya ketergantungan relatif terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Secara struktural, indeks kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah dari sumber-sumber pendapatan sendiri. Dengan nilai 0,605, Kabupaten Tangerang berada pada kategori kemandirian fiskal yang kuat, yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh struktur pembiayaan daerah telah didukung oleh PAD. Hal ini mencerminkan meningkatnya efektivitas pengelolaan pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta optimalisasi sumber pendapatan lainnya yang sah.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, posisi Kabupaten Tangerang (0,605) berada di atas Kota Tangerang (0,484) dan Kota Tangerang Selatan (0,523), meskipun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Banten (0,735). Posisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang memiliki kapasitas fiskal yang relatif

kompetitif di tingkat regional, namun masih terdapat ruang untuk memperkuat daya saing fiskal agar mendekati tingkat kemandirian fiskal provinsi secara keseluruhan.

Peningkatan signifikan pada tahun 2025 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis, antara lain optimalisasi penerimaan pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi sistem pembayaran dan pelaporan pajak, serta perbaikan tata kelola pengelolaan pendapatan daerah. Di sisi lain, pengendalian belanja dan peningkatan efisiensi anggaran juga turut berkontribusi dalam memperkuat rasio kemandirian fiskal.

Namun demikian, meskipun capaian tahun 2025 telah melampaui target, Pemerintah Kabupaten Tangerang menyadari bahwa kemandirian fiskal bukan hanya soal peningkatan angka rasio, tetapi juga terkait dengan keberlanjutan struktur pendapatan dan kualitas belanja daerah. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa pertumbuhan PAD bersifat berkelanjutan, tidak bergantung pada sumber pendapatan yang fluktuatif, serta tetap memperhatikan prinsip keadilan dan daya beli masyarakat.

Selain itu, struktur ekonomi daerah yang dinamis, perkembangan investasi, dan pertumbuhan sektor usaha menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah. Oleh karena itu, penguatan basis pajak, perluasan objek retribusi yang potensial, serta pengembangan kerja sama pemanfaatan aset daerah perlu terus didorong agar kemandirian fiskal dapat meningkat secara progresif.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Kemandirian Fiskal Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang berada pada arah yang positif dalam memperkuat kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Ke depan, strategi peningkatan kemandirian fiskal akan diarahkan pada optimalisasi potensi pendapatan daerah yang berkelanjutan, penguatan sistem pengawasan dan kepatuhan, serta peningkatan kualitas belanja agar setiap rupiah yang dihimpun mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Faktor Keberhasilan pencapaian target

1. Sampai akhir 2025, realisasi PAD Kabupaten Tangerang telah mencapai 93,32% dari target Rp5,148 triliun, dengan sisa gap yang masih optimis akan terpenuhi sebelum akhir tahun fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa daerah secara konsisten meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, retribusi, dividen, dan kekayaan daerah lainnya, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur fiskal daerah.

2. Kabupaten Tangerang aktif melakukan pemetaan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan PAD meskipun terjadi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp620 miliar. Pendekatan ini menunjukkan strategi yang responsif dalam memperkuat basis penerimaan tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan tarif pajak atau retribusi.
3. Realitas investasi di Kabupaten Tangerang menunjukkan pertumbuhan yang sangat impresif pada Triwulan IV 2025, dengan realisasi investasi sebesar Rp37,62 triliun. Pencapaian ini menunjukkan bahwa lingkungan usaha lokal cukup menarik dan mampu menarik investasi PMDN dan PMA.
4. Pelayanan OSS (Online Single Submission) berbasis risiko di Kabupaten Tangerang berjalan efektif, dengan penerbitan 2.595 Nomor Induk Berusaha (NIB) sampai November 2025. Mayoritas pengguna NIB berasal dari usaha mikro dan kecil menengah, yang menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong legalitas dan formalisasi UMKM.
5. Kabupaten Tangerang meraih beberapa penghargaan pada Digiwara Award 2025 termasuk kategori penggunaan pembayaran digital tertinggi untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pencapaian ini menunjukkan transformasi digital yang berhasil diterapkan dalam sistem pembayaran dan penerimaan daerah.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Melanjutkan dan memperluas intensifikasi serta ekstensifikasi pajak daerah melalui pemutakhiran basis data wajib pajak, integrasi data lintas perangkat daerah, serta pemanfaatan data sektoral (perizinan, investasi, pertanahan, dan usaha) guna meningkatkan akurasi potensi PAD.
2. Memperkuat digitalisasi penerimaan daerah dengan optimalisasi kanal pembayaran non-tunai, integrasi sistem pajak daerah dengan perbankan dan sistem OSS, serta peningkatan literasi digital bagi wajib pajak untuk mendorong kepatuhan dan kemudahan transaksi.
3. Melakukan diversifikasi sumber PAD agar tidak bergantung pada satu atau dua jenis pajak dominan, termasuk optimalisasi pemanfaatan aset daerah, penguatan BUMD, dan pengembangan skema kerja sama pemanfaatan aset yang produktif.

4. Meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan berorientasi pada outcome, sehingga pertumbuhan PAD berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik dan daya saing ekonomi daerah.
5. Memperkuat iklim investasi melalui penyederhanaan proses perizinan, kepastian regulasi, dan percepatan layanan usaha guna memperluas basis ekonomi dan meningkatkan potensi pajak daerah secara berkelanjutan.
6. Mengantisipasi risiko fiskal dengan menyusun proyeksi pendapatan berbasis skenario (scenario planning), memperkuat cadangan fiskal, serta meningkatkan pengawasan terhadap potensi penurunan penerimaan akibat perlambatan ekonomi atau perubahan kebijakan pusat.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap rasio kemandirian fiskal untuk memastikan tren peningkatan bersifat struktural dan berkelanjutan, bukan sekadar peningkatan temporer.

OPINI BPK

*menggunakan realisasi 2024

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
WTP	WTP	100%	WTP
Tahun		Opini BPK	
2021		WTP	
2022		WTP	
2023		WTP	
2024		WTP	
2025		-	

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Banten, 2024

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditargetkan dan direalisasikan sebesar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan capaian kinerja 100%. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, opini WTP berhasil dipertahankan secara konsisten selama empat tahun berturut-turut. Sementara itu, untuk Tahun Anggaran 2025 opini masih dalam proses karena hasil pemeriksaan belum diterbitkan.

Konsistensi opini WTP selama empat tahun menunjukkan bahwa secara umum laporan keuangan telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, memiliki kecukupan pengungkapan, serta tidak terdapat salah saji material yang mempengaruhi kewajaran laporan. Hal ini mencerminkan stabilitas dalam sistem pelaporan keuangan, penatausahaan anggaran, serta pengendalian administrasi keuangan daerah.

Namun demikian, keberlanjutan opini WTP perlu dianalisis secara lebih substantif. Meskipun opini tetap WTP, masih terdapat temuan berulang dalam tiga tahun terakhir serta catatan terkait pengelolaan aset. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perbaikan yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan secara sistemik. WTP menilai kewajaran penyajian laporan secara material, bukan berarti tidak terdapat kelemahan pengendalian atau kekurangan administratif.

Keberadaan temuan berulang menunjukkan adanya celah pengendalian yang belum sepenuhnya tertutup, baik pada aspek kepatuhan, penatausahaan, maupun proses bisnis tertentu. Sementara itu, catatan terkait aset menandakan bahwa pengelolaan, pencatatan, dan pengamanan aset daerah masih memerlukan penguatan agar lebih tertib, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Area aset seringkali menjadi sektor yang kompleks karena melibatkan inventarisasi fisik, legalitas kepemilikan, rekonsiliasi nilai, serta konsistensi pencatatan antar unit.

Di sisi lain, target mempertahankan opini WTP hingga tahun 2026 menunjukkan komitmen terhadap kesinambungan tata kelola keuangan yang baik. Tantangan ke depan tidak hanya mempertahankan label WTP, tetapi memastikan bahwa kualitas pengendalian intern dan manajemen risiko semakin matang, terutama seiring meningkatnya kapasitas fiskal dan kompleksitas transaksi keuangan daerah.

Dengan demikian, tren opini WTP selama empat tahun berturut-turut mencerminkan fondasi tata kelola yang stabil. Namun untuk menjaga keberlanjutan kualitas tersebut, diperlukan penguatan penyelesaian temuan berulang secara tuntas, pembenahan sistem pengelolaan aset, serta peningkatan efektivitas pengendalian intern agar kualitas laporan keuangan tidak hanya wajar secara material, tetapi juga kuat secara substantif dan berkelanjutan.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Melakukan evaluasi menyeluruh atas temuan tiga tahun terakhir untuk mengidentifikasi penyebab mendasar, bukan hanya memperbaiki dampaknya. Setiap temuan harus ditindaklanjuti dengan perbaikan prosedur, revisi SOP, atau penguatan sistem pengendalian agar tidak kembali terulang pada periode audit berikutnya.
2. Meningkatkan efektivitas pengendalian pada area berisiko tinggi seperti belanja modal, pengadaan barang/jasa, hibah, dan bantuan sosial. Termasuk di dalamnya peningkatan fungsi monitoring dan reviu internal sebelum pemeriksaan eksternal dilakukan.
3. Melaksanakan inventarisasi dan rekonsiliasi aset secara berkala, mempercepat penyelesaian legalitas aset (sertifikasi), memperbaiki sistem pencatatan berbasis

aplikasi yang terintegrasi, serta memperkuat pengawasan fisik dan administrasi aset tetap.

4. Membentuk mekanisme monitoring berkala terhadap progres penyelesaian rekomendasi, termasuk penetapan batas waktu yang jelas dan penanggung jawab pada setiap perangkat daerah, sehingga tidak terjadi akumulasi temuan.
5. Melakukan pelatihan teknis akuntansi pemerintahan, pengelolaan aset, dan manajemen risiko agar kualitas penyusunan laporan keuangan semakin akurat serta adaptif terhadap perubahan regulasi.
6. Mengintegrasikan identifikasi risiko ke dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga potensi kesalahan administrasi atau ketidakpatuhan dapat dicegah sebelum menjadi temuan audit.
7. Melakukan pemeriksaan internal secara menyeluruh sebelum audit BPK untuk memastikan bahwa seluruh dokumen pendukung, rekonsiliasi, dan pengungkapan laporan telah sesuai standar dan bebas dari potensi koreksi material.

INDEKS PROFESIONALITAS ASN

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
75	83,65	111,53%	81



Sumber: Badan Kepegawaian Negara, 2026

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan indikator penting dalam mengukur kompetensi, kinerja, serta dedikasi ASN dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Profesionalisme ASN yang tinggi akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kabupaten Tangerang telah menunjukkan pencapaian yang sangat baik dalam meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN. Berdasarkan data terbaru, realisasi Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2025 mencapai **83,65**, melampaui target tahun 2025 yang hanya ditetapkan pada **75**. Capaian ini setara dengan **111,53% dari target**, menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam peningkatan profesionalitas ASN.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2026 yang ditetapkan sebesar **81**, maka realisasi tahun 2025 sudah melampaui target tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang telah lebih cepat mencapai standar profesionalisme ASN yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Faktor Keberhasilan pencapaian target

1. Penghargaan bagi ASN Berprestasi: Pada tahun 2025, Pemkab Tangerang mengadakan "ASN Award" sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan kerja

keras ASN yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penghargaan ini diharapkan memotivasi seluruh ASN untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan.

2. **Pelantikan Jabatan Fungsional:** Untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Langkah ini bertujuan memperkuat kompetensi dan profesionalisme ASN, sehingga mereka dapat lebih fokus pada bidang tugasnya dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
3. **Sosialisasi Penegakan Disiplin dan Etika:** Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan disiplin dan etika ASN. Upaya ini merupakan bagian dari strategi untuk memastikan ASN bekerja sesuai dengan standar profesional dan kode etik yang berlaku.
4. **Pengembangan Kompetensi Pegawai:** Pemerintah Kabupaten Tangerang mengembangkan visi dan misi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional. Salah satu caranya adalah melalui pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil, memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.
5. **Layanan Kepegawaian Berbasis Digital:** BKPSDM Kabupaten Tangerang menyediakan layanan kepegawaian untuk ASN, termasuk pengurusan kenaikan pangkat, pensiun, promosi jabatan, serta konsultasi dan verifikasi data kepegawaian. Layanan ini mempermudah ASN dalam mengelola karier mereka dan memastikan proses administrasi berjalan efisien.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. **Peningkatan Kapasitas ASN Secara Merata**
 - Melakukan pemetaan kompetensi ASN di setiap OPD untuk mengetahui kebutuhan pelatihan yang spesifik.
 - Menyelenggarakan pelatihan teknis dan kepemimpinan berbasis kebutuhan nyata di masing-masing unit kerja.

2. Percepatan Digitalisasi dalam Tata Kelola ASN

- Mengadakan program literasi digital untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam menggunakan sistem berbasis teknologi.
- Mengembangkan aplikasi terpadu untuk mempermudah akses layanan kepegawaian secara real-time.

3. Peningkatan Sistem Redistribusi Pegawai

- Melakukan analisis beban kerja untuk mendistribusikan pegawai secara lebih proporsional.
- Menempatkan ASN sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki agar lebih produktif.

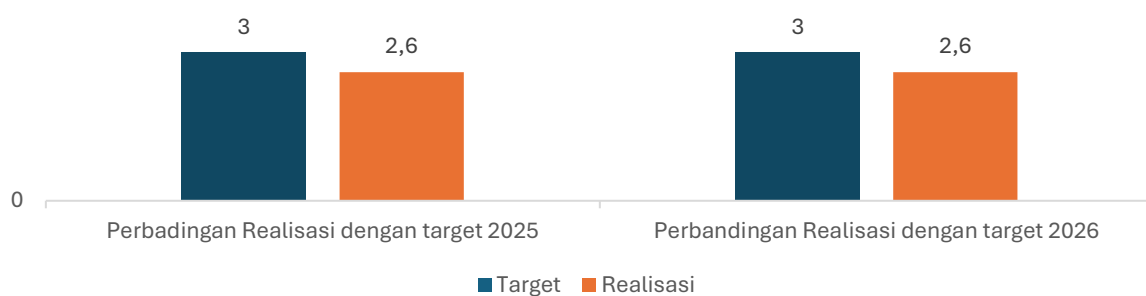
4. Transformasi Budaya Kerja ASN

- Mengadopsi model kerja berbasis kinerja dan hasil, bukan sekadar kehadiran fisik.
- Mendorong inovasi dan kreativitas di lingkungan ASN dengan memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi.

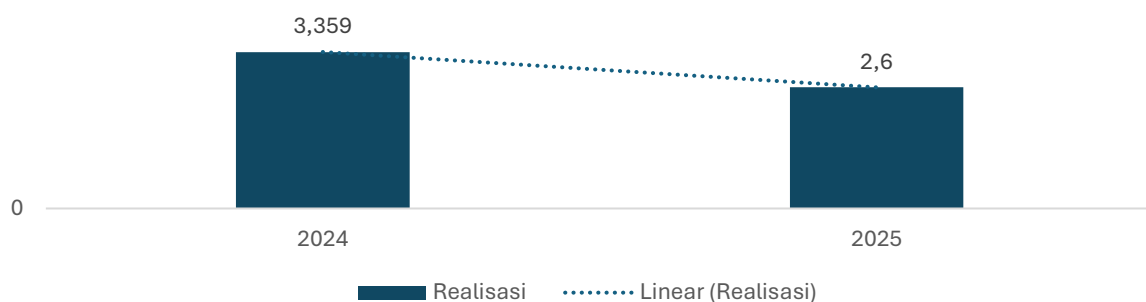
NILAI MATURITAS SPIP TERINTEGRASI

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
3	2,6	67%	3

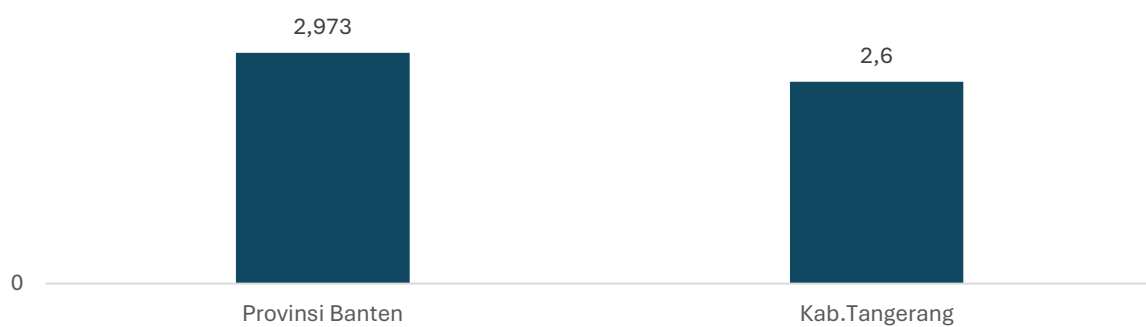
Perbandingan Kinerja



Realisasi Maturitas SPIP 2024-2025



Perbandingan Maturitas SPIP



Sumber: LHE SPIP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi maturitas SPIP terintegrasi Tahun 2025, Kabupaten Tangerang memperoleh nilai sebesar 2,6 dari target 3, dengan capaian kinerja sebesar 67%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 yang mencapai nilai 3,359, terjadi penurunan tingkat maturitas yang cukup signifikan. Grafik tren 2024–2025 menunjukkan adanya koreksi nilai yang menempatkan Kabupaten Tangerang pada level yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus berada di bawah rata-rata Provinsi Banten yang sebesar 2,973. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas penerapan pengendalian intern belum sepenuhnya konsisten dan berkelanjutan.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi panel, penurunan nilai tersebut tidak semata-mata menunjukkan melemahnya praktik pengendalian intern, tetapi lebih pada belum optimalnya integrasi antar unsur SPIP, khususnya pada aspek manajemen risiko, pengendalian atas pencapaian kinerja, serta dokumentasi dan eviden pendukung yang dipersyaratkan dalam penilaian. Evaluasi juga menunjukkan bahwa sebagian perangkat daerah belum sepenuhnya menjadikan manajemen risiko sebagai dasar dalam perencanaan dan pengendalian program, sehingga keterkaitan antara risiko strategis, sasaran kinerja, dan langkah mitigasi belum tergambar secara kuat dan sistematis.

Selain itu, terdapat catatan bahwa pemanfaatan hasil evaluasi sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti secara menyeluruh oleh seluruh unit kerja. Hal ini berdampak pada belum meratanya kualitas implementasi SPIP di tingkat perangkat daerah. Dengan demikian, meskipun secara administratif sistem telah berjalan, namun pada level kematangan (maturity level) masih memerlukan penguatan terutama dalam integrasi proses, konsistensi penerapan, dan penguatan fungsi monitoring serta evaluasi internal.

Faktor Kegagalan pencapaian target

1. Kualitas perencanaan belum sepenuhnya berbasis outcome

Meskipun indikator dan strategi pencapaian kinerja telah dirumuskan, masih terdapat sasaran dan indikator yang belum sepenuhnya merepresentasikan hasil akhir (outcome) serta belum didukung target yang terukur dan tepat.

2. Pengelolaan risiko belum komprehensif dan terintegrasi

Kebijakan manajemen risiko dan pengendalian telah disusun, namun belum seluruhnya mencakup risiko sektoral secara menyeluruh. Implementasi pengendalian

risiko, termasuk risiko korupsi, belum merata di seluruh unit kerja dan belum dievaluasi efektivitasnya secara sistematis.

3. Efektivitas pengendalian proses bisnis utama belum optimal

Pengendalian atas program dan kegiatan telah berjalan, namun pada beberapa proses inti organisasi masih ditemukan kelemahan sehingga belum sepenuhnya mampu menjamin ketercapaian tujuan strategis secara efektif.

4. Capaian kinerja belum sepenuhnya mencerminkan hasil yang optimal

Beberapa sasaran strategis dan program belum menunjukkan outcome yang kuat karena indikator yang digunakan belum sepenuhnya komprehensif dan terintegrasi dengan indikator nasional maupun standar yang lebih luas.

5. Permasalahan tata kelola dan kepatuhan masih memerlukan penguatan

Meskipun opini LKPD telah WTP, masih terdapat temuan berulang, catatan pengelolaan aset, serta aspek kepatuhan yang perlu diperbaiki guna memperkuat sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.

RENCANA TINDAK LANJUT

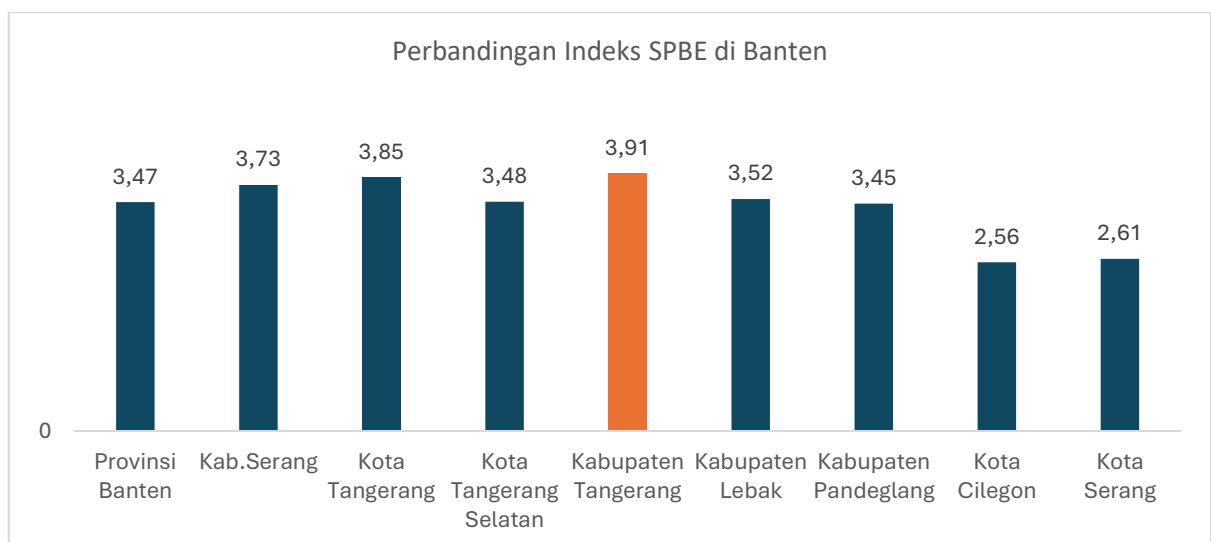
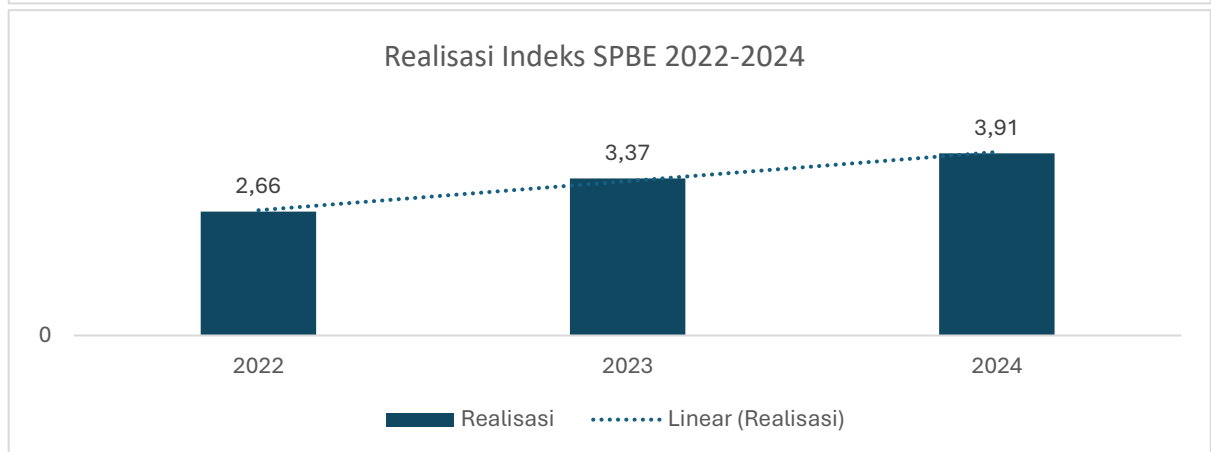
1. Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melakukan reviu dan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja melalui penyesuaian indikator agar lebih berorientasi pada outcome dan memenuhi prinsip SMART. Proses cascading sasaran akan diperkuat dari RPJMD hingga Perjanjian Kinerja perangkat daerah agar selaras dengan proses bisnis organisasi. Selain itu, penetapan target kinerja akan berbasis data historis dan analisis proyeksi yang realistis, disertai benchmarking dengan daerah lain dan indikator nasional. Menetapkan target indikator secara tepat dan baik serta memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound (SMART) dalam dokumen perencanaan;
2. Akan dilakukan pembaruan kebijakan manajemen risiko yang mencakup pembangunan budaya sadar risiko, penetapan risk appetite, serta integrasi risiko dalam perencanaan dan penganggaran. Seluruh perangkat daerah diwajibkan menyusun dan memperbarui peta risiko sektoral serta melakukan identifikasi risiko fraud pada proses bisnis utama. Evaluasi atas efektivitas pengendalian risiko akan dilaksanakan secara berkala dan dilaporkan secara periodik. Meningkatkan pengendalian korupsi dengan:

3. Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap SOP pada proses bisnis utama yang berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran strategis. Penguatan fungsi pengawasan internal akan dilakukan untuk memastikan pengendalian berjalan efektif. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM dalam pengendalian intern dan manajemen program akan menjadi prioritas melalui pelatihan dan pembinaan teknis.
4. Sistem monitoring dan evaluasi akan diarahkan pada pengukuran berbasis outcome dengan memanfaatkan integrasi data kinerja lintas perangkat daerah. Indikator kinerja akan diselaraskan dengan indikator nasional dan standar yang relevan agar capaian lebih komprehensif. Hasil evaluasi kinerja akan dijadikan dasar dalam penyempurnaan kebijakan dan perencanaan tahun berikutnya.
5. Akan dilakukan identifikasi akar penyebab temuan berulang dalam LHP BPK dan disusun langkah pengendalian yang bersifat preventif. Pengelolaan aset akan diperkuat melalui validasi dan penertiban administrasi serta peningkatan pengamanan fisik dan legal. Di samping itu, penguatan kepatuhan terhadap regulasi akan dilakukan melalui pembinaan, pengawasan, serta pemantauan tindak lanjut secara berkelanjutan guna mencegah terulangnya temuan di masa mendatang.

INDEKS SPBE

*menggunakan realisasi 2024

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
3,19	3,91	81,59%	3,21



Sumber: LHE SPBE Kementerian PANRB, 2024

Capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif berdasarkan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Realisasi indeks SPBE pada tahun ini mencapai angka 3,91, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,19. Keberhasilan ini mencerminkan bahwa strategi dan kebijakan digitalisasi yang diterapkan telah berjalan dengan baik, serta adanya komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

Hasil Pemantauan SPBE Tahun 2024 dilakukan berdasarkan instrumen yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Hasil pemantauan tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Adapun rincian capaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,91
Domain Kebijakan SPBE	3,50
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,50
Domain Tata Kelola SPBE	3,30
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	2,75
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	3,75
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,50
Domain Manajemen SPBE	2,82
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,88
<i>Audit TIK</i>	2,67
Domain Layanan SPBE	4,75
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	4,70
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,83

Faktor Pendukung Capaian Target

1. Secara keseluruhan penerapan dari aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% , dengan adanya Kebijakan internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit dan Tim Koordinasi SPBE.
2. Secara keseluruhan penerapan dari aspek Perencanaan strategis SPBE yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% , dengan adanya dokumen Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE dan Dokumen Proses Bisnis.
3. Secara keseluruhan penerapan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% , dengan adanya SOP pembangunan aplikasi yang sesuai SDLC dan di konsultasikan dengan Kominfo. Juga dengan sudah digunakannya Pusat Data, Jaringan Intra, dan Sistem Penghubung Layanan oleh seluruh unit kerja.
4. Secara keseluruhan penerapan aspek Penyelenggara SPBE yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% , dengan adanya Tim Kordinasi yang telah melaksanakan semua rencana kegiatannya dan dilakukannya kolaborasi penerapan SPBE antar unit kerja.
5. Secara keseluruhan penerapan Manajemen SPBE yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100%, dengan dilaksanakannya penerapan Manajemen Resiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen SDM, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan yang dilakukan berdasar peta rencana SPBE.
6. Secara keseluruhan pelaksanaan Audit TIK yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% , dengan adanya pelaksanaan Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan SPBE.
7. Secara keseluruhan penerapan dari aspek Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100%, dengan adanya layanan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan

Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan Dinamis, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penawasan Internal Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Kinerja Pegawai.

8. Secara keseluruhan penerapan dari aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100%, dengan adanya layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Data Terbuka, JDIH, dan tiga layanan Publik Sektor.

Hambatan dalam pencapaian kinerja :

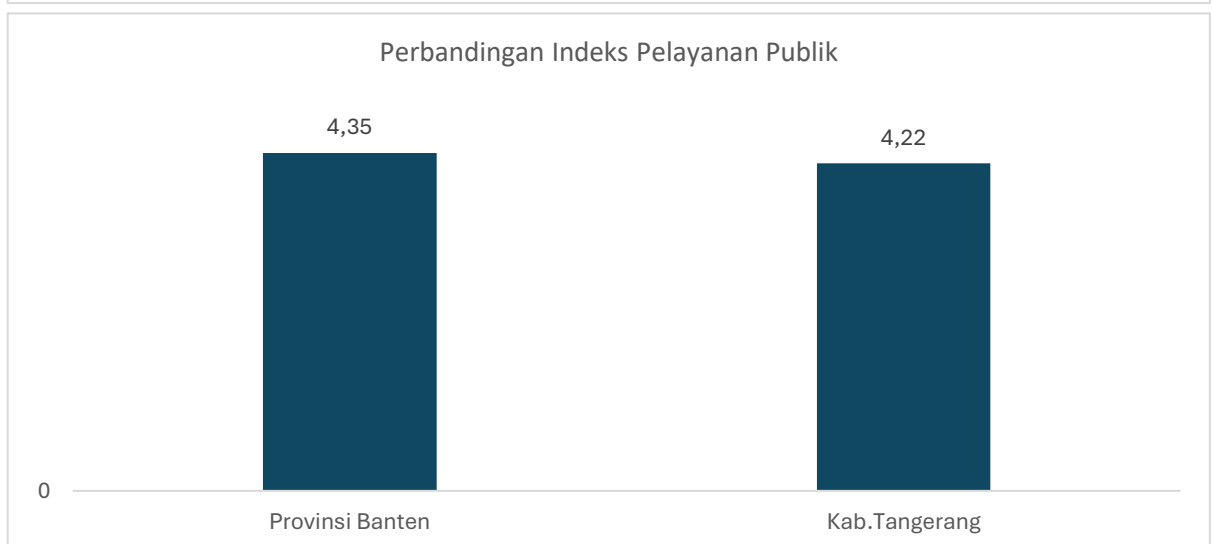
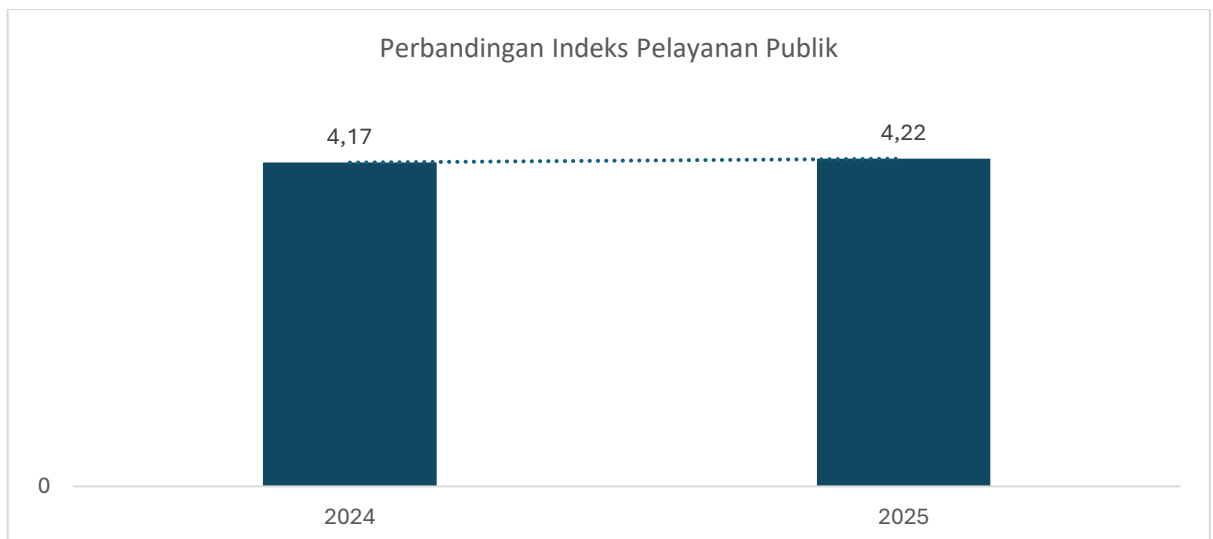
1. Kebijakan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Kedua nya belum secara lengkap menyebutkan muatan-muatan yang seharusnya ada pada isi kebijakan internal.
2. Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE dimana belum seluruh unit kerja belanja TIK nya telah dikonsultasikan kepada Dinas Kominfo.
3. Manajemen Sumber Daya Manusia yang belum lengkapnya dormasi untuk 6 bidang kompetensi, dan Manajemen Pengetahuan dan Manajemen Perubahan yang belum dimanfaatkan untuk seluruh unit kerja.
4. Pelaksanaan Audit Keamanan yang belum dilakukan oleh BSSN.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Perlu dilakukan pembaharuan Perda SPBE yang mencakup secara lengkap muatan yang diperlukan, sehingga beberapa nilai yang belum bernilai 3 akan ada di nilai standar 3 sekaligus beberapa nilai lain dapat masuk pada nilai 5. Dengan catatan, sebelumnya telah dilakukan review per indikator untuk indikator yang sudah bernilai 3.
2. Perlu dilakukan pendokumentasian secara lengkap saat adanya konsultasi anggaran semua unit kerja kepada dinas Kominfo. Sebaiknya terdapat dokumen resmi yang didalamnya terdapat persetujuan Dinas Kominfo untuk anggaran TIK.
3. Pembuatan SOP atau pedoman untuk pelaksanaan Manajemen SDM, Manajemen Pengetahuan dan Manajemen Perubahan. Sehingga apa yang dilaksanakan sudah berdasar pada pedoman.
4. Pengajuan Audit Keamanan kepada BSSN
5. Evaluasi aplikasi, penambahan fitur dalam aplikasi Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik.

INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
4,30	4,22	98%	4,4



Sumber: Hasil PEKPPP Kementerian PANRB, 2026

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tangerang mencatat realisasi sebesar **4,22**, mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 4,17. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan sebagai hasil dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, realisasi tersebut masih sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 4,30 dan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 4,40, sehingga diperlukan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan secara lebih optimal.

Peningkatan nilai indeks ini mencerminkan penguatan dalam berbagai aspek pelayanan, termasuk penerapan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik. Sepanjang Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tangerang terus mendorong pengawasan langsung terhadap kualitas pelayanan melalui monitoring berkala, penguatan disiplin aparatur, serta optimalisasi layanan berbasis digital untuk mempermudah akses masyarakat.

Selain itu, berbagai inovasi pelayanan publik terus dikembangkan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan. Transformasi digital dan integrasi sistem pelayanan menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Upaya ini turut berkontribusi terhadap peningkatan persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Tangerang menyadari bahwa masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam meningkatkan konsistensi kualitas pelayanan di seluruh perangkat daerah serta memperkuat efektivitas prosedur dan waktu penyelesaian layanan. Kompleksitas wilayah dan tingginya jumlah penduduk juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga standar pelayanan tetap optimal dan merata.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tangerang berada pada kategori baik dan menunjukkan tren peningkatan. Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan guna mencapai target kinerja Tahun 2026 serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Faktor ketidaktercapaian Capaian Target

1. Belum meratanya kualitas pelayanan di seluruh perangkat daerah

Meskipun sebagian unit layanan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, konsistensi kualitas pelayanan di seluruh perangkat daerah masih perlu ditingkatkan agar standar pelayanan yang tinggi dapat tercapai secara merata.

2. Optimalisasi standar pelayanan yang belum sepenuhnya konsisten

Penerapan standar pelayanan, khususnya terkait kecepatan layanan, penyederhanaan prosedur, dan kepastian waktu penyelesaian, masih memerlukan penguatan agar seluruh layanan dapat memenuhi ekspektasi masyarakat secara optimal.

3. Transformasi digital yang masih dalam tahap penguatan integrasi

Pengembangan pelayanan berbasis digital telah berjalan, namun integrasi antar sistem dan pemanfaatannya secara menyeluruh masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kemudahan akses dan efisiensi layanan.

4. Beban layanan yang tinggi akibat kompleksitas wilayah dan jumlah penduduk

Sebagai daerah dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar, beban pelayanan publik relatif tinggi sehingga memerlukan penguatan kapasitas sumber daya dan sistem pelayanan yang lebih adaptif.

5. Persepsi kepuasan masyarakat yang terus meningkat

Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik juga menjadi tantangan tersendiri. Standar pelayanan yang sebelumnya dinilai baik kini dituntut untuk mencapai kategori sangat baik secara konsisten.

Walaupun Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program dan inovasi pelayanan public seperti berikut :

1. Pembukaan Gerai Pelayanan Publik (GPP) untuk memudahkan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Tangerang membuka Gerai Pelayanan Publik (GPP) Intermoda Cisauk untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan administrasi dalam satu lokasi. Layanan ini mengintegrasikan berbagai instansi

seperti Dukcapil, BPN, BPJS, Samsat, Kemenag, dan Polres sehingga masyarakat tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mengurus dokumen.

2. Penambahan gerai pelayanan publik

Pemkab Tangerang juga berencana menambah **Gerai Pelayanan Publik di Intermoda Cisauk** sebagai upaya memperluas akses pelayanan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan agar pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau.

3. Perluasan pelayanan administrasi kependudukan di seluruh kecamatan

Pemerintah Kabupaten Tangerang memperluas pelayanan administrasi kependudukan sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen seperti KTP-el, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak langsung di kantor kecamatan. Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil di Tigaraksa sehingga pelayanan menjadi lebih dekat dan mudah diakses.

4. Aplikasi Tangerang Gemilang mempermudah akses layanan public

Tangerang Gemilang merupakan portal layanan digital Pemerintah Kabupaten Tangerang yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu aplikasi. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat mengakses berbagai layanan seperti administrasi, informasi daerah, pengaduan, hingga layanan darurat secara lebih mudah melalui ponsel.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Standarisasi dan pemerataan kualitas pelayanan

Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar pelayanan di seluruh perangkat daerah guna memastikan keseragaman kualitas layanan. Unit layanan yang telah mencapai kategori sangat baik akan dijadikan role model untuk direplikasi pada unit kerja lainnya.

2. Penyederhanaan prosedur dan percepatan waktu layanan

Akan dilakukan reviu terhadap prosedur layanan yang masih berpotensi menimbulkan hambatan, dengan tujuan menyederhanakan alur proses serta memastikan kepastian waktu penyelesaian layanan sesuai standar yang telah ditetapkan.

3. Percepatan transformasi digital pelayanan publik

Pemerintah daerah akan memperkuat integrasi sistem layanan berbasis digital agar lebih mudah diakses masyarakat, mengurangi kontak langsung yang tidak perlu, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pelayanan.

4. Penguatan kapasitas dan profesionalisme aparatur

Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik akan dilakukan melalui pelatihan teknis, pembinaan etika pelayanan, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

5. Optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat Aplikasi Tangerang Gemilang mempermudah akses layanan publik

Sistem pengaduan akan dioptimalkan dengan memastikan setiap aduan ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan akuntabel. Hasil pengaduan akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

6. Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat akan dilaksanakan secara berkala dan hasilnya digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan serta peningkatan kualitas layanan pada tahun berjalan.

SASARAN 13

Meningkatkan Pemerataan dan
Kualitas Infrastruktur

TINGKAT EFISIENSI SASARAN STRATEGIS 13

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur didukung oleh 13 program :

1. Pprogram pengelolaan sumber daya air (sda)
2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
5. Program penataan bangunan gedung
6. Program penataan bangunan dan lingkungannya
7. Program penyelenggaraan jalan
8. Program penyelenggaraan penataan ruang
9. Program pengembangan perumahan
10. Program kawasan permukiman
11. Program pengelolaan taman makam pahlawan
12. Program penatagunaan tanah
13. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)

Sasaran meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp1.350.572.953.238,68 yang digunakan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan serta peningkatan kualitas infrastruktur. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar, serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur yang memadai. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp1.302.140.813.420,00 atau 96,41% dari total anggaran yang telah dialokasikan.

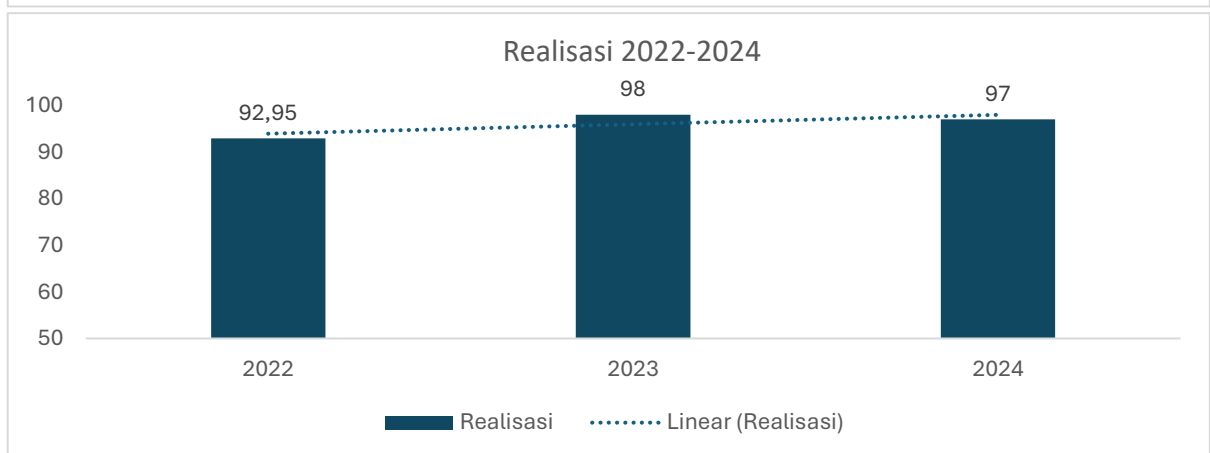
Dari sisi kinerja, pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan infrastruktur menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini tercermin dari rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 94,92%, yang menggambarkan bahwa sebagian besar target indikator yang telah ditetapkan pada sasaran tersebut dapat direalisasikan mendekati target yang direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan antara capaian realisasi anggaran sebesar 96,41% dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 94,92%, terlihat bahwa tingkat penyerapan anggaran sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program agar capaian kinerja dapat lebih optimal dan sebanding dengan tingkat penggunaan anggaran yang telah direalisasikan.

PRESENTASE INFRASTRUKTUR DALAM KONDISI BAIK

*menggunakan realisasi 2024

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
95%	97%	102,11%	95,5%



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang, 2024

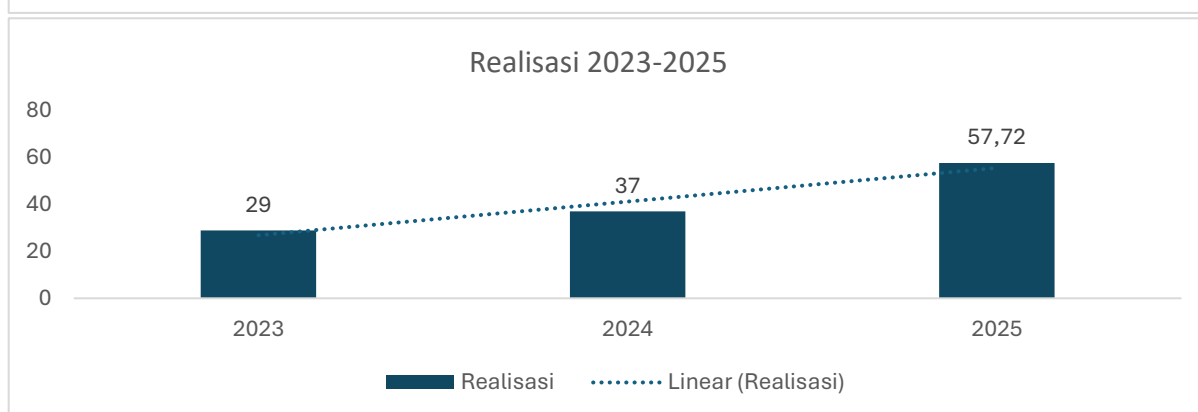
Capaian kinerja infrastruktur dalam kondisi baik merupakan salah satu indikator utama dalam memastikan layanan publik yang optimal. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 95%, dengan realisasi 2024 mencapai 97%. Meskipun terdapat sedikit selisih dari target awal, kinerja yang dicapai tetap menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan infrastruktur. Bahkan, capaian kinerja mencapai 102,11%, yang mencerminkan tingkat keberhasilan dalam mempertahankan infrastruktur dalam kondisi layak guna. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2023 terjadi penurunan kinerja sebesar 2%. Adapun rinciannya sebagai berikut : Dari 12.893 gedung dan bangunan, 12.506 nya dalam kondisi baik, sementara dari 207 rusak ringan dan 180 lainnya rusak berat.

Adapun penetapan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2026 ditetapkan sebesar 95,5%. Penyesuaian target ini mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur, seperti keterbatasan anggaran, meningkatnya biaya perbaikan, serta tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Selain itu, banyaknya infrastruktur yang telah berusia tua membutuhkan perhatian lebih dalam rehabilitasi, yang tidak hanya memerlukan anggaran besar tetapi juga perencanaan teknis yang lebih matang.

Dalam upaya memastikan infrastruktur tetap dalam kondisi optimal, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk penguatan sistem pemeliharaan berkala, optimalisasi anggaran, serta pemanfaatan teknologi dalam pemantauan dan perbaikan infrastruktur. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan infrastruktur dapat tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

PRESENTASE REALISASI POLA PEMANFAATAN RUANG SESUAI RTRW

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
55%	57,72%	104,95%	55%



Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang, 2025

Pada Tahun 2025, persentase realisasi pola pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang mencapai **57,72%**, melebihi target yang ditetapkan sebesar **55%**. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam pengendalian tata ruang dibandingkan periode sebelumnya. Angka ini juga mencerminkan penguatan koordinasi pelaksanaan perencanaan ruang secara lebih efektif dan terukur, terutama setelah kondisi pada 2024 masih menunjukkan tantangan besar dengan kesesuaian hanya **37%**.

Evaluasi tahun sebelumnya memperlihatkan tekanan terhadap kawasan lindung, di mana dari total luas **2.774 hektar**, hanya **805 hektar (29,02%)** yang benar-benar sesuai dengan RTRW. Sekitar **1.969 hektar** sisanya mengalami indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, seperti penggunaan lahan untuk pembangunan rumah, jalan, dan infrastruktur lain yang tidak sesuai dengan peruntukan. Situasi ini menggambarkan masih tingginya tekanan pembangunan terhadap ruang lindung dan fungsi ekologis kawasan. Namun pada akhir

tahun 2024, luas area yang sesuai meningkat menjadi lebih dari **1.026 hektar (37%)**, sedangkan indikasi pelanggaran menurun menjadi **1.747,62 hektar**, menunjukkan langkah awal perbaikan pola pemanfaatan ruang.

Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang di 2025 tidak terlepas dari konteks penegakan aturan dan pengawasan yang lebih tegas. Sepanjang 2025, pemerintah pusat mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran tata ruang di wilayah Kabupaten Tangerang, terutama di kawasan pesisir, dengan pembatalan dan pencabutan puluhan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan tanpa prosedur yang sesuai — salah satunya terkait keberadaan struktur pagar laut yang tidak berizin di kawasan pesisir Tangerang dan telah ditertibkan oleh aparat. Proses pembatalan sertifikat ini menjadi sinyal penting bahwa pengawasan penggunaan ruang semakin diperketat dan dilandasi aturan yang berlaku untuk melindungi fungsi ruang strategis, termasuk wilayah pesisir dari pemanfaatan yang menyalahi peruntukan.

Perbaikan pola pemanfaatan ruang ini juga didukung oleh upaya pemerintah daerah dalam pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) yang lebih luas. Salah satu langkah strategis adalah program pembangunan RTH di **29 kecamatan**, yang bertujuan mengatasi polusi udara sekaligus meningkatkan kualitas fungsi ruang urban dan kawasan lindung ekologis di Kabupaten Tangerang. Inisiatif ini memperkuat komitmen untuk memenuhi target RTH sekitar **20%** dari total luas daerah sehingga turut mendukung keteraturan pemanfaatan ruang sesuai RTRW.

Meski capaian 57,72% menunjukkan arah perbaikan, data pemberitaan juga mencatat bahwa praktik pelanggaran pemanfaatan ruang masih terjadi di beberapa lokasi, seperti indikasi pelanggaran di kawasan Bizlink Cikupa yang tidak sesuai dengan peruntukan RTRW, dan berdampak pada sistem drainase serta akses warga. Hal ini mencerminkan bahwa dinamika tata ruang masih menghadapi tantangan operasional di lapangan meskipun tren jangka panjangnya membaik.

Secara keseluruhan, capaian di atas target tahun 2025 menggambarkan penguatan pengendalian ruang sebagai hasil dari integrasi perencanaan, pengawasan, dan penegakan aturan berbasis hukum. Perbaikan ini bukan hanya angka statistik, tetapi part of an ongoing effort untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan fungsi ekologis daerah demi terciptanya lingkungan hidup, ruang pemukiman, serta infrastruktur yang berkelanjutan dan sesuai peraturan yang berlaku.

Faktor keberhasilan Capaian Target

1. **Penegakan dan penertiban perizinan ruang yang lebih tegas,**
termasuk pembatalan atau pencabutan sejumlah hak guna bangunan (HGB) dan kepemilikan sertifikat yang tidak sesuai tata ruang di kawasan pesisir, sehingga memberi efek jera dan memperkuat integritas sistem perizinan ruang.
2. **Pengawasan dan penanganan pelanggaran tata ruang yang diprioritaskan**
seperti tindak lanjut pengawasan kolaboratif antara aparat dan instansi terkait pada kasus pagar laut ilegal, sehingga semakin memperkecil ruang pelanggaran dan mendukung kesesuaian pemanfaatan ruang.
3. **Dorongan revisi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang**
termasuk arahan dari Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat perubahan RTRW dalam menghadapi isu perubahan lingkungan dan dinamika pembangunan, yang mendorong penataan ruang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi riil.
4. **Proses verifikasi dan konfirmasi peruntukan ruang yang semakin terstandarisasi,**
melalui mekanisme pelayanan teknis seperti konfirmasi peruntukan ruang (PKKPR) dan site plan yang membantu memastikan setiap pembangunan sesuai dengan RTRW yang berlaku.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. **Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum tata ruang** melalui inspeksi terpadu dan penindakan tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, agar tren ketidaksesuaian RTRW terus menurun secara konsisten.
2. **Mengintegrasikan sistem perizinan dengan peta RTRW berbasis digital,** sehingga setiap permohonan izin pembangunan otomatis tervalidasi kesesuaiannya sebelum diterbitkan, guna mencegah pelanggaran sejak tahap awal.
3. **Melakukan penataan dan pemulihan kawasan dengan indikasi pelanggaran,** khususnya pada kawasan lindung dan wilayah resapan air, melalui pendekatan teknis, administratif, dan kolaboratif.
4. **Meningkatkan pengendalian alih fungsi lahan dan memperluas ruang terbuka hijau (RTH)** untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembangunan dan keberlanjutan fungsi ekologis wilayah.

RASIO LUAS KAWASAN PERMUKIMAN, PERUMAHAN DAN PEMAKAMAN YANG LAYAK

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
0,9442	0,9473	100,33%	0,9442



Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang, 2025

Kawasan permukiman yang layak merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Tangerang terus berupaya meningkatkan rasio luas kawasan permukiman, perumahan, dan pemakaman yang layak melalui berbagai program pembangunan dan penataan kawasan. Laporan ini menyajikan capaian kinerja hingga tahun 2025 serta membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2026.

Target rasio luas kawasan permukiman, perumahan, dan pemakaman yang layak pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **0,9442**. Realisasi hingga tahun 2025 mencapai **0,9473**, yang berarti melampaui target dengan capaian kinerja **100,33%**. Target akhir RPD 2026 sebesar **0,9442**, yang berarti realisasi saat ini sudah lebih tinggi dari target jangka panjang.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tangerang telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan lebih baik dari proyeksi tahun 2026.

Berdasarkan rekapitulasi penanganan kawasan kumuh tahun 2025, luas kawasan kumuh yang ditangani mencapai **196 Ha**, sehingga luas kawasan permukiman layak meningkat menjadi **90.909,65 Ha**.

Tahun 2024, luas kawasan permukiman layak tercatat sebesar **90.713,65 Ha**. Tahun 2025, luas tersebut bertambah menjadi **90.909,65 Ha**. Artinya, terjadi peningkatan luas kawasan layak sebesar **196 Ha** dalam satu tahun terakhir.

Dari total luas Kabupaten Tangerang sebesar **95.961 Ha**, luas kawasan permukiman layak kini mencapai hampir **94,73%** dari total luas wilayah.

Faktor keberhasilan Capaian Target

1. Pelaksanaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Pemerintah Kabupaten Tangerang melaksanakan program perbaikan rumah tidak layak huni sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 1.197 rumah tidak layak huni telah diperbaiki melalui program pemerintah daerah yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Tangerang. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat agar memenuhi standar hunian yang layak.

2. Dukungan anggaran daerah untuk peningkatan kualitas rumah Masyarakat

Dalam pelaksanaan program RTLH tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp35 juta untuk setiap unit rumah yang diperbaiki. Dengan dukungan anggaran tersebut, rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni dapat direhabilitasi menjadi rumah yang lebih aman, sehat, dan nyaman untuk ditempati.

3. Pemerataan pembangunan rumah layak huni di seluruh kecamatan

Program perbaikan rumah tidak layak huni dilaksanakan secara merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang, dengan jumlah yang cukup besar di wilayah pesisir seperti Kosambi, Teluknaga, Pakuhaji, Mauk, dan Sukadiri. Pemerataan pembangunan ini bertujuan meningkatkan kualitas kawasan permukiman di berbagai wilayah sehingga semakin banyak kawasan yang memenuhi standar permukiman layak.

4. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hunian layak

Pemerintah Kabupaten Tangerang juga menegaskan bahwa program bedah rumah merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan warga memiliki tempat tinggal yang layak

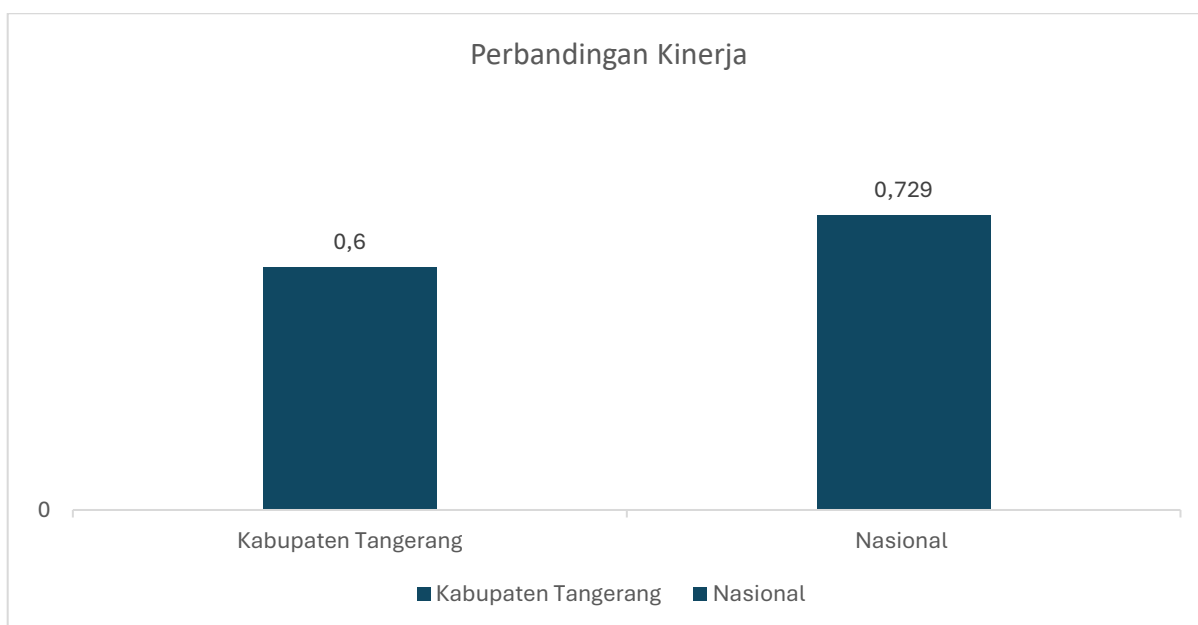
huni. Program tersebut terus dilaksanakan sebagai program prioritas pembangunan daerah di bidang perumahan dan permukiman.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. **Optimalisasi Program Rehabilitasi Kawasan Kumuh:** Peningkatan alokasi anggaran dan percepatan pelaksanaan program rehabilitasi.
2. **Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran RTRW:** Pemerintah perlu memperketat pengawasan dan memberikan sanksi terhadap pihak yang melakukan pembangunan tidak sesuai tata ruang.
3. **Peningkatan Peran Swasta dalam Pembangunan Perumahan Layak:** Mendorong investasi sektor swasta untuk membangun hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. **Penyediaan Infrastruktur Berbasis Smart City:** Memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan tata kota dan pemantauan perkembangan kawasan permukiman.
5. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** Sosialisasi pentingnya pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan permukiman.

RASIO KONEKTIVITAS KABUPATEN

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
0.83	0.60	72.29%	0.83



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2025

Berdasarkan data ketercapaian Rasio Konektivitas Kabupaten Tangerang, realisasi tahun 2025 menunjukkan angka 0.6, yang lebih rendah dibandingkan target 0.83. Capaian kinerja hanya 72.29%, menandakan bahwa target jauh dari pencapaian optimal. Sementara itu, target akhir RPD 2026 ditetapkan sebesar 0.83, menunjukkan gap yang jauh antara target dengan capaian realisasi yang ada. Hal ini disebabkan karena perhitungan ratio konektivitas dihitung dengan pertimbangan dua komponen utama yaitu :

Rasio Konektivitas = $(IK1 \times \text{Bobot Angkutan Jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot Angkutan Sungai})$

Keterangan :

A. IK1 (angkutan jalan) :

- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek angkutan pedesaan.
- Jumlah kebutuhan trayek adalah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek angkutan pedesaan dalam kurun waktu tertentu.

B. IK2 (angkutan sungai, danau, dan penyebrangan)

- Jumlah lintas penyebrangan yang beroperasi adalah lintas perintis ditambah lintasan komersil
- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyebrangan baik lintas penyebrangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu

C. Rasio konektivitas dari angkutan sungai (persentase infrastruktur angkutan air yang tersedia dibandingkan kebutuhan ideal).

D. Bobot Angkutan Jalan adalah Proporsi angkutan jalan dalam sistem transportasi (biasanya lebih besar di daerah yang bergantung pada transportasi darat).

E. Bobot Angkutan Sungai adalah Proporsi angkutan sungai dalam sistem transportasi (biasanya lebih kecil atau nol jika tidak tersedia).

Faktor kegagalan capaian Target

Karena metode angkutan sungai tidak dimungkinkan di Kabupaten Tangerang, maka nilai IK2 dan bobot angkutan sungai menjadi nol, sehingga perhitungan rasio konektivitas hanya bergantung pada angkutan jalan.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Melakukan sinkronisasi dengan rencana induk jaringan transportasi di Jabodetabek
2. Pembangunan dan perbaikan jalan utama serta jalan penghubung antar-kecamatan.

3. Peningkatan kapasitas jalan untuk mengurangi kemacetan. Dengan cara Optimalisasi Transportasi Umum
4. Penguatan jaringan angkutan umum berbasis jalan BRT, LRT dan MRT Serta Terminal Type A, C yang terintegrasi atau TOD;
5. Integrasi sistem transportasi agar lebih efisien, dengan cara Penggunaan Teknologi untuk Manajemen Lalu Lintas
6. Sistem smart traffic management untuk mengurangi bottleneck di titik rawan kemacetan.

SASARAN 14

Meningkatkan Kualitas Hidup
yang Sehat dan Tangguh
Terhadap Bencana

TINGKAT EFISIENSI SASARAN STRATEGIS 14

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan kualitas hidup yang sehat dan tangguh terhadap bencana didukung oleh 10 program :

1. Program penanggulangan bencana
2. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
3. Program perencanaan lingkungan hidup
4. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
5. Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
6. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)
7. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)
8. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
9. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
10. Program pengelolaan persampahan

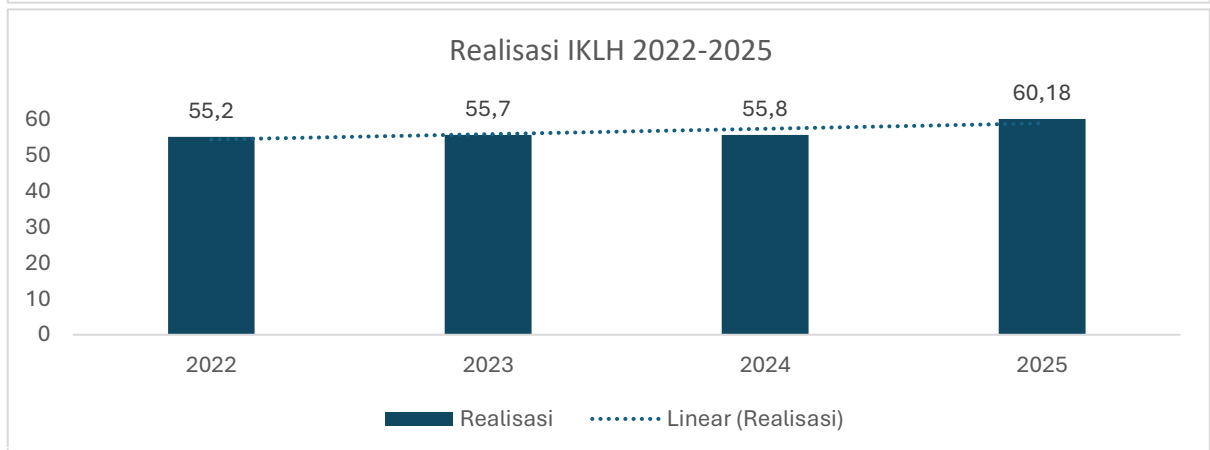
Sasaran meningkatkan kualitas hidup yang sehat dan tangguh terhadap bencana didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp167.139.492.328,00 yang digunakan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan terkait peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta penguatan kapasitas penanggulangan bencana. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp155.952.791.641,00 atau 93,31% dari total anggaran yang telah dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Dari sisi kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan rata-rata capaian indikator kinerja mencapai 98,81%. Tingginya capaian indikator kinerja ini mengindikasikan bahwa berbagai intervensi yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta memperkuat ketangguhan terhadap bencana telah berjalan secara efektif dan mampu mendekati target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan antara capaian realisasi anggaran sebesar 93,31% dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 98,81%, terlihat bahwa capaian kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran tersebut telah berjalan cukup efisien, karena dengan tingkat penggunaan anggaran yang tidak sepenuhnya terserap, kinerja yang dihasilkan mampu mencapai tingkat capaian yang sangat tinggi. Hal ini mencerminkan pengelolaan sumber daya yang relatif optimal dalam mendukung pencapaian sasaran peningkatan kualitas hidup yang sehat dan tangguh terhadap bencana.

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
56,89	60,18	105,78%	56,89



Sumber: Laporan IKLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2025

IKLH Kabupaten Tangerang dihitung dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari data hasil pemantauan kualitas air sungai di empat DAS utama (Cimanceuri, Cirarab, Cisadane, dan Cidurian), data hasil pemantauan kualitas udara di empat lokasi yang berbeda (transportasi, industri, permukiman/perumahan, dan perkantoran), dan data luas tutupan lahan. Berikut hasil perhitungan masing-masing indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2025:

- Indeks Kualitas Air (IKA) = 64,16
- Indeks Kualitas Udara (IKU) = 63,55
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) = 47,10

Hasil perhitungan masing-masing indeks kemudian digunakan untuk menghitung IKLH berdasarkan data yang sudah terverifikasi oleh KLH, dengan tahapan perhitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{IKLH Kab. Tangerang} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKTL}) \\ &= (0,376 \times 55,69) + (0,405 \times 73,33) + (0,219 \times 23,86) \\ &= 55,87\end{aligned}$$

Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025 yang mencapai 60,18 atau 105,78% dari target menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup secara umum berada pada jalur yang positif. Realisasi yang melampaui target mengindikasikan adanya konsistensi kebijakan, penguatan pengawasan, serta sinergi antar sektor dalam menjaga kualitas lingkungan di tengah dinamika pembangunan wilayah yang terus berkembang.

Secara tren, peningkatan nilai IKLH dari tahun-tahun sebelumnya memperlihatkan adanya perbaikan bertahap dalam kualitas lingkungan. Hal ini mencerminkan bahwa program pengendalian pencemaran, pemantauan kualitas lingkungan, serta upaya rehabilitasi dan konservasi telah memberikan dampak yang terukur. Kinerja ini juga menunjukkan bahwa aspek perencanaan dan pelaksanaan program lingkungan mulai semakin terintegrasi dengan dokumen pembangunan daerah.

Meskipun demikian, capaian ini tetap perlu dilihat dalam konteks tantangan jangka panjang. Pertumbuhan penduduk, ekspansi kawasan terbangun, peningkatan aktivitas industri, dan tekanan terhadap sumber daya alam berpotensi memengaruhi stabilitas kualitas lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan melampaui target tidak boleh dimaknai sebagai kondisi akhir, melainkan sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan preventif, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memastikan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dengan demikian, capaian IKLH Tahun 2025 dapat dinilai sebagai indikator kinerja yang baik dan progresif, namun tetap memerlukan penguatan strategi pengelolaan lingkungan yang berorientasi jangka panjang, adaptif terhadap dinamika pembangunan, dan berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Faktor keberhasilan Capaian Target

1. Penguatan kebijakan industri hijau melalui penyusunan dan sosialisasi pedoman penghargaan industri ramah lingkungan, yang mendorong pelaku usaha meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan limbah dan pengendalian emisi.
2. Intensifikasi pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan (air dan udara) secara berkala, sehingga pengendalian pencemaran dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui gerakan kolektif seperti aksi bersih lingkungan dan kampanye peduli sampah yang dilaksanakan serentak di berbagai wilayah.
4. Penguatan program pengelolaan sampah terintegrasi, termasuk pengembangan bank sampah, aksi bersih pantai, dan edukasi pengurangan sampah dari sumbernya.
5. Kegiatan rehabilitasi dan penanaman pohon/mangrove sebagai bagian dari upaya menjaga tutupan lahan dan menekan laju degradasi lingkungan.
6. Penguatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat dalam mendukung program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Konsistensi pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

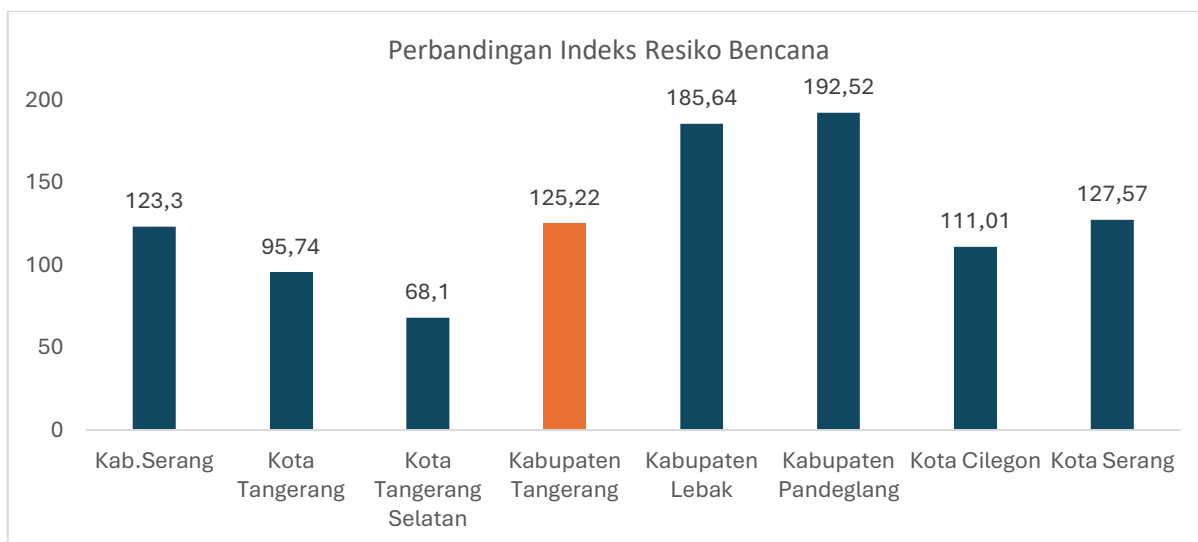
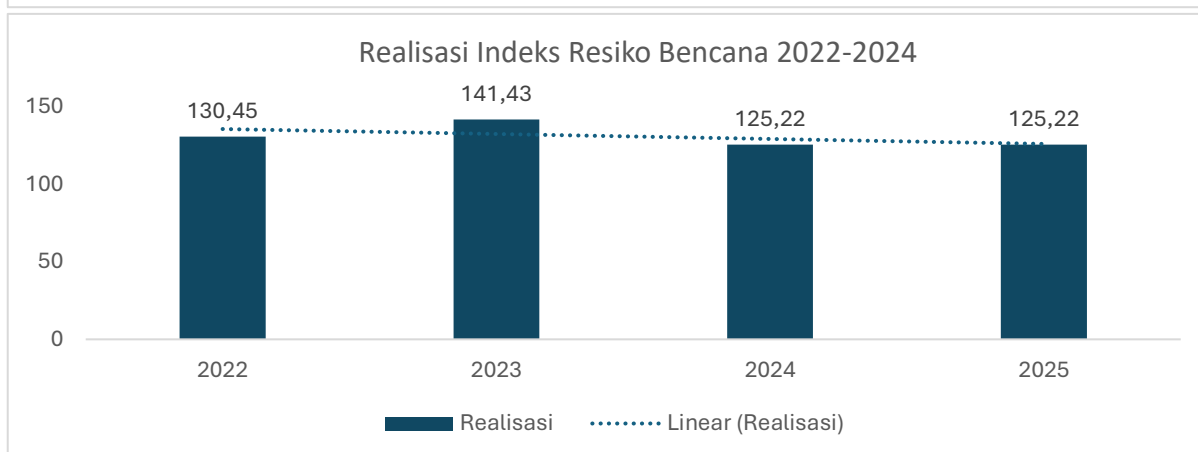
RENCANA TINDAK LANJUT

1. Memperkuat pengendalian pencemaran air melalui peningkatan pengawasan limbah industri dan domestik, optimalisasi IPAL komunal, serta penertiban pembuangan limbah ke badan air.
2. Meningkatkan pengendalian kualitas udara dengan pengetatan uji emisi kendaraan, pengawasan emisi industri, serta mendorong penggunaan energi yang lebih bersih dan efisien.
3. Melakukan percepatan rehabilitasi dan perlindungan tutupan lahan melalui penambahan ruang terbuka hijau, penanaman pohon, serta pengendalian alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang.

4. Mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir, termasuk penguatan bank sampah, pengurangan sampah dari sumber, serta peningkatan kapasitas pengolahan di tingkat lokal.
5. Meningkatkan kualitas dan cakupan pemantauan lingkungan berbasis data, termasuk integrasi sistem pelaporan dan verifikasi agar pengambilan kebijakan lebih akurat dan responsif.
6. Memperluas edukasi dan partisipasi masyarakat dalam gerakan peduli lingkungan agar perubahan perilaku menjadi faktor pendukung keberlanjutan kualitas lingkungan.
7. Mengintegrasikan kebijakan perlindungan lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan dan investasi daerah agar pertumbuhan ekonomi tetap sejalan dengan daya dukung lingkungan.

INDEKS RESIKO BENCANA

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
115	125,22	91,84%	115



Sumber: Website Inarisk BNPB, 2025

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah. Berdasarkan data tahun 2025, target IRBI ditetapkan sebesar 115, namun realisasi menunjukkan angka yang lebih tinggi, yaitu 125,22 (*sumber, buku IRBI Tahun 2025, BNPB*). Hal ini mengindikasikan bahwa risiko bencana yang terjadi lebih besar dari yang diperkirakan, yang dapat disebabkan oleh peningkatan kejadian bencana, tingkat kerentanan masyarakat, atau belum optimalnya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Adapun Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$$

Di mana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Meskipun demikian, capaian kinerja yang tercatat sebesar 95,8 menunjukkan bahwa berbagai langkah penanggulangan dan pengurangan risiko telah dilakukan secara efektif. Namun, untuk memastikan penurunan risiko yang lebih signifikan, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2026 sebesar 115. Target ini mencerminkan komitmen dalam menurunkan tingkat risiko bencana melalui berbagai strategi, seperti peningkatan kapasitas mitigasi, penguatan infrastruktur tahan bencana, serta edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat.

Faktor ketidaktercapaian Capaian Target

1. Peningkatan Ancaman Bencana

- Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan kejadian bencana, seperti banjir, angin puting beliung, dan kebakaran lahan.

- Dampak perubahan iklim memperburuk kondisi cuaca ekstrem dan mengintensifkan frekuensi serta skala bencana.

2. Peningkatan Kerentanan Masyarakat

- Pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana.
- Tata ruang yang belum optimal dalam mengakomodasi prinsip mitigasi bencana, seperti alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan permukiman dan industri.
- Ketimpangan dalam akses terhadap infrastruktur dasar, seperti sistem drainase, air bersih, dan layanan kesehatan, yang memperbesar dampak bencana.

3. Kurangnya Peningkatan Kapasitas Masyarakat

- Program peningkatan kapasitas masyarakat, seperti edukasi mitigasi, simulasi bencana, dan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), belum berjalan optimal.
- Keterbatasan sumber daya dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, sehingga respon terhadap kejadian bencana masih rendah.
- Kesiapan kelembagaan daerah dalam penanggulangan bencana masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek koordinasi dan pengelolaan data kebencanaan.

4. Keterbatasan Anggaran untuk Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana.

- Upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan pengurangan kerentanan membutuhkan alokasi anggaran yang cukup untuk infrastruktur, edukasi, serta kesiapsiagaan.
- Dana yang tersedia masih lebih banyak terserap untuk penanganan darurat bencana, dibandingkan dengan investasi pada upaya pencegahan dan mitigasi jangka panjang.
- Keterbatasan sinergi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam pendanaan serta implementasi program mitigasi bencana.

RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam upaya untuk menurunkan tingkat resiko bencana Kabupaten Tangerang, dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut :

Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Bencana

- Memperluas program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) dengan edukasi, pelatihan, dan simulasi berkala.
- Mendorong partisipasi masyarakat dan organisasi lokal dalam sistem peringatan dini dan respons cepat bencana.
- Menyediakan media informasi kebencanaan berbasis digital untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan peringatan dini.

Optimalisasi Tata Kelola dan Infrastruktur Pengurangan Risiko

- Memperbaiki sistem drainase, tanggul, dan kawasan resapan air untuk mengurangi risiko banjir.
- Menyusun regulasi yang lebih ketat terkait pemanfaatan ruang di daerah rawan bencana.
- Meningkatkan sinergi dengan lembaga terkait seperti BPBD, BNPB, BMKG, dan akademisi dalam perencanaan mitigasi berbasis data dan kajian risiko.

III.REALISASI KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN SASARAN STRATEGIS

Pada aspek anggaran secara umum program yang dilaksanakan untuk mencapai 14 sasaran strategis pada tahun 2025 telah cukup baik. sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3
Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	9.408.515.776,00	8.735.774.844,00	92,85
2	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	135.128.174.640,00	126.380.456.768,00	93,53
3	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN / KOTA	84.960.378.138,00	80.097.599.109,00	94,28
4	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	43.831.968.850,00	33.237.508.480,00	75,83
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3.005.920.400,00	2.885.782.750,00	96,00
6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	42.312.200.692,50	42.305.487.000,00	99,98
7	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.263.265.900,00	5.057.229.856,00	96,09
8	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.735.441.650,00	13.594.769.160,00	98,98
9	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.319.346.070,00	5.284.027.320,00	99,34
10	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	14.910.481.040,00	13.854.727.827,00	92,92
11	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.134.289.460,00	1.129.497.660,00	99,58
12	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	865.999.100,00	863.316.300,00	99,69

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
13	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	29.078.630,00	28.755.950,00	98,89
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	796.912.700,00	787.881.500,00	98,87
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	16.233.167.200,00	16.205.418.986,00	99,83
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.767.747.840,00	2.460.311.120,00	88,89
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	32.508.122.990,00	30.030.672.660,00	92,38
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.722.413.117,00	9.675.284.087,00	99,52
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	87.421.324.748,70	86.746.633.968,00	99,23
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	5.337.130.850,00	5.328.679.410,00	99,84
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	5.835.965.390,00	5.631.970.661,00	96,50
22	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.653.947.290,00	3.606.747.790,00	98,71
23	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	306.969.000,00	278.030.880,00	90,57
24	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	908.372.000,00	896.560.000,00	98,70
25	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10.781.128.091,00	10.673.790.915,00	99,00
26	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.712.591.910,00	1.685.481.028,00	98,42
27	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	911.567.200,00	894.549.600,00	98,13
28	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	634.058.703.362,00	625.317.285.365,00	98,62

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
29	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	128.135.088.733,00	102.676.774.136,00	80,13
30	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.278.314.000,00	1.246.232.259,00	97,49
31	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.104.600.940,00	1.039.124.170,00	94,07
32	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	274.043.500,00	267.269.548,00	97,53
33	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	8.831.400,00	1.471.400,00	16,66
34	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.172.723.550,00	2.129.352.339,00	98,00
35	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	29.472.598.000,00	27.935.671.365,00	94,79
36	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	377.350.576.234,00	354.248.646.535,00	93,88
37	PROGRAM PENATAAN DESA	1.888.039.840,00	1.884.985.850,00	99,84
38	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	123.760.446.490,00	119.411.762.766,00	96,49
39	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	174.500.000,00	174.500.000,00	100,00
40	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	8.360.880.000,00	8.240.773.882,00	98,56
41	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	8.604.136.550,00	8.596.457.175,00	99,91
42	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	594.802.730,00	593.661.890,00	99,81
43	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	242.836.920,00	241.846.920,00	99,59
44	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.897.284.100,00	3.885.393.300,00	99,69
45	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3.738.517.120,00	3.602.828.488,00	96,37
46	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.809.877.260,00	1.798.247.060,00	99,36
47	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	130.451.700,00	127.451.700,00	97,70

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
48	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	134.489.500,00	125.242.250,00	93,12
49	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	43.639.498.780,00	43.212.963.329,00	99,02
50	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	995.310.600,00	984.435.310,00	98,91
51	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	14.802.671.725,00	13.649.991.236,00	92,21
52	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	19.480.157.541,50	19.034.555.153,00	97,71
53	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	62.701.981.639,80	60.717.465.014,00	96,84
54	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	122.193.399.230,00	120.355.339.411,00	98,50
55	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	484.387.700,00	484.387.650,00	100,00
56	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	813.280.360,00	807.331.360,00	99,27
57	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	8.596.770.400,00	8.502.490.409,00	98,90
58	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	20.595.268.361,00	20.093.036.083,00	97,56
59	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.022.970.481.207,00	968.782.717.811,00	94,70
60	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11.373.959.350,00	10.963.468.810,00	96,39
61	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	921.170.951.605,00	891.414.623.874,00	96,77
62	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	10.523.629.846,00	10.247.348.946,00	97,37
63	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	7.763.550.030,00	7.465.027.411,00	96,15
64	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	127.720.430.829,00	117.497.081.003,00	92,00
65	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	69.180.000,00	68.866.500,00	99,55
66	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	40.339.800,00	40.339.800,00	100,00

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
67	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	950.496.200,00	866.965.900,00	91,21
68	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	137.993.446.653,00	133.468.726.881,00	96,72
69	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.529.167.800,00	1.477.056.100,00	96,59
70	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	401.622.790,00	399.318.400,00	99,43
71	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	606.202.467,00	579.952.628,00	95,67
72	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	792.034.100,00	790.409.100,00	99,79
73	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	30.337.124.620,00	29.956.853.500,00	98,75
74	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	6.620.650.800,00	6.476.830.640,00	97,83
75	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.899.556.560,00	1.848.959.200,00	97,34
76	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	385.548.000,00	224.363.000,00	58,19
77	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.051.672.000,00	1.048.946.700,00	99,74
78	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.341.032.000,00	5.676.545.635,00	89,52
79	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.143.688.600,00	1.124.991.700,00	98,37
80	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	10.704.648.836,00	9.975.650.653,00	93,19
81	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	95.227.740,00	90.290.240,00	94,82
82	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	115.190.600,00	109.790.600,00	95,31
83	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.363.639.310,00	2.269.894.048,00	96,03
84	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	302.000.680,00	301.987.360,00	100,00

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
85	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.488.295.748,00	4.326.744.771,00	96,40
86	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.411.577.362,00	1.352.422.560,00	95,81
87	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	245.242.150,00	220.143.500,00	89,77
88	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	289.224.400,00	288.470.800,00	99,74
89	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	769.020.000,00	755.892.395,00	98,29
90	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.059.888.912,00	4.960.389.390,00	98,03
91	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	7.189.805.420,00	7.079.357.799,00	98,46
92	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI	139.964.800,00	139.964.800,00	100,00
93	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	348.070.500,00	344.972.309,00	99,11
94	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	6.755.156.590,00	6.430.688.027,00	95,20
95	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	12.658.278.500,00	12.281.761.500,00	97,03
96	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	652.803.210,00	652.055.220,00	99,89
97	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.487.452.900,00	6.324.488.847,00	97,49
98	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.191.841.020,00	3.049.931.562,00	95,55
99	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	612.065.120,00	611.077.000,00	99,84
100	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN	7.107.404.800,00	7.095.032.800,00	99,83

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
	POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
101	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	124.637.528.460,00	123.465.864.504,00	99,06
102	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	39.552.000,00	39.552.000,00	100,00
103	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	3.864.630.985.423,58	3.730.867.153.637,00	96,54
104	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.309.376.000,00	5.898.697.597,00	93,49
105	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	17.718.415.380,00	16.324.274.732,00	92,13
106	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	350.416.345.484,88	342.980.143.892,00	97,88
107	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	78.651.921.103,00	75.601.268.173,00	96,12
108	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	419.355.669.461,04	416.557.854.478,00	99,33
109	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.786.585.380,00	4.633.482.130,00	96,80
110	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.837.508.400,00	6.769.979.497,00	99,01
111	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	8.143.592.173,00	7.377.136.236,00	90,59
112	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.117.626.800,00	1.108.783.355,00	99,21
113	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.327.614.680,00	8.264.705.101,00	99,24
114	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.975.989.980,00	2.923.631.183,00	98,24
115	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.066.493.600,00	2.977.257.825,00	97,09
116	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	940.960.950,00	930.168.890,00	98,85
117	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.356.633.600,00	2.274.320.500,00	96,51

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
118	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	56.762.400,00	56.762.400,00	100,00
119	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.879.983.019,00	5.718.877.120,00	97,26
120	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	52.947.463.920,00	52.301.666.920,00	98,78
121	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	429.180.480,00	261.569.080,00	60,95
122	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	847.072.700,00	838.173.550,00	98,95
123	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.002.586.430,00	956.021.726,00	95,36
124	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.322.596.200,00	3.983.314.700,00	92,15
125	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	341.600.580,00	338.135.580,00	98,99
126	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.554.299.984,00	2.497.934.614,00	97,79
127	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	912.850.200,00	902.531.550,00	98,87
128	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.127.827.400,00	2.123.033.914,00	99,77
129	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	904.955.280,00	852.459.300,00	94,20
JUMLAH ANGGARAN		9.495.608.430.263,00	9.138.649.072.886,00	96,24

IV. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3. 4
Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi %
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	9 = (7*6%-8)/(7*6%)*100
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,70	0,66	94,29	924.109.136.395,00	894.138.273.292,00	96,76	-
2	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,860	0,856	99,53	657.352.245.179,00	648.176.862.502,00	98,60	-
3	Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Indeks pembangunan Pemuda	53	58	108,49	36.957.775.420,00	36.433.684.140,00	98,58	9
4	Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	64	69,37	108,39	5.223.508.510,00	5.138.408.736,00	98,37	10
5	Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,15	1,20	95,83	28.425.872.653,00	28.231.632.461,00	99,32	-
6	Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif, Aman, dan Tertib	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	1	1	100,00	25.681.788.840,00	25.233.252.508,00	98,25	2
7	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	3,48	11,61	333,62	85.822.141.521,00	81.683.510.052,00	95,18	73
		Persentase Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	5,12	43,20	843,74				
		Persentase Daya saing produk unggulan lokal	26,52	26,52	100				

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi %
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	9 = (7*6%-8)/(7*6%)*100
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	3,57	4,83	135,29				
8	Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks desa membangun	0,7853	0,7853	100,0	44.457.481.816,00	41.303.488.574,00	92,91	7
9	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketahanan pangan	78,00	79,39	101,78	9.523.414.830,00	9.072.110.547,00	95,26	6
10	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	67,85	66,26	97,66	21.740.759.590,00	20.428.857.415,00	93,75	-
11	Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang berdaya	1,69	1,69	100,00	62.126.040.154,00	61.375.984.603,00	98,79	1
12	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai Sakip	78	77,87	100	5.728.095.791.260,32	5.495.788.734.824,00	95,94	9
		Nilai indeks kemandirian fiskal	0,525	0,605	115,24				
		Opini BPK	WTP	WTP	100				
		Indeks profesionalitas ASN	75	83,65	111,53				
		Maturitas SPIP terintegrasi	3	2,60	86,67				
		Indeks SPBE	3,19	3,91	122,57				
		Indeks Pelayanan publik	4,3	4,22	98,14				
13	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Presentase infrastruktur dalam kondisi baik	95	97	102,11	1.350.572.953.238,68	1.302.140.813.420,00	96,41	-
		Presentase Realisasi pola pemanfaatan ruang sesuai RTRW	55	57,72	104,95				
		Rasio luas kawasan permukiman, perumahan dan pemakaman yang layak	0,9442	0,9473	100,33				

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi %
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	9 = (7*6%-8)/(7*6%)*100
		Rasio konektivitas kabupaten	0,83	0,60	72				
14	Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh Terhadap Bencana	Indeks kualitas lingkungan hidup	56,89	60,18	105,78	167.139.492.328,00	155.952.791.641,00	93,31	-
		Indeks resiko bencana (IRBI)	115	125,22	91,84				



BAB IV

PENUTUP

PENUTUP

Secara umum, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan performa yang cukup baik dengan mayoritas indikator melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator strategis yang memerlukan perhatian dan penguatan kebijakan agar kinerja pembangunan dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Pada **Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia**, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berhasil melampaui target dengan capaian 76,74 dari target 73,82 (103,96%). Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara agregat. Indeks Pembangunan Pemuda dan Indeks Pemberdayaan Gender juga menunjukkan capaian sangat baik masing-masing sebesar 108,49% dan 108,39%, yang menandakan meningkatnya daya saing generasi muda dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Namun demikian, Indeks Pendidikan (94,77%) dan Indeks Kesehatan (99,52%) belum sepenuhnya mencapai target, serta laju pertumbuhan penduduk yang sedikit di atas target (95,83%), menjadi catatan penting untuk penguatan intervensi sektor pendidikan, kesehatan, dan pengendalian penduduk.

Pada **Tujuan 2: Meningkatkan Kondusifitas Daerah**, Indeks Kesalehan Sosial menunjukkan capaian sangat baik sebesar 108,86%, serta Indeks Ketentraman dan Ketertiban yang mencapai target 100%. Hal ini menggambarkan stabilitas sosial dan keamanan daerah yang tetap terjaga, sebagai fondasi penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial.

Pada **Tujuan 3: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan**, Laju Pertumbuhan Ekonomi tercatat sebesar 5,67%, melampaui target (106,38%). Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan perbaikan signifikan dengan capaian 123,91%, mencerminkan membaiknya kondisi pasar kerja. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan juga tumbuh sangat tinggi (135,29%), serta realisasi investasi yang jauh melampaui target (843,74%), menunjukkan daya tarik ekonomi daerah yang kuat. Namun demikian, terdapat tantangan pada sektor pertanian dan perikanan yang mengalami kontraksi (-0,28%) dengan capaian -8,05%, serta Indeks Ketahanan Pangan (99,49%) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (97,66%) yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih didominasi sektor non-primer dan perlu diversifikasi yang lebih inklusif.

Pada **Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**, sebagian besar indikator menunjukkan capaian sangat baik. Indeks Reformasi Birokrasi (120,88%), Indeks SPBE (122,57%), Indeks Profesionalitas ASN (111,53%), serta Indeks Kemandirian Fiskal (115,24%) menunjukkan penguatan tata kelola dan kapasitas fiskal daerah. Opini BPK tetap WTP, menandakan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang terjaga. Namun, Maturitas SPIP (86,67%), Nilai SAKIP (99,83%), dan Indeks Pelayanan Publik (98,14%) masih memerlukan peningkatan konsistensi pengendalian internal dan kualitas layanan.

Pada **Tujuan 5: Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkelanjutan**, beberapa indikator menunjukkan kinerja positif, seperti persentase infrastruktur dalam kondisi baik (102,11%) dan realisasi pola pemanfaatan ruang sesuai RTRW (104,95%). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup juga melampaui target (105,78%), mencerminkan perbaikan kualitas air dan udara. Namun demikian, Rasio Konektivitas Kabupaten (72,29%) dan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (92,83%) menunjukkan adanya kesenjangan antara pembangunan fisik dan persepsi manfaat masyarakat. Selain itu, Indeks Risiko Bencana (91,84%) menunjukkan peningkatan risiko yang perlu menjadi perhatian serius dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kinerja pembangunan tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan dominasi indikator yang mencapai dan melampaui target. Tantangan utama terletak pada sektor pertanian dan perikanan, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan konektivitas wilayah, serta pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, strategi ke depan perlu difokuskan pada pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi, penguatan ketahanan sektor primer, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif dan berkelanjutan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Link Lampiran :

<https://1drv.ms/f/c/c80f57018eabb5b1/IgDuW4Ry3NAIT6IBQO8acqcPAcaLybNLizLTlvQc6LWPTo4?e=dchHHv>